

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**PERANAN MOHAMMAD HATTA
SEBAGAI WAKIL PRESIDEN
1945-1949**

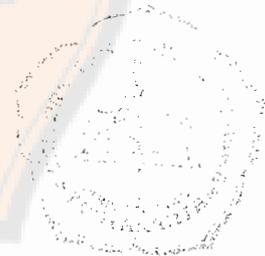
SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Sejarah



Oleh :

Christina Septi Nugraheni
NIM: 981314010



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

SKRIPSI

PERANAN MOHAMMAD HATTA SEBAGAI WAKIL PRESIDEN

TH 1945-1949

Oleh:

Chritina Septi N

NIM: 981314010

Telah disetujui oleh

Pembimbing I



Prof. Dr. P. J. Suwarno, S.H

tanggal.....

Pembimbing II



Drs. Adi Susilo J.R.

tanggal.....

PERANAN MOHAMMAD HATTA

SEBAGAI WAKIL PRESIDEN

1945-1947

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

Christina Septi Nugraheni

NIM: 981314010

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji

Pada tanggal 27 Oktober 2004

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	Drs. Sutarjo Adisusilo J.R.	
Sekretaris	Drs.B. Musidi, M.Pd	
Anggota	Prof. Dr. P.J. Suwarno, S.H.	
Anggota	Drs. Sutarjo Adisusilo J.R.	
Anggota	Drs. A. Kardiyat Wiharyanto, M.M.	

Yogyakarta 27 Oktober

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sanata Dharma

Dekan,

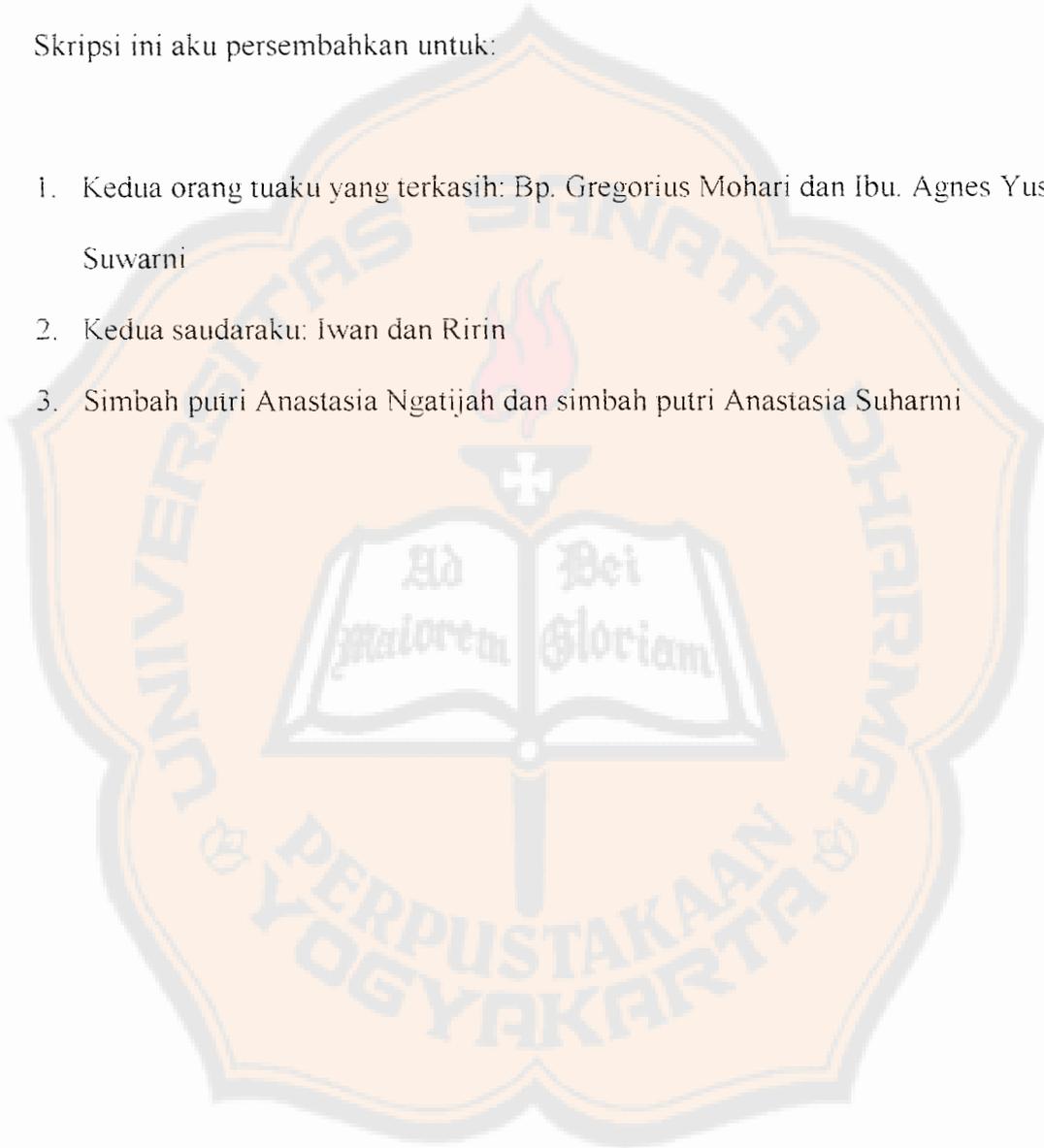

Dr. A.M. Slamet Soewandi, M.Pd.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku yang terkasih: Bp. Gregorius Mohari dan Ibu. Agnes Yustina Suwarni
2. Kedua saudaraku: Iwan dan Ririn
3. Simbah puii Anastasia Ngatijah dan simbah putri Anastasia Suharmi



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

MOTO

Ketuklah maka kamu akan dibukakan

Carilah maka kamu akan mendapat.

Berdoa tanpa berbuat adalah sia-sia

Perbuatan tanpa doa tiada guna.

Pahami kehidupan ini karena hidup ini indah

Janganlah kalah dengan masalah

Sebab masalah yang membuat arti hidup indah.

Aku percaya semua rencana Tuhan baik adanya.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 27 Oktober 2002

Penulis


Christina Septi Nugraheni

ABSTRAK

**PERANAN MOHAMMAD HATTA SEBAGAI WAKIL PRESIDEN
1945-1949**

**OLEH
CHRISTINA SEPTI NUGRAHENI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA**

Skripsi berjudul "Peranan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden 1945-1949" berusaha menjawab tiga permasalahan yaitu: 1) Bagaimana peranan Mohammad Hatta setelah kemerdekaan Republik Indonesia th 1945-1947?, 2) Apa tindakan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden th 1947 dan pelaksanaan perjanjian Renville th 1948?, 3) Bagaimana sikap dan tindakan Hatta dalam Kabinetnya 1948-1949?. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode sejarah, adapun langkah-langkah dalam metode sejarah tersebut mencakup: pemilihan subjek, pengumpulan sumber, pengujian sumber dan historiografi.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini membuktikan bahwa Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden banyak berperan dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia terutama tahun 1945-1949. Mohammad Hatta sangat berperan mempertahankan kemerdekaan RI, peranan Hatta dalam perjuangan RI sebagai Wakil Presiden dapat kita lihat dalam: tindakan-tindakan Hatta mengambil keputusan untuk kepentingan negara, pelaksanaan hasil perjanjian Renville, dan Konferensi Meja Bundar (KMB) sampai penyerahan kedaulatan Belanda kepada RIS. Peranan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden sangat banyak terutama pada awal Pemerintahan RI, Mohammad Hatta dalam memimpin bangsa merupakan seorang organisator yang baik selain itu Hatta juga berperan sebagai kontrol dalam kepemimpinan Soekarno sebagai Presiden RI yang pertama.

Perjuangan para pemimpin RI menghadapi Belanda menggunakan cara diplomasi. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden ditunjuk langsung oleh Presiden Soekarno untuk membentuk Kabinet guna melaksanakan perjanjian Renville. Hatta sebagai Wakil Presiden merangkap Perdana Menteri berusaha keras melaksanakan perjanjian Renville tetapi akhirnya gagal karena melaksanakan Agresi Militer ke II.

Masalah Indonesia Belanda akhirnya dibawa kedalam sidang PBB, oleh karena itu dibuka kembali perundingan antara Indonesia dan Belanda yang dikenal dengan nama KMB. KMB diselenggarakan di Den Haag untuk membicarakan masalah penyerahan kedaulatan, dalam pelaksanaan KMB Mohammad Hatta berperan sebagai ketua delegasi RI. Berakhirnya KMB ditandai dengan penyerahan kedaulatan tanpa syarat Belanda kepada RIS, penerimaan kedaulatan di Belanda diwakili oleh Mohammad Hatta dalam peranannya sebagai ketua delegasi.

ABSTRACT

**The Roles of Mohammad Hatta As the Vice President
1945-1949**

by
Christina Septi Nugraheni
Sanata Dharma University Yogyakarta

This study, entitled "The Roles of Mohamad Hatta As the Vice President (1945-1949) intends to answer three problems. Those problems are: 1) How far was Mohammad Hatta,s roles after the Indonesian freedom of (1945-1947)?, 2) What did Mohammad Hatta do as the Vice President(1947) in relation with the conduction of Renville Agreement (1948)?, 3) How was Mohammad Hatta`s policy in his cabinet during 1948-1949? In this research, the researcher uses the historical method and the steps of the method involve choosing subject, sources collection, testing sources and historiography.

This study found the evidences that as the Vice President, Mohammad Hatta gave big contribution during the fight for Indonesian freedom. As the Vice President, he had big roles in the decision-making for government need, realization of Renville Agreement and Round Table Convention up to the transfer of Dutch to RIS. He also had significant roles in the first year of Indonesian administration as a new country. He also controlled Soekarno`s policy.

Type of Indonesian revolutions for the freedom was cooperative way. Mohammad Hatta as the Vice President is recommended by Soekarno to form the cabinet in order to conduct the result of Renville Agreement. He was failed in doing that recommendation because of the Second Military Aggression in Indonesia.

Finally, Indonesian-Dutch conflicts are brought to the UN International Court and then it was called Round Table Convention. It was held to discuss the transfer of sovereignty for Indonesia. In that case, Mohammad Hatta was the leader of Indonesian delegation. There is the transfer of sovereignty without any condition from Dutch, at the end of the Meja Bundar. Indonesia is represented by Mohammad Hatta as the leader of Indonesian delegation.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan rahmat juga telah memberikan anugrah dan kasihnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ~ Perannan Mohammad Hatta sebagai wakil Presiden th 1945-1949. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Sanata Dharma.

Selama menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak memperoleh bimbingan, dukungan, bantuan dan perhatian dari semua pihak. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan dorongan spiritual maupun material sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada kakak dan adikku yang telah mengingatkan dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ketua program studi Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. P. J. Soewarno, S. H. selaku pembimbing I yang penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dan petunjuk yang sangat berharga bagi penulis.
5. Bapak Drs. Adi Susilo J.R. selaku pembimbing II yang telah membimbing dan mengoreksi skripsi hingga selesai.
6. Seluruh karyawan perpustakaan Sanata Dharma yang telah banyak membantu penulis untuk mendapatkan literatur yang diperlukan penulis.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

7. Seluruh karyawan perpustakaan Mohammad Hatta Yogyakarta, yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mencari sumber-sumber yang dibutuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua temen-temen seperjuangan dalam menimba ilmu di Pendidikan Sejarah khususnya angkatan “98” yaitu : Atik, Nur, Sr. Edita, Rita, Wening, Bruder Siree, Budi, Kenug, Ardi, Suranto, Camar, Yuli dan Patono. Yang telah memberikan perhatian, semangat dan persahabatan selama studi dan menyusun skripsi.
9. Keluarga Om suryono yang telah memberikan bantuan dan semangat dalam menyelesaikan studi, terutama Upik, Nuring dan itok yang memberikan kegembiraan dan canda dalam menjalani hidup.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan bantuan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis dengan senang hati bersedia menerima sumbangan pemikiran saran maupun kritik untuk menyempurnakan tulisan ini.

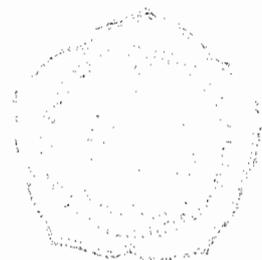
Penulis

Christina Septi Nugraheni

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Landasan teori	14
G. Dugaan-dugaan Sementara	17
H. Sistematika Penulisan	21



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB II MOHAMMAD HATTA SEBAGAI WAKIL PRESIDEN RI

TH 1945-1947	23
A. Dwitunggal Soekarno-Hatta	24
1. Maklumat Keamanan Rakyat	28
2. Maklumat No. X	29
3. Maklumat 1 November 1945	30
4. Peristiwa 3 Juli 1946	31
B. Mohammad Hatta dalam Kabinet Sjahrir	34
C. Kedatangan Sekutu dan Belanda di Indonesia	37
D. Lingga Jati	46

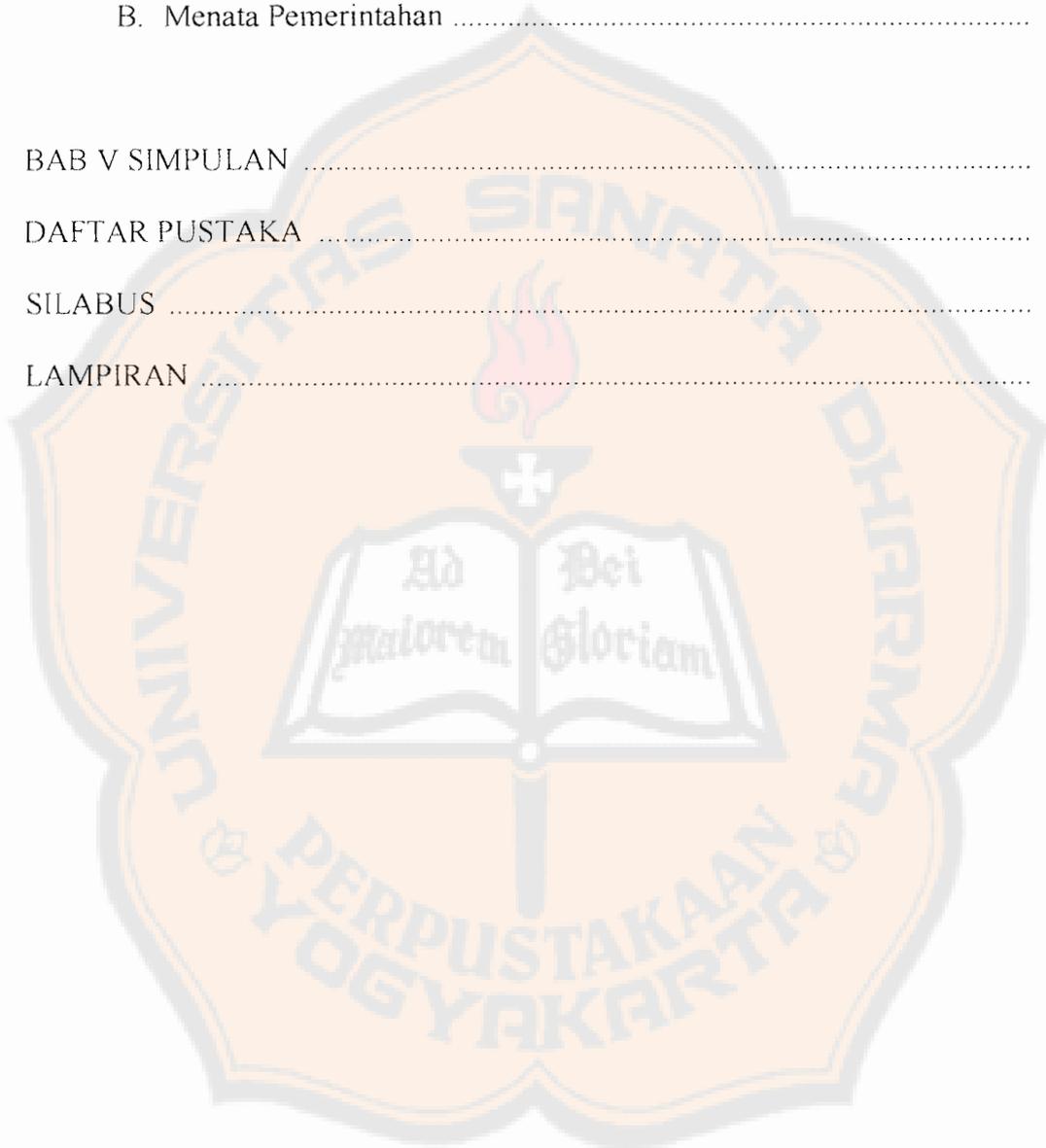
BAB III TINDAKAN MOHAMMAD HATTA SEBAGAI WAKIL PRESIDEN

TH 1947 DAN PELAKSANAAN PERJANJIAN RENVILLE TH 1948

SAMPAI AGRESI II	50
A. Mohammad Hatta di Sumatra	51
B. Hatta ke India	57
C. Perjanjian Renville	61
D. Pelaksanaan Perjanjian Renville	65
E. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia	72
F. Agresi Militer Belanda ke II	75

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB IV SIKAP DAN TINDAKAN MOHAMMAD HATTA DALAM	
KABINETNYA	83
A. Konfrensi Meja Bundar	87
B. Menata Pemerintahan	94
BAB V SIMPULAN	96
DAFTAR PUSTAKA	107
SILABUS	110
LAMPIRAN	119



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seorang anak laki-laki telah lahir di Bukittinggi pada tanggal 12 Agustus 1902, oleh ayahnya anak itu diberi nama: Athar yang mempunyai arti minyak wangi¹. Dari nama tersebut terselip sebuah harapan dari orang tuanya supaya nanti anaknya akan menjadi seorang yang harum namanya atau termasyur. Sebagaimana biasanya anak-anak mempunyai panggilan kesayangan. Demikian pula Athar oleh ibunya dan saudara-saudaranya tidak dipanggil pada namanya, tetapi pada panggilan kesayangan yakni: Atta. Lama kelamaan nama ini kemudian menjadi Hatta dan nama orangtuanya diletakkan didepan namanya, sehingga ia dikenal dengan nama Mohammad Hatta.

Pendidikan Mohammad Hatta pada awalnya hanyalah sekolah di partikelir milik Ledebor karena Mohammad Hatta belum bisa diterima di sekolah rakyat. Tetapi setelah Mohammad Hatta sudah pandai berhitung dan menulis kemudian dia masuk *Eerste Europese Lagere School* (ELS) pada tahun 1913. Setelah lulus dari *Europese Lagere School* Hatta kemudian meneruskan ke sekolah *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO) pada tahun 1916 yaitu sekolah setingkat dengan SMP.

¹ Haji subagijo: I.N. *Bung Hatta Kita*, dalam *Bung Hatta Mengabdikan pada Tjita-Tjita Perjoangan Bangsa*. Panitia peringatan Ulangtahun Bung Hatta Ke-70: Jakarta. 1972.hlm.1.

Tahun 1919 Mohammad Hatta meneruskan ke Betawi, Ia mendaftar di sekolah *Prins Hendrik School* atau P.H.S. untuk mendaftarkan diri pada sekolah dagang. Setelah lulus dari P.H.S. Mohammad Hatta meneruskan sekolahnya di Negeri Belanda, Mohammad Hatta kuliah di *Rotterdamse Handeshogeschool* pada tahun 1921.

Sewaktu masih sekolah Mohammad Hatta sudah sering berkecimpung dalam organisasi-organisasi yang telah ada disekitarnya. Mohammad Hatta adalah anak yang rajin belajar dan takwa pada Tuhan, Mohammad Hatta pandai membagi waktu dalam belajar dan berorganisasi sehingga Mohammad Hatta tidak pernah ketinggalan pelajaran. Organisasi yang diikuti pertama kali oleh Mohammad Hatta adalah perkumpulan sepak bola, Hatta mula-mula hanyalah sebagai seorang anggota tetapi lama kelamaan Ia didorong oleh teman-temannya untuk menjadi pengurus. Mohammad Hatta di dalam kepengurusan dipilih menjadi bendahari dan diminta juga merangkap jabatan penulis.² Pada tahun 1919 datanglah saudara Natzir. Dt. Pamontjak dari Betawi (Jakarta), sebagai propagandaris *Jong Sumatranen Bond*.³ Pamontjak datang ke Sumatra guna mengobarkan semangat kaum muda untuk bersatu mewujudkan suatu kemerdekaan lewat perhimpunan *Jong Sumatranen Bond*. Di dalam perkumpulan ini Mohammad Hatta kemudian duduk sebagai bendahari, Ia disertai tugas untuk memperkuat keuangan perkumpulan, karena kongres *Jong Sumatranen Bond* akan segera dilaksanakan di Sumatra.

² Mohammad Hatta: *Memoir*. Tintamas Indonesia: Jakarta, 1978, hlm.49.

³ Bander Djohan, *Hatta: Mengenang Seorang Teman di masa Remaja, dalam Bung Hatta Pribadinya dalam Kenangan*. Sinar Harapan dan Universitas Indonesia: Jakarta, 1980, hlm. 222.

Pada Waktu Mohammad Hatta menempuh sekolah di Belanda, Mohammad Hatta juga mengikuti kegiatan organisasi yang bernama *Indische Vereeniging* yang nantinya dalam kurun waktu perkembangan berubah menjadi Perhimpunan Indonesia (PI). Sewaktu rapat pengurus di laksanakan atas anjuran Natzir Pamontjak Mohammad Hatta diangkat sebagai bendahari, dengan berbagai macam pengalamannya dalam berorganisasi maka pada tahun 1926 Hatta terpilih sebagai ketua Perhimpunan Indonesia. Organisasi Perhimpunan Indonesia bertujuan untuk menyadarkan para pemuda Indonesia yang berada di Belanda akan pentingnya kemerdekaan bagi bangsa Indonesia.

Mohammad Hatta dalam berjuang tidak pernah kenal lelah dan putus asa walaupun banyak rintangan juga tantangan yang harus di hadapi. Mohammad Hatta tidak pernah takut dalam mengambil keputusan sebab Ia percaya apabila berjalan di jalan yang benar Tuhan akan selalu melindungi. Mohammad Hatta termasuk orang yang taat beragama tetapi Ia tidak fanatik terhadap Agama lain karena Mohammad Hatta berkembang dalam lingkungan yang demokratis. Semangat Mohammad Hatta untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia terus berkobar meskipun Mohammad Hatta mendapat tekanan dari pemerintah Belanda. Mohammad Hatta dalam berjuang juga mengalami keluar masuk penjara tetapi Mohammad Hatta tidak pernah takut dan putus asa, Mohammad Hatta terus berjuang walau kondisi dan situasi yang ada tidak mendukung tetapi Hatta yakin suatu saat nanti bangsa Indonesia akan merdeka.

Di Negri Belanda Mohammad Hatta pernah ditahan pada tahun 1927 dengan tuduhan atas tiga perbuatan, yaitu menjadi anggota perhimpunan terlarang, terlibat

dalam pemberontakan dan menghasut untuk menentang pemerintahan Belanda.⁴Di Indonesia Mohammad Hatta juga pernah ditahan oleh pemerintah Belanda, pada tahun 1934 Mohammad Hatta ditahan karena ia termasuk pemimpin PNI. Pada tahun 1935 Mohammad Hatta di buang ke Boven Digul, dan setelah itu Mohammad Hatta dipindahkan ke Banda Neira (Maluku), akhirnya tahun 1942 Mohammad Hatta dipindahkan ke Suka Bumi. Tidak lama kemudian Mohammad Hatta bebas dari tahanan sebab pemerintah Belanda telah menyerahkan pemerintahannya di Indonesia kepada Jepang.

Setelah Indonesia merdeka Mohammad Hatta juga pernah ditahan oleh pemerintah Belanda. Pada tahun 1948 Mohammad Hatta beserta pemimpin-pemimpin Indonesia yang lain di tahan di Bangka oleh pemerintah Belanda, dengan tujuan dibuangnya para pemimpin Republik Indonesia maka pemerintah Belanda menganggap Indonesia telah mati atau tiada.

Mohammad Hatta termasuk salah satu bapak bangsa Indonesia, Hatta telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia supaya lepas dari jajahan bangsa Asing terutama Jepang dan Belanda. Mohammad Hatta tidak pernah kenal menyerah dalam perjuangannya, Hatta bertekad untuk membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Di dalam diri Mohammad Hatta tercermin sebuah kedisiplinan dan keteguhan hati untuk tetap mewujudkan suatu cita-cita Indonesia merdeka.

Pada tahun 1942 Pemerintah Belanda menyerahkan kekuasaanya di Indonesia kepada Jepang, dengan peristiwa itu bukanlah berarti Indonesia kemudian lepas dari

⁴ Mohammad Hatta, *op. cit.*, hlm. 217.

penjajahan sebab Jepanglah yang nanti menjadi penguasa dan penjajah Indonesia. Pada Masa pendudukan Jepang Mohammad Hatta diajak bekerjasama oleh Jepang, Mohammad Hatta ditawarkan kedudukan sebagai penasihat pemerintahan Jepang di Indonesia. Mohammad Hatta menerima tawaran itu karena Ia percaya bahwa Jepang nantinya akan kalah dan tak lama menjajah Indonesia, oleh sebab itu kesempatan bekerjasama perlu dipergunakan untuk menyusun kekuatan rakyat⁵ Indonesia.

Mohammad Hatta sadar betul keadaan yang ada di Indonesia, Mohammad Hatta berpendapat tidak ada gunanya menentang pemerintahan Jepang sekarang ini sebab hanya akan membuang tenaga dan memakan korban yang banyak bila melakukan perlawanan-perlawanan menentang pemerintahan Jepang. Walaupun Mohammad Hatta bekerjasama dengan Jepang tetapi Mohammad Hatta tetap menyarankan kaum nasionalis supaya menuntut kemerdekaan segera, sejak awal pendudukan.⁶ Kerjasama dengan Jepang bukanlah hambatan bagi Mohammad Hatta untuk terus berjuang mengupayakan kemerdekaan Indonesia, Mohammad Hatta selalu memberikan semangat dan dorongan kepada para pemuda supaya tetap berjuang. Mohammad Hatta pernah menghimbau para pemuda supaya mereka jangan lupa bahwa tidak ada bangsa yang terhormat di dunia ini yang menyerahkan seluruh pertahanannya kepada bangsa lain.⁷

⁵ Deliar Noer, *Mohammad Hatta Biografi Politik*, LP3ES: Jakarta, 1990, hlm. 186.

⁶ A.B. Lopian dan P.J. Droglever, *Menehsuri Jalur Linggarjati*, Grafiti: Jakarta, 1992, hlm, 156.

⁷ Mavis Rose, *Indonesia Merdeka Biografi Politik Mohammad hatta*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1991, hlm.171-172.

Pemboman Hiroshima dan Nagasaki melumpuhkan semua sistem pemerintahan Jepang baik itu di negara Jepang sendiri atau pemerintahan Jepang di daerah jajahan atau pemerintahan di negara lain. Situasi yang kacau membuat Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu sehingga Indonesia mengalami kekosongan pemerintahan. Perjuangan rakyat Indonesia semakin terbuka lebar jalannya untuk mencapai kemerdekaan, para pemimpin Indonesia memanfaatkan benar kesempatan ini. Pada tanggal 17 Agustus 1945 Soekarno dan Mohammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan atas nama Bangsa Indonesia, dari sini maka Indonesia memasuki babak baru dalam perjuangan untuk tetap mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia.

Mohammad Hatta semakin banyak berperan setelah kemerdekaan Indonesia, tugas yang diemban Mohammad Hatta tidaklah mudah karena Ia terpilih sebagai Wakil Presiden pada tahap awal kemerdekaan. Mohammad Hatta menjabat sebagai Wakil Presiden dari tahun 1945 sampai tahun 1949, pada masa Mohammad Hatta menjabat sebagai Wakil Presiden banyak mengalami tantangan baik itu dari dalam dan dari luar negeri. Tantangan dari dalam diantaranya adalah banyaknya pemberontakan-pemberontakan dari rakyat sendiri disebabkan kurang adanya rasa persatuan dari rakyat dan adanya beberapa orang yang ingin berkuasa, tantangan dari dalam negeri lainnya yaitu seringnya pergantian kabinet sehingga program pemerintahan sering berganti-ganti. Sedangkan tantangan dari luar negeri yaitu disebabkan karena Belanda ingin tetap berkuasa di Indonesia.

Peranan Mohammad Hatta sebagai wakil Presiden setelah proklamasi mengalami beberapa tahap perubahan kabinet pemerintahan di antaranya adalah Kabinet Presidensiil, kabinet Sjahrir I, II, dan III, Kabinet Amir Sjarifudin dan kabinet dan yang dipimpin oleh Mohammad Hatta sendiri. Dalam masing-masing kabinet, Mohammad Hatta tidaklah sebagai simbol saja, tetapi Mohammad Hatta ikut bergerak terutama dalam usaha mempertahankan kemerdekaan dan mencari identitas negara Indonesia secara de Facto dan de Jure.

Dalam sejarah kepemimpinan bangsa Indonesia Mohammad Hatta banyak berjasa dalam perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan. Kedudukan Mohammad Hatta sebagai wakil Presiden banyak berperan dalam mempertahankan Indonesia, Hatta tidaklah gentar menghadapi ancaman-ancaman dari Belanda la percaya dan teguh pendirian untuk tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perundingan demi perundingan dilakukan Mohammad Hatta untuk mempertahankan Indonesia hingga PBB pun turun tangan untuk menangani konflik Indonesia dan Belanda. Kerap kali Belanda mengingkari perundingan-perundingan yang telah dilakukan sehingga Indonesia harus terus waspada dalam menghadapi Belanda yang tetap ingin mempertahankan kekuasaannya di Indonesia. Usaha-usaha Belanda untuk tetap mempertahankan Indonesia gagal setelah diadakan Konfrensi Meja Bundar(KMB) di Den Haag, Mohammad Hatta sebagai pemimpin delegasi Republik Indonesia berunding dengan cara tegas sehingga keluar suatu pengakuan kedaulatan dari Belanda atas Republik Indonesia.

Bertolak dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Mohammad Hatta sebagai wakil Presiden Republik Indonesia dari tahun 1945 sampai tahun 1949. Mohammad Hatta sebagai wakil presiden banyak berperan dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia dan sangat berperan dalam mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI) yang hanya dalam waktu sebentar. Beberapa peranan penting telah dilakukan Mohammad Hatta sebagai wakil Presiden terutama setelah Proklamasi kemerdekaan 1945-1947, dalam kabinet Amir Sjarifudin dan perjanjian Renville 1947-1948, juga dalam kabinet Mohammad Hatta sendiri dalam usaha mempertahankan Republik Indonesia lewat Konfransi Meja Bundar yang dilaksanakan di Den Haag.

Sehubungan dengan belum adanya tulisan khusus yang membahas tentang peranan Mohammad Hatta sebagai wakil Presiden Indonesia 1945-1949, maka tulisan ini dapat digunakan untuk pertimbangan dan masukan dalam mengembangkan pengetahuan tentang peranan dan perjuangan Mohammad Hatta. Sumber-sumber yang dipergunakan untuk menulis menggunakan bahasa Indonesia sehingga dapat mudah dipahami.

Rentang waktu antara tahun 1945 sampai tahun 1949 dipilih oleh penulis karena pada tahun-tahun ini Peranan Mohammad Hatta banyak sekali terutama dalam kedudukannya sebagai wakil Presiden. Pada tahun-tahun awal kemerdekaan Indonesia banyak mengalami peristiwa-peristiwa penting antara tahun 1945 sampai 1949, peristiwa-peristiwa itu antara lain: adanya perundingan Lingarjati, Perundingan Renville dan Konfransi Meja Bundar. Usaha-usaha Indonesia dalam diplomasi

tidaklah lepas dari peranan Mohammad Hatta sebagai pengambil keputusan dan sebagai pelaksana keputusan. Dalam Kabinet Sjahrir telah terjadi persetujuan Linggarjati dimana persetujuan telah diambil Soekarno yang didukung oleh Mohammad Hatta, Mohammad Hatta sebagai wakil Presiden juga mendukung keputusan Amir Sjarifudin dalam persetujuan Renville walau nantinya Mohammad Hatta yang akan meneruskan dan melaksanakan perundingan Renville. Pada tahun 1948 sampai 1949 Mohammad Hatta sebagai wakil Presiden ditunjuk langsung oleh Soekarno untuk melakukan perundingan dengan Belanda dalam Konferensi Meja Bundar, dalam perundingan KMB Mohammad Hatta sebagai ketua delegasi Republik Indonesia berhasil mendapat pengakuan kedaulatan Republik Indonesia dari Pemerintah Belanda, penyerahan kedaulatan RI dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 1949. Penyerahan kedaulatan di negara Belanda diwakili Mohammad Hatta dalam kedudukannya sebagai wakil Presiden Republik Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas untuk mengetahui lebih jelas tentang Peranan Mohammad Hatta sebagai wakil Presiden tahun 1945 sampai 1949, adapun permasalahan-permasalahan itu sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan Mohammad Hatta setelah Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945-1947 ?

2. Apa tindakan Mohammad Hatta sebagai wakil Presiden tahun 1947 dan pelaksanaan perjanjian Renville tahun 1948 sampai Agresi Belanda ke II?
3. Bagaimana sikap dan tindakan Mohammad Hatta dalam kabinetnya 1948-1949?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian itu adalah:

1. Menjelaskan peranan Mohammad Hatta sebagai wakil presiden tahun 1945-1947.
2. Menjelaskan tindakan Mohammad Hatta sebagai wakil presiden tahun 1947 dan pelaksanaan perjanjian Renville tahun 1948 sampai Agresi Belanda ke II.
3. Menjelaskan sikap dan tindakan Mohammad Hatta dalam kabinetnya tahun 1948-1949.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dari penulisan skripsi yang berjudul Peranan Mohammad Hatta sebagai wakil presiden RI tahun 1945-1949, akan diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis, Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang lebih tentang peranan Mohammad Hatta sebagai wakil presiden RI.
2. Bagi dunia pendidikan, Penelitian ini dapat berguna untuk menambah informasi tentang peranan Mohammad Hatta sebagai wakil presiden RI.
3. Penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi generasi-generasi selanjutnya untuk mengetahui tentang Peran Mohammad Hatta sebagai wakil presiden RI dalam

ragka mempertahankan kemerdekaan sehingga bisa menumbuhkan rasa nasionalisme.

E. Tinjauan Pustaka

Penulisan ini mengkaji peranan Mohammad Hatta sebagai wakil Presiden RI tahun 1945-1949. Dalam penulisan sejarah peran Mohammad Hatta sebagai wakil presiden RI menggunakan dua sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder⁸. Untuk membahas peranan Mohammad Hatta sebagai wakil presiden RI penulis menggunakan dari berbagai sumber buku.

Beberapa Sumber Primer antara lain:

Pertama, *Memoir*, Karangan Mohammad Hatta yang diterbitkan di Jakarta pada tahun 1978. Buku Memoir sangatlah penting digunakan dalam penulisan peranan Mohammad Hatta sebagai wakil presiden RI, karena buku Memoir dikarang oleh Mohammad Hatta sendiri sebagai pelaku sejarah yang mengalami sendiri peristiwa-peristiwa yang ditulis dalam buku Memoir. Buku Memoir membahas peristiwa-peristiwa sejarah kehidupan Mohammad Hatta dari kecil sampai tua yang dialami oleh Hatta sendiri sehingga buku Memoir merupakan sumber primer yang dapat dipercaya, dimana buku ini juga membahas kedudukan Mohammad Hatta sebagai wakil presiden.

⁸ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*(terjemahan Nugroho notosusanto), UI Press: Jakarta 1986, hlm. 35.

Kedua, *Persetujuan Linggajati Prolog dan Epilog*, yang ditulis oleh Dr. Mr. Ide Anak Agung Gde Agung. Buku ini menerangkan secara gamblang seputar persetujuan Linggajati yang dilakukan oleh Indonesia dan Belanda lewat perwakilan-perwakilan delegasinya untuk mencari jalan damai yang terbaik dalam kedudukan pemerintahan Indonesia. Dalam buku ini dibahas juga peran serta Mohammad Hatta sebagai wakil presiden Indonesia yang turut serta menentukan proses terlaksananya penandatanganan persetujuan Linggajati. Buku ini juga digunakan sebagai sumber primer karena memuat peran serta Mohammad Hatta secara aktif dalam perundingan Linggajati.

Beberapa Sumber Sekunder antara lain :

Pertama, *Mohammad Hatta Biografi Politik* ditulis oleh Deliar Noer. Buku ini menuliskan Biografi Mohammad Hatta dan cara-cara Hatta berkecimpung dalam dunia politik. Hatta terjun dalam dunia politik guna mewujudkan kemerdekaan Indonesia dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan, serta mengisi kemerdekaan Indonesia dengan cara menata pemerintahan Indonesia.

Kedua, *Indonesia Merdeka Biografi Politik Mohammad Hatta* ditulis oleh Mavis Rose. Buku ini menuliskan sepak terjang Mohammad Hatta dalam berpolitik guna merebut kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta.

Ketiga, *Renville*, yang ditulis oleh Ide Anak Agung Gde Agung. Buku ini mengemukakan usaha-usaha Indonesia untuk tetap mempertahankan kemerdekaan walaupun telah banyak kesalahan yang dilakukan oleh Kabinet Amir Sjarifuddin

dalam perundingan Renville. Keinginan Belanda yang tetap ingin menguasai Indonesia dengan cara militer membuat keadaan Indonesia semakin terjepit, tetapi dengan ketidak berdayaan Indonesia memunculkan kesadaran Bangsa-Bangsa Eropa akan niat jelek Belanda. Dalam buku termuat peranan Mohammad Hatta sebagai wakil presiden sekaligus sebagai Perdana Menteri dalam melaksanakan perjanjian Renville.

Keempat, *Indonesia Abad ke-20, Jilid 1 dan 2* yang ditulis oleh G. Moedjanto. Buku ini membahas tentang kemerdekaan Indonesia dan beberapa perundingan antara Indonesia dan Belanda sampai terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kelima, *Menelusuri Jalur Linggarjati*, yang ditulis oleh A.B. Iapian dan P.J. Droglever dicetak oleh Pustaka Utama Grafiti. Buku ini membahas tentang usaha-usaha Belanda dan Indonesia untuk mencapai kesepakatan posisi kedudukan Indonesia dengan cara perundingan linggarjati.

Keenam, *Suka Duka Berunding dengan Belanda*, Buku ini ditulis oleh Mohamad Roem. Suka duka berunding dengan Belanda membahas sepak terjang bangsa Indonesia lewat jalan perundingan KMB untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), juga memaparkan kerjasama yang baik dari delegasi Indonesia dan didukung dari berbagai negara-negara dalam menyelesaikan konflik di Indonesia. Buku Ini digunakan sebagai sumber primer karena membahas peran serta Hatta sebagai wakil Presiden sekaligus sebagai Perdana Menteri dalam usaha mewujudkan NKRI.

Ketujuh, *Pernyataan Rum-Van Roijen* yang ditulis oleh Ide Anak Agung Gde Agung. Buku ini membahas usaha-usaha Hatta sebagai Perdana Menteri untuk melangsungkan kembali perundingan dengan Belanda guna membahas pembentukan Negara Indonesia Serikat.

Kedelapan, *Bung Hatta Mengabdikan Pada Tjita-tjita Perdjjoangan Bangsa*, Buku ini memuat beberapa tulisan dari orang-orang yang dekat dengan Hatta dan pernah bekerjasama dengan Hatta sehingga sedikit banyak mengetahui pribadi Hatta, sehingga buku ini digunakan sebagai sumber sekunder dalam penulisan guna referensi. Buku ini dikeluarkan oleh panitia peringatan ulang tahun Bung Hatta ke-70.

F. Landasan Teori

Dalam penulisan skripsi yang berjudul Peranan Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 1945-1949, penulis berusaha menguraikan beberapa konsep. Konsep-konsep tersebut antara lain: Peranan, wakil, Presiden dan Republik Indonesia. Tujuan dari penjabaran konsep adalah memperjelas arti dari beberapa kata penting yang sering kali digunakan dalam penulisan skripsi ini.

1. Peranan

Peranan adalah fungsi seseorang atau sesuatu dalam kehidupan, faktor manusia memegang penting dalam pembangunan.⁹ Peranan juga berarti bagian dari tugas

⁹ *Kamus Bahasa Indonesia, Jilid II*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: Jakarta, 1983, hlm. 1579.

utama yang harus dilakukan.¹⁰

Maka yang dimaksud peranan dalam penulisan ini mengacu pada peranan atau tugas yang harus dilakukan oleh Mohammad Hatta dalam kedudukannya sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Mohammad Hatta sebagai wakil presiden mengemban tugas penting sebab dalam pemerintahan Indonesia yang baru merdeka, Mohammad Hatta bekerjasama dengan Soekarno sebagai presiden berusaha keras untuk membangun pemerintahan Indonesia. Soekarno dan Mohammad Hatta dalam peranannya sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara saling bekerja sama dengan baik, Mohammad Hatta sebagai wakil presiden bertugas mewakili presiden dalam setiap acara kenegaraan apabila presiden berhalangan, Mohammad Hatta juga bertugas mengendalikan dan mendukung setiap keputusan yang diambil oleh presiden Soekarno, sehingga Hatta juga memegang peranan penting pemerintahan Indonesia dalam kedudukannya sebagai wakil Presiden Republik Indonesia.

2. Wakil

Wakil adalah orang yang dikuasakan menjadi pengganti (sulih) orang lain¹¹

Sebagai wakil presiden Republik Indonesia Mohammad Hatta adalah orang yang yang dikuasakan mengemban tugas mewakili presiden. Sebagai wakil presiden Mohammad Hatta berperan mendampingi presiden dalam mengemban tugas negara.

¹⁰Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer Edisi Pertama*, Modern English Press: Jakarta, 1991, hlm. 1133.

¹¹ Kamus bahasa Indonesia Jilid II, *op.cit.*, hlm. 2448.

Disisi lain Mohammad Hatta berkewajiban mewakili kepala negara dalam acara-acara resmi, seperti halnya dapat kita lihat Hatta mewakili Presiden Soekarno dalam sidang KNIP dan maklumat no. X.

3. Presiden

Presiden adalah kepala negara yang berbentuk Republik.¹²

Indonesia merupakan negara berbentuk Republik sehingga kepala negara Indonesia adalah Presiden. Presiden Indonesia adalah Soekarno dan wakilnya adalah Mohammad Hatta, pada awal pemerintahan mereka dikenal sebagai Dwitunggal dalam memimpin bangsa Indonesia, kerjasama yang baik dan saling melengkapi kekurangan yang ada menjadikan kepemimpinan dalam pemerintahan menjadi semakin baik ditambah oleh dukungan rakyat Indonesia. Soekarno dan Hatta diangkat sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 18 agustus 1945 dalam sidang KNIP.

4. Republik

Adalah bentuk pemerintahan yang berkedaulatan rakyat dan dipimpin oleh seorang presiden.¹³

Pemerintahan Indonesia berbentuk Republik dimana pemerintahan didukung rakyat dan kepala pemerintahan dipimpin oleh presiden. Dalam menjalankan tugas presiden dibantu oleh wakil presiden dan para menteri.

¹² *Ibid*, hlm. 1656.

¹³ *Ibid*, hlm. 1266.

G. Dugaan-dugaan sementara

Dugaan adalah jawaban sementara terhadap suatu masalah penelitian. Dalam suatu penelitian dugaan merupakan pedoman bagi peneliti, hal itu berarti sebuah penelitian dilakukan sesudah dirumuskan suatu permasalahan yang akan diteliti dan diambil kesimpulannya guna menjadi pedoman dalam penelitian. Dengan adanya rumusan dugaan sementara, maka langkah pengujian dapat dilakukan dengan lebih terarah dalam penelitian Peranan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 1945-1949, maka dugaan-dugaan semmentaranya adalah:

1. Peranan Mohammad Hatta setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945-1947.

Dalam perannya sebagai wakil presiden Mohammad Hatta mempunyai tanggung jawab yang sangat besar dalam mengemban tugas. Dalam menjalankan tugasnya Mohammad Hatta mempunyai kewajiban penuh untuk mewakili Presiden dalam berbagai macam acara negara dan dalam mengambil keputusan untuk kepentingan negara, dimana keputusan-keputusan yang diambil Mohammad Hatta selalu didukung dan dipertanggung jawabkan bersama oleh Presiden Soekarno, hal ini dapat kita lihat dalam peristiwa-peristiwa: Pembentukan TKR, Maklumat no.X, Manifesto Politik 1 November 1945 dan peristiwa 3 Juli. Sebagai wakil presiden Mohammad Hatta Juga berjuang untuk pengakuan Kemerdekaan Indonesia sewaktu pendudukan Sekutu dan Belanda. Dalam kurun waktu 1945-1947 Mohammad Hatta sangat mendukung Kabinet Sjahrir yang berjuang dengan cara diplomasi, cara ini akhirnya menghasilkan penandatanganan perjanjian Linggar jati walaupun kemudian

gagal karena Belanda melakukan serangan kepada Indonesia yang dikenal dengan Agresi I.

1. Tindakan Mohammad Hatta sebagai wakil presiden th 1947 dan pelaksanaan perjanjian Renville th 1948 sampai Agresi Belanda ke II.

Pembahasan ini memuat tugas Mohammad Hatta sebagai wakil presiden untuk pergi ke Sumatra guna mengobarkan semangat juang mempertahankan kemerdekaan Indonesia kepada rakyat Sumatra dan ke India untuk meminta dukungan dalam berjuang. Rakyat Sumatra sangat mendukung perjuangan RI guna kemerdekaan penuh dan India mendukung dengan cara membawa masalah Indonesia kedalam Konferensi-konferensi. Pada tahun 1948 Mohammad Hatta juga bertugas untuk melaksanakan perjanjian Renville, usaha-usaha Mohammad Hatta dalam melaksanakan perjanjian Renville adalah dengan cara melakukan gencatan senjata dan melanjutkan perundingan dengan Belanda. Usaha Mohammad Hatta akhirnya gagal juga karena Belanda melanggar perjanjian Renville dan melakukan Agresi II.

3. Sikap dan tindakan Mohammad Hatta dalam kabinetnya th 1948-1949.

Dalam melaksanakan kabinetnya Mohammad Hatta tetap berjuang lewat diplomasi dengan cara berunding dengan Belanda, perundingan yang dilakukan melalui KMB akhirnya membawa hasil yang baik untuk Indonesia karena Belanda kemudian mengakui kemerdekaan Indonesia secara de Facto dan de Jure. Peranan Mohammad Hatta dalam perundingan KMB merupakan ketua delegasi dari Indonesia, bahasan

ini menitik beratkan: Urusan Politik (Konstitusional), ekonomi dan militer. Selain itu juga akan dibahas tentang tindakan Mohammad Hatta dalam menata pemerintahan Indonesia kembali.

H. Metode Penelitian

Dalam mengkaji tentang Peranan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia 1945-1949 menggunakan metode sejarah, yang berarti dalam penulisan penelitian ini menggunakan proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau secara imajinasi dengan menempuh proses historiografi (Penulisan Sejarah)¹⁴. Adapun langkah-langkah dalam metode penelitian sejarah tersebut antara lain:

1. Pemilihan Subjek

Subjek yang dibahas kali ini adalah peran Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia dari tahun 1945 sampai tahun 1949. Subjek ini dipilih karena merupakan kajian sejarah tentang tokoh yang sangat berperan dalam kancah politik kemerdekaan Indonesia. Selain itu subjek dipilih karena mempunyai batas waktu dari tahun 1945-1949, sehingga penelitian ini tidaklah terlalu luas pembahasannya dan jelas rentang waktunya.

2. Pengumpulan Sumber

¹⁴ Louis Gottschalk, *op. cit.*, hlm. 32.

Sama dengan heuristik, heuristik adalah proses mengumpulkan informasi atau data guna keperluan subjek yang diteliti¹⁵. Sumber-sumber data dalam penelitian ini didapat dari bahan-bahan berupa: dokumen, arsip, buku-buku perpustakaan dan lain-lain yang bersangkutan paut dengan penulisan penelitian kali ini. Adapun dalam penulisan menggunakan sumber-sumber primer dan sekunder. Sumber primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah Memoir karangan Mohammad Hatta, buku ini menulis tentang kesaksian Mohammad Hatta sendiri sebagai pelaku sejarah. Sedangkan sumber-sumber sekunder yang digunakan adalah Renville yang ditulis oleh Dr. Mr. Ide Anak Agung Gde Agung dan buku Suka Duka Berunding dengan Belanda yang ditulis oleh Mohamad Roem karena para penulis ini juga merupakan pelaku dan saksi sejarah yang sejaman dengan Mohammad Hatta.

3. Pengujian Sumber

Pengujian sumber adalah suatu langkah yang digunakan peneliti untuk menyeleksi sumber apabila data telah terkumpul sesuai dengan topik yang akan dibahas. Dalam tahap ini penulis dituntut secara cermat dan seteliti mungkin menguji sumber guna menghasilkan penelitian yang akurat. Pengujian sumber dilakukan secara hati-hati sebab banyak buku yang menulis hal yang sama tetapi berbeda-beda interpretasinya, dengan adanya hal ini semakin memberikan pandangan yang luas tentang sumber yang dibahas. Dengan banyaknya sumber yang ada maka diperlukan seleksi dengan cara menguji sumber dan menganalisis data yang ada sehingga akan mendapatkan data-data sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 35.

4. Historiografi

Merupakan langkah terakhir dalam penelitian sejarah yang tertuang dalam bentuk tulisan hasil penelitian sejarah. Historiografi merupakan suatu proses penulisan sejarah yang dimaksudkan menciptakan kembali totalitas dari fakta yang disusun kembali melalui proses untuk menemukan dan melaporkan kebenaran dari fakta yang ada. Dalam penulisan sejarah tidaklah sederhana sebab fakta-fakta sejarah harus: diseleksi, disusun, diberi atau dikurangi tekanan dan ditempatkan dalam suatu urutan kausal. Penulisan penelitian sejarah kali ini berjudul Peranan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden RI 1945-1949.

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Dengan cara menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang nampak sebagaimana adanya. Sumber-sumber yang telah dikumpulkan dan diseleksi dijadikan sebagai prosedur untuk memecahkan masalah yang diteliti. Cara mendapat sumber dalam penelitian adalah dengan studi pustaka, penulis mencari dan mengumpulkan buku-buku yang sesuai juga mendukung dengan topik yang diteliti. Pencarian buku-buku ini dilakukan di beberapa perpustakaan.

I. Sistematika Penulisan

Penelitian tentang “Peranan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia 1945-1949” terdiri dari 5 bab:

- Bab I Berupa pendahuluan, memuat latar belakang masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, tinjauan pustaka, Landasan teori, Metode penelitian dan Sistematika penulisan.
- Bab II Membahas tentang peranan Mohammad Hatta setelah Proklamasi RI tahun 1945-1947. Yang memuat tentang Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden dan Peranan Hatta dalam kabinet Sjahrir.
- Bab III Membahas tentang tindakan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden tahun 1947 dan pelaksanaan perjanjian Renville tahun 1948 sampai Agresi Belanda ke II.
- Bab IV Membahas Sikap dan tindakan Mohammad Hatta dalam kabinetnya tahun 1948-1949, yang memuat sikap dan tindakan Hatta dalam perundingan dengan Belanda dan tindakan Hatta dalam menata pemerintahan Indonesia.
- Bab V Simpulan.

BAB II

MOHAMMAD HATTA SEBAGAI WAKIL PRESIDEN RI TAHUN 1945-1947

Proklamasi kemerdekaan Indonesia tgl 17 Agustus 1945 telah dibacakan oleh Soekarno yang didampingi Mohammad Hatta atas nama bangsa Indonesia, tidaklah akhir dari sebuah perjuangan untuk bebas dari penjajahan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan babak baru bentuk perjuangan rakyat, untuk tetap mempertahankan kemerdekaan RI dari ancaman dan rorongan negara lain yang ingin tetap mempertahankan kekuasaannya di Indonesia seperti sebelum Indonesia merdeka terutama negara Belanda. Bentuk perjuangan rakyat Indonesia sudah semakin terorganisir setelah penjajahan Jepang. Menurut Mohammad Hatta, Orang-orang belanda yang telah absen empat tahun dari Indonesia sudah tidak mengenal perubahan negeri ini¹⁶. Rakyat menghendaki kemerdekaan Indonesia sepenuhnya, Mohammad Hatta menjelaskan bahwa nasionalisme Indonesia bukan gejala yang ditimbulkan oleh Jepang. Walaupun demikian Mohammad Hatta juga mengakui betapa pendudukan Jepang telah menimbulkan kerusakan, tetapi dengan pendudukan itu kemampuan berjuang dan disiplin telah meningkat. Ia menyebutkan setengah juta orang Indonesia telah berlatih dalam kesatuan-kesatuan: PETA (Tentara Pembela Tanah Air), HEIHO (Barisan cadangan Prajurit/ Militer) dan badan badan

¹⁶ Deliar Noer. *op. cit.*, hlm. 276.

bersenjata lain seperti pembantu Polisi.

Kancah Politik di Indonesia sesudah Proklamasi mengalami banyak kemajuan terutama dalam tatanan pemerintahan untuk mewujudkan suatu negara demokrasi. Perjuangan mewujudkan negara demokrasi terlebih dahulu diawali dengan adanya usaha para pemimpin politik bangsa Indonesia untuk mencari pengakuan identitas bangsa secara *de Facto dan de Jure* dari bangsa-bangsa lain. Usaha-usaha untuk mencari identitas negara tidaklah lepas dari beberapa tokoh politik yang telah melakukan diplomasi dengan Belanda, juga para tokoh-tokoh yang ada didalam dan diluar negri yang memberikan dukungannya guna memperlancar jalannya diplomasi.

Dalam perjuangan diplomasi bangsa Indonesia ada beberapa tokoh yang terkait erat dengan perundingan-perundingan yang dilakukan dengan Belanda, diantaranya adalah: Soekarno, Mohammad Hatta, Sjahrir, Amir Sjarifudin, Anak Agung Gde Agung, Mohamad Roem dan masih ada beberapa tokoh-tokoh lain lagi yang terlibat dalam perundingan. Para tokoh perundingan bekerja keras untuk mempertahankan kemerdekaan, setiap perundingan demi perundingan tidaklah lepas dari peran serta Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

A. Dwitunggal Soekarno – Hatta

Kerjasama Soekarno dan Mohammad Hatta sudah terjalin lama sebelum Indonesia merdeka. Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang mereka sudah saling mengenal lewat perjuangan-perjuangan yang mereka lakukan, walaupun Soekarno

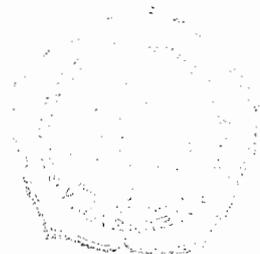
dan Mohammad Hatta pernah juga berselisih paham dalam cara perjuangan mereka. Kerjasama Soekarno dan Mohammad Hatta terjalin kembali sewaktu penjajahan Jepang, pada waktu itu Jepang memberi tawaran kepada Mohammad Hatta juga Soekarno untuk bekerjasama dalam pemerintahan Jepang. Mohammad Hatta mempunyai keyakinan bahwa Jepang nantinya akan kalah, karena itu kesempatan bekerjasama perlu dipergunakan untuk menyusun kekuatan rakyat.

Keyakinan Mohammad Hatta akan kekalahan Jepang terwujud setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Sekutu. Kekalahan ini membuat Jepang bertekuk lutut pada Sekutu, sehingga daerah-daerah pendudukan Jepang diserahkan sepenuhnya pada Sekutu. Keterlambatan kedatangan Sekutu ke Indonesia mengakibatkan terjadinya kekosongan kekuasaan, kesempatan ini tidaklah disia-siakan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia telah resmi dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno didampingi Mohammad Hatta.

Setelah kemerdekaan Indonesia PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) masih perlu merampungkan pekerjaannya, salah satunya adalah memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI harus memilih¹⁷ Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Kepemimpinan Presiden dan wakil Presiden ini lebih dikenal dengan nama Dwi Tunggal Soekarno Hatta. Sekalipun Soekarno dan Mohammad Hatta adalah dua

¹⁷ *Ibid.* hlm. 259.



pribadi yang berbeda tetapi mereka bisa bekerja sama dan saling melengkapi. Kepemimpinan Soekarno dan Mohammad Hatta sudah dikenal di mata masyarakat umum sehingga rakyatpun dapat diatur dan ditata lewat kepemimpinan dwitunggal Soekarno Hatta. Kelihaiannya Soekarno dalam berpidato dengan emosinya yang berdarah panas sangat efektif dalam menarik orang Indonesia kesisinya, bukan hanya satu-satunya sifat kepemimpinannya yang diperlukan tetapi karisma harus didukung oleh ketegasan dan usaha yang terkonsentrasi¹⁸. Kepiawaiannya Soekarno dalam berpidato berhasil membakar dan menumbuhkan semangat perjuangan rakyat, sehingga rakyat tetap mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan. Mohammad Hatta sebagai wakil presiden sekaligus partner Soekarno dalam kepemimpinan RI dikenal sebagai orang yang mempunyai kepribadian seperti batu karang dan keras kepala. Mohammad Hatta dalam perencanaan dan organisasi lebih terkemuka dengan ketekunan, perhatian yang cermat dan detil juga kemampuan menilai akibat-akibat jangka panjang dari suatu tindakan¹⁹, menjadikan kontrol terhadap langkah-langkah yang diambil oleh Soekarno.

Kedua orang itu mempunyai satu kesamaan karakteristik kuat, yang mengikat mereka bersama yaitu suatu didikasi yang kuat dan tak ragu-ragu untuk selalu berjuang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dwitunggal Soekarno Hatta merupakan kesatuan kekuatan dalam kepemimpinan RI masa awal kemerdekaan. Mohammad Hatta mengomentari bahwa menganggap dwitunggal

¹⁸ Mavis Rose, *op. cit.*, hlm. 183.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 184.

adalah hubungan yang kas antara presiden dan wakil presiden²⁰. Hubungan ini memungkinkan Soekarno untuk pergi ke pelosok, berbicara kepada rakyat secara langsung dan menumbuhkan semangat mereka dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, sementara Mohammad Hatta menangani kerumitan detail dari pemerintahan suatu negara merupakan pekerjaan yang paling dikuasainya.

Dwitunggal Soekarno Hatta dalam kepemimpinannya mengalami berbagai macam ujian, sehingga Mohammad Hatta sebagai wakil presiden sering kali harus mengambil keputusan untuk bertindak secara independen dari presiden. Tindakan dan keputusan yang telah diambil oleh Soekarno selalu didukung oleh Mohammad Hatta, demikian juga Mohammad Hatta juga selalu didukung oleh Soekarno dalam keputusan-keputusannya. Kesatuan dwitunggal Soekarno Hatta dapat kita lihat dengan adanya beberapa maklumat dan petisi yang dikeluarkan oleh Mohammad Hatta.

Pada awal pemerintahan dwitunggal Soekarno Hatta memilih sistem kabinet Presidensiil, karena pada awal pemerintahan mereka harus mengambil tindakan dan keputusan lebih cepat dalam menangani masalah. Kata dwitunggal memang dapat mencerminkan hubungan dan kegiatan Soekarno dan Mohammad Hatta, karena dalam setiap keputusan dan tindakan yang telah diambil oleh salah satu dari mereka selalu dipertanggung jawabkan bersama-sama. Memang sejak semula sudah ada persetujuan diantara mereka yang menyatakan bahwa siapa diantara Soekarno dan Mohammad Hatta tinggal dalam kota dia itu mengurus segala hal negara, sedangkan yang sedang

²⁰ Mohammad Hatta. *op. cit.*, hlm. 461.

pergi keluar kota harus ikut bertanggung Jawab²¹. Hal ini dapat kita lihat dalam: Pembentukan TKR yang ditangani oleh Mohammad Hatta bersama Urip Sumohardjo, maklumat No. X tanggal 16 Oktober 1945, Manifesto politik 1 November 1945 dan peristiwa 3 Juli.

1. Tentara Keamanan Rakyat (TKR)

Perjuangan bangsa Indonesia tidaklah lepas dari peran serta militer. Kekuatan militer yang tadinya dari tentara-tentara terlatih di jaman Jepang telah dibubarkan, maka dibentuklah suatu unit untuk menyatukan seluruh tentara dalam bentuk Badan Keamanan Rakyat yang sering disingkat BKR. Kedudukan Badan Keamanan Rakyat ini lama kelamaan tidaklah jelas, disebabkan dalam pembentukan BKR lebih diserahkan pada masyarakat sehingga BKR tidak lama berdiri.

Pada tanggal 4 Oktober 1945 Amir Syarifuddin membawa Didi Kartasasmita untuk diperkenalkan kepada Mohammad Hatta, Didi Kartasasmita menyatakan bahwa kawan-kawan bekas opsir KNIL bersedia menyerahkan dirinya menjadi Tentara Keamanan Rakyat, mereka sudah siap akan konsekuenasi masuk TKR dan siap berperang dengan KNIL apabila KNIL akan menjajah Indonesia kembali. Pada tanggal 5 Oktober Mayor Urip sebagai orang tertua di KNIL pergi menghadap pemerintah, pada kesempatan itu Soekarno sedang berangkat ke Cianjur maka Mohammad Hatta yang bertanggung jawab akan jalannya pemerintahan menyatakan “ Berdirinya Tentara Nasional yang disebut Tentara Keamanan Rakyat atau TKR”.

²¹ *Ibid.*, hlm. 471.

Pada awal terbentuknya Tentara Keamanan Rakyat mereka belum mempunyai markas, maka Mohammad Hatta minta kepada Mayor Urip supaya Ia bersedia melaksanakan perintah pemerintahan Republik Indonesia untuk memilih tempat untuk markas TKR. Atas usulan Mayor Urip markas besar TKR ditempatkan di Porworjo dan pada perkembangannya markas besar TKR akan di pindah ke Yogyakarta.

2. Maklumat No. X.

Pada awal pemerintahan negara Republik Indonesia bersifat totaliter, keadaan demikian dimungkinkan karena pada waktu itu diperlukan pemimpin yang kuat sehingga mengakibatkan peran KNIP menjadi kabur. Untuk mewujudkan negara yang demokratis maka Sjahrir mengusulkan supaya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) harus menyandang peran sementara sebagai badan Legislatif yang diusulkan yaitu menjadi MPR dan DPR. Usulan Sjahrir ini mengacu pada aturan peralihan pasal IV UUD' 45 yang menyatakan bahwa presiden menjalankan kekuasaan non eksekutifnya dengan bantuan sebuah "Komite Nasional"²³, sehingga KNIP diberi hak untuk menjadi badan legislatif.

Dengan adanya usulan itu, Soekarno menugaskan pada Hatta supaya mengeluarkan dekrit yang memberikan kekuasaan legislatifnya kepada KNIP. Pada tanggal 16 Oktober 1945 Mohammad Hatta mengeluarkan maklumat yang dikenal dengan maklumat No. X, yang isi pokoknya adalah:

1. KNIP sebelum MPR-DPR terbentuk disertai kekuasaan Legislatif dan ikut

²³ G. Moedjanto, *Indonesia Abad Ke-20 Jilid I*, Kanisius: Jogjakarta, 1988, hlm. 142.

menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara.

2. Berhubung gentingnya keadaan, banyak anggota KNIP yang diperlukan di daerah-daerah, maka pekerjaan sehari-hari KNIP dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja (BP)²⁴.

Maklumat No. X. ini mengubah sistem pemerintahan Indonesia dari kabinet Presidensial menjadi kabinet Parlementer. Langkah pertama ke arah ini ialah peningkatan status KNIP menjadi DPR dan disamping itu mengambil sebagian tugas MPR yaitu mempunyai kewenangan bersama-sama dengan Presiden untuk menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN)²⁵. Sjahrir terpilih sebagai ketua BPKNIP, kedudukan ini bukanlah berarti Presiden dan wakil Presiden hanya tinggal sebagai simbol belaka, karena pada akhir kabinet Sjahrir dalam menjalankan tugasnya tetap bergantung pada wibawa Soekarno dan Mohammad Hatta.

3. Maklumat 1 November 1945.

Mohammad Hatta mengeluarkan manifesto politik 1 November bertujuan mengkritik sikap Belanda kepada Republik Indonesia, dimana Belanda menganggap lebih luhur dari pada bangsa Indonesia karena mau bekerjasama dengan Jepang. Manifesto ini menyatakan bahwa bangsa Indonesia telah menentukan nasibnya sendiri dengan adanya Proklamasi kemerdekaan. Dari sini Mohammad Hatta menuntut pengakuan kepada dunia apalagi Belanda untuk mengakui Proklamasi

²⁴ *Ibid.* hlm. 143.

²⁵ Deliar Noer, *op. cit.*, hlm. 284.

kemerdekaan Indonesia yang telah dibacakan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945.

Pemerintah berusaha keras memperoleh simpati atau pembelaan dari Luar Negeri sehingga pemerintah mengeluarkan Manifesto Politik 1 November'45 yang ditandatangani oleh Wakil Presiden, yang berisi:

1. Penegasan bahwa kemerdekaan adalah keinginan seluruh rakyat yang kesadaran kebangsaannya menjadi masak sesudah penindasan Jepang selama tiga setengah tahun, dan bahwa demokrasi adalah paham yang diperjuangkan rakyat seperti terlihat dalam UUD dibentuk di masa penindasan Jepang.
2. Ajakan bersahabat dengan negara-negara lain serta mengharapkan bantuan mereka terutama USA untuk membangun masyarakat serta pernyataan kesedia RI untuk bersahabat dengan semua negara dan bangsa di dunia asal kedaulatan RI dihormati²⁶.

Mohammad Hatta juga mengemukakan bahwa atas dasar ini maka pintu Indonesia terbuka bagi siapapun, termasuk bagi tenaga-tenaga ahli dan modal dalam memanfaatkan kekayaan Indonesia asalkan ketentuan-ketentuan RI diperhatikan. Malah segala milik bangsa asing termasuk Belanda akan dikembalikan dan hutang Hindia Belanda akan diakui sebagai hutang RI, semua usaha-usaha ini dilakukan untuk menuntut diakuinya Indonesia merdeka.

4. Peristiwa 3 Juli 1946.

²⁶ G. Moedjanto, *op. cit.*, hlm 145.

Peristiwa 3 Juli 1946 merupakan suatu usaha sekelompok tokoh-tokoh yang dikenal sebagai pendukung Tan Malaka untuk memaksa Presiden menarik mandat kabinet Sjahrir dan menyetujui susunan kabinet yang mereka ajukan. Walaupun para tokoh kebanyakan para pendukung Tan Malaka tetapi tindakan ini dilakukan tanpa sepengetahuan Tan Malaka. Peristiwa 3 Juli terjadi dikarenakan para pendukung Tan Malaka tidak setuju dengan cara perjuangan Sjahrir melalui diplomasi, mereka menganggap cara diplomasi terlalu lunak untuk menghadapi Belanda yang ingin tetap menguasai Indonesia, oleh sebab itu mereka kemudian menyusun kabinet baru dalam rangka menghadapi dengan cara yang lebih keras. Terjadinya peristiwa 3 Juli sebenarnya dipicu adanya hasil perundingan Sjahrir dengan Belanda yang menghasilkan suatu pengakuan kekuasaan Republik Indonesia secara de Facto yang hanya meliputi Jawa dan Sumatra, dari sinilah kelompok pendukung Tan Malaka tidak setuju dengan cara perjuangan Sjahrir lewat diplomasi.

Kepemimpinan dwitunggal Soekarno Hatta kembali teruji dengan adanya *coup d'etat* yang dilakukan oleh para pendukung Tan Malaka. Kabar tentang usaha penculikan menteri pertahanan Amir Sjarifudin membuat Mohammad Hatta harus datang ke Istana Kepresidenan dengan segera, di Istana Kepresidenan Soekarno sedang berunding dengan Jendral Soedarsono yang merupakan pendukung Tan Malaka. Presiden Soekarno menunjukan surat kepada Mohammad Hatta yang dibawa Soedarsono katanya berasal dari Panglima Besar Sudirman. Isi surat tersebut menyatakan meminta supaya kabinet Sjahrir dibubarkan dan digantikan dengan

kabinet baru²⁷. Presiden Soekarno dan Mohammad Hatta tidak percaya begitu saja dengan laporan Soedarsono, maka Mohammad Hatta memastikan hal tersebut dengan cara menghubungi Jendral Urip dan menceritakan semua kejadian yang ada, Jendral Urip mengatakan bahwa hal tersebut sangatlah mustahil apabila Jendral Besar Sudirman membuat surat semacam itu. Dengan adanya keterangan tersebut Presiden Soekarno dan Mohammad Hatta yakin bahwa Soedarsono sudah sekongkol dengan para pengikut Tan Malaka untuk melakukan suatu *coup d'état* yang tidak berdarah²⁸. Dengan adanya peristiwa tersebut akhirnya Presiden Soekarno dan Mohammad Hatta mengambil keputusan untuk menangkap Jendral Soedarsono dan kawan-kawannya.

Dengan adanya peristiwa-peristiwa di atas dapat kita lihat adanya kerjasama yang baik antara Presiden Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai wakil Presiden. Kepemimpinan dwitunggal berhasil menyatukan rakyat dan memberikan kepercayaan kepada rakyat akan adanya suatu pemerintahan yang baik guna kemajuan Indonesia. Kepercayaan Soekarno terhadap keputusan-keputusan yang diambil oleh Mohammad Hatta dan mempertanggung jawabkan bersama semua keputusan yang telah diambil, merupakan suatu sikap yang terbaik dalam awal Pemerintahan Republik Indonesia karena mereka sadar dengan adanya kondisi yang ada menyebabkan mereka harus mengambil keputusan dengan cepat dan tepat guna mengendalikan keadaan. Kepemimpinan dwitunggal Soekarno dan Mohammad Hatta berhasil mengobarkan

²⁷ *Ibid.*, hlm. 488.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 490.

semangat persatuan dan perjuangan kepada rakyat Indonesia dalam memertahankan kemerdekaan RI yang telah diproklamasikan bersama atas nama bangsa Indonesia.

B. Mohammad Hatta dalam Kabinet Sjahrir

Tuduhan kepada Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai kolaborator Jepang menyebabkan posisi Kabinet Presidensiil yang dipimpin oleh Soekarno menjadi terpojok, untuk membebaskan dari tuduhan itu maka dibentuklah Kabinet Parlemerter. Pada tanggal 14 November 1945 Presiden Soekarno mengangkat Sjahrir menjadi Perdana Menteri Kabinet Parlemerter. Dengan dibentuknya Kabinet Parlemerter bukanlah membuat kedudukan Presiden dan Wakil Presiden hanyalah simbul belaka, sebab Kabinet Parlemerter yang di pimpin oleh Sjahrir masih sangat tergantung pada wibawa kepemimpinan Soekarno dan Mohammad Hatta.

Dalam menghadapi Pemerintahan Belanda Perdana Menteri Sjahrir menggunakan cara diplomasi, keputusan Sjahrir menggunakan cara diplomasi dikarenakan Sjahrir mengetahui kekuatan militer Indonesia tidaklah kuat untuk menghadapi kekuatan militer milik Belanda, walaupun militer juga mendukung keberhasilan jalannya diplomasi. Sjahrir berusaha keras berjuang dengan cara diplomasi guna pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia dari Belanda juga dukungan dari negara-negara lain. Di dalam pemerintahannya Sjahrir juga menghadapi perlawanan-perlawanan dari beberapa organisasi-organisasi yang tertampung dalam Persatuan Perjuangan (PP) yang dipimpin oleh Tan Malaka, PP berusaha menandingi Kabinet Parlemerter Sjahrir karena mereka tidak setuju dengan cara diplomasi yang dipakai Sjahrir dalam menghadapi Belanda. Tan Malaka

mengungkapkan strateginya dalam menghadapi Belanda yaitu dengan cara Revolusioner yang didukung dengan kekuatan militer yang ada. Pada awalnya PP mempunyai banyak dukungan tetapi setelah kegagalan untuk menggerakkan kekuatan Revolusioner menyebabkan banyak organisasi tidak bersimpatik kembali pada kepemimpinan dan strategi Tan Malaka.

Kabinet Sjahrir yang pertama mengalami kegagalan dalam berunding dengan Belanda, karena Belanda hanya mau mengakui wilayah Republik Indonesia yang meliputi daerah Jawa saja. Hasil diplomasi dengan Belanda ditentang keras oleh Persatuan Perjuangan, sehingga menyebabkan Kabinet Sjahrir meletakkan jabatan yang disetujui oleh Soekarno. Setelah peletakan jabatan dilakukan, Soekarno kemudian mempercayakan Tan Malaka untuk membentuk kabinet. Kabinet yang telah dibentuk oleh Tan Malaka gagal dijalankan sebab program yang telah ditawarkan tidak disetujui dan tidak didukung oleh Dwirunggal Soekarno Hatta. Dalam sidang KNIP pada tanggal 2 Maret Mohammad Hatta menunjuk kembali Sjahrir menjadi Perdana Menteri. Dalam kabinetnya Ia akan koalisi dan akan memasukkan tema PP yaitu merdeka 100%, Kabinet Sjahrir yang baru mempunyai program 5 pasal, yaitu :

1. Berunding atas dasar pengakuan RI (100%),
2. Mempersiapkan rakyat Negara di segala lapangan politik, ketentaraan, ekonomi, dan sosial untuk mempertakankan kedaulatan RI,
3. Menyusun pemerintahan pusat dan daerah yang demokratis,

4. Berusaha sekuat-giatnya untuk menyempurnakan pembagian makanan dan pakaian,
5. Tentang perusahaan dan perkebunan hendaknya oleh pemerintah diambil tindakan-tindakan seperlunya sehingga memenuhi maksud sebagai memenuhi maksud sebagai termasuk dalam UUD pasal 33.²⁹

Kabinet Sjahrir yang kedua juga mengalami kegagalan dalam menjalankan programnya. Kegagalan itu disebabkan karena dalam perundingannya dengan Belanda tidak bisa menghasilkan pengakuan RI 100%. Kegagalan delegasi Indonesia dalam perundingan di Hoge Veluwe disebabkan karena Belanda hanya mau memenuhi tuntutan RI berupa kekuasaan *de facto* RI atas Jawa dan Madura, tetapi tidak untuk Sumatra.³⁰ Kegagalan Sjahrir berunding dengan Belanda menyebabkan dwitunggal Soekarno Hatta harus kembali mengamankan Negara Indonesia sebab banyak golongan yang kecewa dengan kegagalan diplomasi RI, maka kabinet Sjahrir jatuh lagi.

Pada tanggal 2 Oktober dwitunggal menyerahkan kembali pemerintahan mereka kepada Sjahrir, dengan mengizinkan Sjahrir menyusun kabinet yang ketiga.³¹ Dalam Kabinet Sjahrir kali ini, perundingan dengan Belanda masih tetap dilakukan. Pemerintah Inggris menunjuk *Lord Killearn* untuk menengahi masalah Indonesia dengan Belanda, pada tanggal 15 Oktober 1945 Sjahrir menandatangani

²⁹ G. Moedjanto, *op. cit.*, hlm. 162.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 166.

³¹ Mavis Rose, *op. cit.*, hlm. 225.

persetujuan Linggar Jati dimana wakil dari Belanda mengakui Republik Indonesia sebagai penguasa de facto atas Jawa, Sumatra dan Madura.

C. Kedatangan Sekutu dan Belanda di Indonesia

Jepang menyerah tanpa syarat pada tanggal 15 Agustus 1945 kepada Sekutu menjadikan berakhirnya PD II. Pemerintah Inggris ditugaskan oleh Sekutu untuk mengatur di Wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia di atur oleh pemerintah Inggris di bawah suatu komando wilayah yang disebut *South East Asia Command* (SEAC). Memang negri-negri barat masih menganggap dirinya berhak untuk memerintah koloni-koloninya dahulu. Belandapun masih merasa berhak menguasai Indonesia kembali, sehingga Belanda mendesak Inggris untuk bekerjasama menangani Wilayah Indonesia. Tugas SEAC yang dijalankan oleh tentara Inggris di Indonesia di kenal dengan nama AFNEI (*Allied Forces for Netherlands East Indies*) tugas-tugas itu adalah:

1. Menerima penyerahan tentara Jepang tanpa Syarat, melucuti dan mengembalikannya ke tanah Airnya;
2. Membebaskan APWI (*Allied Prisoners and War Internees*) tugas ini disebut RAPWI (*Recovery of Allied Prisoners and War Internees*);
3. Menjaga keamanan dan ketertiban sehingga memungkinkan pemerintah sipil berfungsi kembali;
4. Mencari keterangan tentang dan mengadili para penjahat perang.³²

³² G. Moedjanto, *op. cit.* hlm. 97.

Penanganan Indonesia termasuk wilayah yang dipimpin oleh Lord Mountbatten, Ia mengangkat Jenderal Sir Philips Christison sebagai panglima pasukan Inggris di Indonesia. Sebelum Sekutu menduduki Indonesia Lord Mountbatten mengutus wakilnya yaitu Laksamana Muda Petterson melihat keadaan Indonesia terlebih dahulu. Dalam pertemuan Petterson dengan Yamato, Yamato menyarankan untuk tidak memperlakukan Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai penjahat perang, dengan menilai tanggung Jawab SEAC yang begitu luas sekarang ini tidak memungkinkannya bisa terlibat dalam pertempuran besar, dan menggunakan kota-kota pantai menjadi kunci, dan menggunakan kota-kota tersebut untuk melakukan evakuasi pasuka Jepang serta para interniran, dan saling bekerja sama dengan pemerintahan Indonesia.³³Saran ini diberikan untuk membantu kelancaran Sekutu dalam menjalankan tugasnya dengan melihat kondisi Indonesia setelah kemerdekaan Indonesia di Proklamasikan. Petterson melihat sendiri peran dwitunggal Soekarno Hatta dalam kepemimpinannya mengendalikan rakyat, Kepemimpinan dwitunggal benar-benar Ia rasakan pada waktu rapat umum di Ikada, Soekarno di dampingi Mohammad Hatta berhasil menenangkan dan membubarkan massa yang datang.

Mounbatten menerima rekomendasi Petterson dan memerintahkan Jendral Christison panglima Sekutu yang baru diangkat untuk wilayah ini, supaya mengintruksikan Republik Indonesia melanjutkan administrasinya atas seluruh wilayah Jawa dan Sumatra. Mounbatten merekomendasikan usul itu bukan hanya

³³ Mavis Rose, *op. cit.*, hlm. 213.

karena laporan dari Petterson saja, tetapi Mounbatten telah menerima laporan dari beberapa orang Inggris yang pernah datang ke Indonesia, orang-orang itu antara lain:

1. Kolonel Dr. C. W. Massey

Ia adalah seorang tawanan Jepang yang dipergunakan oleh pihak Jepang di dalam kesehatan karena kekurangan medis pada waktu itu, oleh karena itu ia dapat berhubungan dengan orang-orang Indonesia diluar kem-kem Jepang. Ia mendapat kesan bahwa orang-orang Indonesia sangat membenci Belanda.

2. Istri Lord Mountbatten

Lady Adwina Lord Mountbatten datang ke Indonesia dalam rangka hubungan Palang Merah Inggris, yaitu suatu badan yang berusaha meringankan penderitaan interniran-interniran dan tawanan perang Jepang. Lady Mountbatten dalam kunjungannya ke beberapa tempat di Indonesia mempunyai kesan yang sama seperti kolonel Massey.

3. Letnan kolonel Van der Post

Adalah seorang tawanan Jepang yang berhasil mengadakan hubungan dengan beberapa golongan dan kelompok Indonesia, Dia juga mendapat kesan bahwa gelora kebangsaan Indonesia selama pendudukan Jepang kuat sekali. Beliau yakin bahwa Proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno Hatta memang mendorong arus kebangsaan dan bukan rekayasa pihak Jepang.³⁴

Dengan adanya beberapa keterangan dari orang-orang yang pernah datang ke Indonesia inilah maka Mounbatten menerima rekomendasi Petterson. Disetujuinya

³⁴ Ide Anak Agung Gde Agung, *Persetujuan Linggarjati Prolog dan Epilog*, Pustaka Nusantara dan Sebelas Maret University, Yogyakarta, 1995, hlm. 15.

rekomendasi tersebut guna memperlancar pelaksanaan tugas Sekutu untuk membebaskan tawanan perang dan interniran Jepang di kem-kem Jepang, melucuti tentara Jepang dan memulangkan mereka secepat mungkin ke tanah Air mereka

Kedatangan pasukan Sekutu yang dipimpin oleh Letnan Jendral Sir Philip Christison mendarat di Jakarta pada 28-29 September 1945, sedangkan pasukan Belanda yang dipimpin oleh Dr. H. J. Van Mook tiba di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 1945. Kedatangan Sekutu dan Belanda yang terlambat telah memberikan peluang besar kepada Republik Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia dan menata pemerintahan. Sikap Inggris dan Belanda sangatlah berbeda dalam menanggapi kemerdekaan Indonesia, perbedaan itu dapat kita lihat nanti dengan adanya pertentangan antara pendapat Christison dan Van Mook tentang Pemerintahan RI.

Kedatangan sekutu mula-mula dianggap membahayakan oleh rakyat Indonesia, karena mereka merasa Pemerintahan yang baru terbentuk bisa dikuasai oleh Sekutu. Kecurigaan itu kemudian leyap dengan adanya pengakuan pemerintahan RI oleh Inggris. Letnan Jendral Chistison pada tanggal 29 September mengumumkan suatu pernyataan bahwa pasukan Inggris hanya melakukan tugas Sekutu, pasukan Inggris tidak bersedia untuk dipergunakan membantu pihak Belanda memulihkan kekuasaan Kolonialnya di Indonesia. Hanya ditempat-tempat yang diduduki oleh pasukan Inggris seperti Jakarta, Surabaya, Medan dan Padang. Pasukan Inggris bertanggung Jawab untuk memelihara keamanan dan ketertiban, sedang diluar kota-kota tersebut adalah tanggung jawab pemerintahan Republik Indonesia. Dengan

adanya pernyataan Christison secara tidak langsung Inggris mengakui pemerintahan Republik Indonesia secara *de facto*.

Pengakuan Inggris terhadap pemerintahan Republik Indonesia menjadikan pukulan berat bagi Van Mook dalam menjalankan tugas di Indonesia. Belanda menganggap kemerdekaan Indonesia adalah buatan Jepang dan kemerdekaan itu tidak didukung oleh rakyat, sedangkan Soekarno dan Mohammad Hatta dianggap sebagai Kolaborator Jepang. Belanda datang ke Indonesia bertujuan untuk mengambil alih pemerintahan Indonesia, dengan adanya kedatangan Belanda kembali rakyat mulai curiga akan sikap Belanda yang ingin kembali sebagai rezim penjajah.

Pemerintahan Indonesia yang diajak bekerjasama dengan Sekutu untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam rangka tugas di Indonesia merasa kecewa dengan adanya tentara Belanda yang datang dengan cara membonceng tentara Sekutu. Kedatangan tentara Belanda banyak membuat kekacauan dan kekerasan di Indonesia, maka Mohammad Hatta menulis surat kepada Letnan Jendral Sir Philip Christison sebagai panglima Sekutu di Indonesia. Dalam surat ini Mohammad Hatta mengemukakan kekecewaannya karena pernyataan Christison bahwa tentara Belanda tidak akan turut mendarat bersama Sekutu, ternyata tidak benar.³⁵

Kedatangan Belanda ke Indonesia yang dilindungi Inggris dikuatirkan akan menimbulkan kekacauan arus perjuangan kemerdekaan sangatlah kuat untuk tetap mempertahankan RI, rakyat khawatir dengan kedatangan bangsa lain yang ingin

³⁵ Mohammad Hatta, *op. cit.*, hlm. 275.

menjajah kembali apalagi bangsa itu adalah Belanda yang dulu pernah menjajah Indonesia. Usaha-usaha rakyat yang ingin tetap mempertahankan Kemerdekaan Indonesia dapat kita lihat dengan adanya pertempuran di berbagai daerah, pertempuran terjadi dipicu dengan adanya ketidakpercayaan rakyat terhadap Inggris yang telah memberikan peluang kepada tentara Belanda untuk datang ke Indonesia.

Dengan adanya arus nasionalisme yang semakin kuat rakyat Indonesia berusaha keras untuk tetap mempertahankan kemerdekaan. Kedatangan pejabat-pejabat NICA dipercaya akan membuat keonaran di Indonesia, oleh sebab itu Mohammad Hatta menulis surat kepada komandan Sekutu di Batavia, Mohammad Hatta menegaskan sebagai berikut:

1. Belanda tidak pernah berjasa bagi rakyat Indonesia, pada waktu tentara Jepang mendarat, tentara Belanda tidak langsung mempertahankan Hindia Belanda, yang berperang melawan Jepang adalah Australia, Inggris dan India (Sebagai bagian tentara Inggris).
2. Belanda tidak pernah berjasa turut menyelesaikan PD II bahkan banyak orang Belanda yang terpengaruh Nazi, sehingga memudahkan tentara Jerman menduduki Belanda. Kejadian di Arnhem adalah juga contoh bagai mana orang Belanda merugikan Sekutu pada waktu itu.
3. Semasa PD II tidak ada tentara Belanda yang bertempur melawan Jerman di Eropa.³⁶

³⁶ Drs. Basuki Suwarno. *Hubungan Indonesia Belanda Periode 1945-1949 Jilid I*. Pan percetakan Upakara. Jakarta. 1980. hlm. 54.

Oleh sebab itu Mohammad Hatta menyarankan kepada pihak Sekutu untuk membatasi ruang gerak tentara Belanda supaya tidak terjadi kekacauan.

Tentara Belanda yang tetap melebarkan sayapnya seiring dengan pemerintahan Inggris dalam menjalankann tugas, menjadikan kendala terselesaikannya tugas Sekutu di Indonesia. Dalam keadaan yang sulit Montbatten mendesak Belanda untuk melakukan perundingan dengan pemerintahan Indonesia guna kepentingan Sekutu dalam memperlancar menjalankan tugasnya di Indonesia dapat berjalan dengan lancar. Pendapat Mountbatten ditentang keras oleh pemerintah Belanda. Belanda bersikeras tidak mau berunding dengan pemerintahan RI terutama berunding dengan Soekarno dan Mohammad Hatta. Pemerintahan Inggris menganggap keputusan Belanda tidak relevan bila Belanda tidak mau berunding dengan Republik Indonesia. Dengan adanya ini, Inggris tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik sampai adanya perundingan antara Belanda dan Indonesia.

Tugas sekutu pada awalnya tidak bisa berjalan dengan baik karena ketidakpercayaan rakyat terhadap Sekutu. Kekacauan itu dapat kita lihat dengan adanya pertempuran-pertempuran rakyat melawan Sekutu yang disebabkan rakyat merasa kemerdekaan Republik Indonesia terancam. Beberapa perlawanan daerah telah menggagalkan tugas Sekutu, daerah-daerah itu antara lain: Bandung, Jawa Tengah dan Surabaya. Perlawanan rakyat Surabaya benar-benar menyadarkan pihak Inggris perlunya diadakan perundingan RI dan Belanda. Dalam pertempuran di Surabaya Brigadir Mallaby terbunuh, peristiwa ini mengakibatkan kemarahan Inggris. Tentara Inggris kemudian mendesak rakyat untuk menyerahkan senjata dengan cara tangan

diangkat, dengan adanya perintah tersebut rakyat Surabaya merasa tersinggung, kemarahan rakyat Surabaya terhadap tentara Inggris menimbulkan pecahnya perang pada tanggal 10 November selama seminggu. Walaupun pada akhirnya rakyat Surabaya kalah tetapi pertempuran rakyat Surabaya memberikan semangat kepada rakyat Indonesia yang lain untuk tetap mempertahankan kemerdekaan RI.

Van Mook sadar perlunya dilakukan perundingan dengan pemerintah RI, sebab situasi yang ada di Indonesia tidak memungkinkan Belanda untuk tetap menguasai Indonesia lewat jalan peperangan. Van Mook merasa perlu mengadakan perundingan dengan RI karena ia yakin bahwa Inggris tidak akan bergerak untuk membebaskan para tawanan dan interniran sebelum pihak Belanda melakukan perundingan.

Van Mook dalam berunding dengan Indonesia mengacu pada keterangan Ratu Wilhelmina Desember 1942, hal ini menimbulkan banyak kritikan dari para politikus RI. Mohammad Hatta berkomentar: "Mengapa kami harus menekukkan lutut kami kepada seorang Ratu asing?".³⁷ Pemerintah Indonesia pun sadar akan perlunya dilaksanakannya perundingan dengan Belanda. Pada tanggal 1 November 1945 muncul Manifes Politik wakil Presiden Hatta yang menyatakan bahwa pemerintah Republik Indonesia bersedia mengadakan kerjasama dengan pemerintah Belanda dengan pemerintah Belanda harus mengakui Republik Indonesia.³⁸

³⁷ Deliar Noer, *op. cit.*, hlm. 278.

³⁸ Ide Anak Agung Gde Agung, *op. cit.*, hlm. 32.

Tindakan Van Mook sangatlah menggemparkan pemerintahan Belanda, oleh sebab itu usulan Van Mook pada awalnya tidak disetujui pemerintah Belanda. Sedangkan Inggris semakin sadar akan perlunya dilakukan perundingan antara Belanda dan RI dikarenakan keadaan Indonesia semakin kacau dan tidak percaya lagi dengan tentara Inggris. Inggris mendesak pemerintah Belanda supaya mau berunding dengan RI, Belanda setuju dengan usul tersebut asalkan mereka tidak berunding dengan Soekarno dan Mohammad Hatta. Usulan tersebut disetujui pemerintah Indonesia sebab yang akan berunding adalah Perdana Menteri. Disetujuinya usulan tersebut disebabkan keadaan pemerintah Indonesia pada waktu itu juga sedang terjadi perubahan Kabinet Presidensiil diganti dengan Pemerintahan Demokrasi Parlementer dimana Pemerintahan dikepalai oleh Perdana Menteri yang bertanggung Jawab kepada Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).³⁹

Setelah diadakan perubahan sistem pemerintahan muncullah Soetan Sjahrir yang berkedudukan sebagai Perdana Menteri RI, maka Sjahrirlah yang melakukan perundingan dengan Belanda. Perundingan Indonesia dan Belanda yang pertama dilakukan di Markas besar Tentara Inggris di bawah pengawasan Jendral Christison. Setelah perundingan tersebut pemerintah RI sering mengadakan perundingan-perundingan dengan Belanda. Hasil perundingan-perundingan itu biasanya menghadapi jalan buntu pada akhirnya PM Sjahrir berhasil mengadakan perundingan Lingga Jati, walaupun pada akhirnya hasil dari perundingan Lingga Jati lah yang menjatuhkan Kabinet Sjahrir. Perundingan-perundingan yang dilakukan Indonesia

³⁹ *Ibid.*, hlm. 38.

dan Belanda didorong pemerintahan Inggris karena Inggris bisa menjalankan tugasnya di Indonesia dan akan menarik semua pasukan dari Indonesia pada tanggal 30 November 1946.

D. Linggar Jati

Pada tanggal 7 Oktober 1946 delegasi Belanda dan delegasi Indonesia mulai mengadakan perundingan kembali, kali ini perundingan dilakukan dengan perantaraan Lord Killearn yang telah ditunjuk oleh pemerintah Inggris untuk menjadi penengah. Pelaksanaan perundingan dilaksanakan di daerah Cirebon tepatnya di desa Linggar Jati. Pemilihan tempat Linggar Jati sangatlah mendukung dalam pelaksanaan perundingan karena daerah Linggar Jati dianggap aman dari konfrontasi tentara-tentara Indonesia dan Belanda.

Dalam perundingan Linggar Jati delegasi Indonesia melibatkan Dwitunggal Soekarno Hatta, disetujuinya oleh Schermerhorn dwitunggal terlibat dalam perundingan menandakan adanya perubahan besar pandangan politik pemerintah Belanda terhadap kepemimpinan Soekarno dan Mohammad Hatta. Soekarno, Mohammad Hatta dan Sjahrir dalam kepemimpinannya melaksanakan pemerintahan mendasarkan pada perjuangan dengan cara diplomasi yang didukung oleh militer. Sebelum perundingan Linggar Jati dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 1945 militer telah mencapai persetujuan gencatan senjata⁴⁰ antara kedua belah pihak untuk mendukung pelaksanaan perundingan Linggar Jati.

⁴⁰ G. Moedjanto, *op. cit.*, hlm. 181.

Perundingan Linggar Jati menghasilkan 17 pasal pokok persetujuan meskipun pada awal perundingan mengalami kesulitan dalam mencapai kesepakatan. Ada dua soal bahasan yang sulit untuk dicapai kesepakatan, yaitu soal perwakilan RI di Luar negeri dan soal kedudukan Negara Indonesia Serikat. Dua hal bahasan tersebut merupakan tujuan utama delegasi Indonesia supaya RI mendapat pengakuan dari negara-negara lain dan diakui kedaulatannya.

Adanya kebuntuan-kebuntuan dalam perundingan yang dilakukan antara delegasi Indonesia dan Belanda yang cukup sulit maka Schermerhorn menyusun siasat supaya usulan-usulan Belanda dapat disetujui dalam Linggar Jati. Schermerhorn berangkat ke Kuningan menghadap Soekarno dan Mohammad Hatta untuk menjelaskan bahwa masih ada pasal-pasal yang belum dapat disetujui, oleh sebab itu Ia mengajukan tawaran bahwa pihak Belanda menyetujui persetujuan dengan istilah "berdaulat" akan tetapi dengan syarat pihak Indonesia juga memperlihatkan *good will*nya dengan cara menerima rumusan pasal 7,9 dan 16 sebagai mana diajukan pihak Belanda.⁴¹Di luar dugaan Soekarno dan Mohammad Hatta dengan gembira menerima saran Schermerhorn bahwa istilah merdeka dirubah menjadi berdaulat. Keputusan Soekarno dan Mohammad Hatta membuat kekecewaan Sjahrir sebab Belanda menggunakan jalan belakang untuk mencari kesepakatan dalam perundingan, dengan adanya pernyataan Soekarno dan Mohammad Hatta menandakan berakhirnya perundingan Linggar Jati.

⁴¹ Ide Anak Gde Agung. *op. cit.*, hlm. 162.

Hasil persetujuan Linggar Jati mendapat protes keras dari KNIP, KNIP tidak bersedia memberikan pengesahan terhadap hasil perundingan Linggar Jati sebab terlalu menguntungkan pihak Belanda. Sjahrir mendapat serangan yang sangat keras dari partai-partai yang tidak senang dengan kepemimpinannya. Melihat keadaan tersebut maka Soekarno sebagai Presiden mengajukan peraturan No. 6. Pada tanggal 29 Desember 1946, Presiden Soekarno mengambil keputusan untuk menambah keanggotaan KNIP dari 200 menjadi 541 serta mengubah susunannya. Keputusan Presiden mendapat tantangan besar karena penambahan jumlah anggota KNIP hanyalah usaha untuk mengesahkan persetujuan Linggar Jati. Mohammad Hatta sebagai wakil Presiden yang berbicara di muka sidang KNIP menyatakan bahwa kalau peraturan presiden yang menyebabkan bertambahnya anggota KNIP itu ditolak, maka Presiden dan Wakil Presiden mempersilahkan KNIP untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang lain.⁴² Pidato Mohammad Hatta membuat kaget peserta sidang KNIP, mereka tidak bisa lagi menentang keputusan tersebut maka mereka harus menerima hasil persetujuann Linggar Jati.

Penandatanganan Lingga Jati dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 1947 merupakan suatu kemenangan diplomatik bagi Sjahrir sebagai wakil delegasi Indonesia dalam menghadapi Belanda. Parlemen Belanda merasa terpukul dengan adanya penandatanganan persetujuan Linggar Jati, sebab Belanda tidak bisa kembali

⁴² G. Moedjanto, *op. cit.*, hlm. 183.

BAB III**TIDAKAN MOHAMMAD HATTA SEBAGAI WAKIL PRESIDEN
TH 1947 DAN PELAKSANAAN PERJANJIAN RENVILLE
TH 1948 SAMPAI AGRESI BELANDA II**

Perundingan Linggar Jati telah ditandatangani bersama antara Belanda dan Republik Indonesia gagal, sebab Pemerintahan Belanda merasa tidak puas dengan hasil perundingan yang telah disetujui bersama. Belanda kemudian mencabut kesediannya untuk melakukan gencatan senjata yang pada akhirnya melakukan Agresi Militer. Kabinet Amir Sjarifudin berusaha melakukan perundingan kembali dengan Belanda, yang pada akhirnya nanti menghasilkan perjanjian Renville.

Berlangsungnya perundingan antara Belanda dan Republik Indonesia dibantu oleh pihak KTN dalam pelaksanaannya. Perundingan dilakukan diatas kapal AS dengan nama kapal Renville sehingga perundingan dikenal dengan nama Renville. Pada waktu pelaksanaan perjanjian Renville Mohammad Hatta sedang berada di Sumatra, dalam rangka memberikan semangat kepada rakyat Sumatra untuk terus berjuang melawan Belanda guna mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sewaktu Mohammad Hatta berada di Sumatra Ia diberi mandat oleh Presiden Soekarno untuk berangkat ke India guna meminta bantuan senjata kepada Nehru, permintaan bantuan pada India dikarenakan Belanda kelihatannya akan melakukan agresi militer II.



Keberadaan Mohammad Hatta di Sumatra dan India akan dibahas pada penulisan kali ini, selain itu akan dibahas juga tentang Pelaksanaan Perjanjian Renville.

Pelaksanaan perjanjian Renville dilaksanakan sewaktu Mohammad Hatta menjabat sebagai Perdana Menteri. Amir Sjarifudin yang dianggap tidak berhasil melakukan programnya pada waktu berlangsung perundingan Renville akhirnya mengundurkan diri. Keadaan Indonesia yang serbasulit mengakibatkan tidak ada orang yang berani memimpin Kabinet, maka Presiden Soekarno mengutus Mohammad Hatta untuk membentuk kabinet guna melaksanakan perjanjian Renville. Pelaksanaan perundingan-perundingan yang dilakukan guna melaksanakan perjanjian Renville tidak berjalan lancar mengakibatkan Pemerintahan Belanda melakukan Agresi Militer Belanda ke II. Dalam penulisan kali ini juga akan dibahas tentang pelaksanaan perjanjian Renville sampai Agresi Militer Belanda ke II.

A. Mohammad Hatta di Sumatra

Pada tanggal 20 Mei 1947 Mohammad Hatta berangkat ke Sumatra atas undangan anggota-anggota KNIP asal Sumatra guna melihat keadaan rakyat dan perkembangan Sumatra. Pemerintahan RI mengutus Mohammad Hatta untuk meningkatkan perjuangan rakyat Sumatra, Mohammad Hatta merupakan orang yang tepat guna memberikan semangat di Sumatra sebab Mohammad Hatta mengetahui persis tradisi dan budaya di sana karena Mohammad Hatta berkembang dan tumbuh di Sumatra. Pulau Sumatra yang luas merupakan tantangan pemerintah untuk mengkoordinasi kekuatan rakyat dalam rangka mempertahankan kelangsungan pemerintah Republik Indonesia. Perjuangan rakyat Sumatra yang masih bersifat

kedaerahan dan hanya tunduk kepada pemimpinnya, memunculkan banyak berdiri laskar-laskar yang saling bersaing satu sama lain sehingga memunculkan kekacauan dan keresahan rakyat Sumatra.

Kedatangan Mohammad Hatta di Sumatra pertama-tama guna memberikan semangat perjuangan pada rakyat untuk melawan Belanda yang ingin menguasai Indonesia kembali. Mohammad Hatta berkeliling Sumatra sampai ke pelosok-pelosok desa dalam memberikan semangat perjuangan dengan cara berpidato dan memberikan wejangan-wejangan yang mengobarkan semangat rakyat supaya tetap setia mendukung pemerintahan RI. Kedatangan Mohammad Hatta disambut baik oleh rakyat Sumatra karena kedatangannya memberikan harapan dan semangat rakyat untuk tetap berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kehadiran Mohammad Hatta ditengah-tengah masyarakat Sumatra memberikan dukungan Psikologis⁴⁴ yang sangat hebat dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pekik “merdeka” yang diucapkan Mohammad Hatta disambut berulang-ulang oleh rakyat dengan meneriakkan merdeka beberapa kali sehingga menumbuhkan semangat rakyat dan kepercayaan diri rakyat untuk tetap membela kemerdekaan Republik Indonesia. Lagu Indonesia Raya selalu mengiringi setiap akhir pertemuan dengan Mohammad Hatta, lagu Indonesia Raya sangat memberikan semangat yang berkobar-kobar dalam perjuangan.

Alasan kedua Mohammad Hatta datang ke Sumatra adalah untuk menertipkan

⁴⁴ Mavis Rose, *op.cit*, hlm. 231.

pemerintahan RI di Sumatra. Kekacauan daerah Sumatra dipicu dengan berdirinya laskar-laskar yang tunduk pada tiga atau empat partai politik⁴⁵ yang saling bersaing dan saling menghancurkan setiap laskar yang dianggap musuhnya. Persaingan tidak sehat antar laskar-laskar mengakibatkan kekacauan pemerintahan di Sumatra. Daerah Sumatra telah memiliki tentara sendiri tetapi laskar-laskar tetap berdiri tanpa mempedulikan komando dari tentara, sehingga mengakibatkan keresahan rakyat Sumatra karena tidak ada kesatuan. Tidak adanya kesatuan antara tentara dan laskar menyebabkan beberapa daerah Sumatra berhasil diduduki oleh tentara Belanda. Pengepungan daerah-daerah strategis mengakibatkan beberapa daerah jatuh ketangan Belanda tanpa perlawanan yang berarti dalam menghadapi Belanda, karena tidak ada kesatuan maka mempermudah pendudukan Belanda di Sumatra.

Ketika Mohammad Hatta tinggal di Bukit Tinggi Ia minta kepada Residen Rasyid untuk mengundang beberapa organisasi supaya berkumpul kerumah Tamu Agung. Tujuan Mohammad Hatta mengundang mereka ialah guna memberikan nasehat supaya mereka bersatu, satu dalam komando dan satu dalam tujuan yaitu kemerdekaan.⁴⁶ Setelah mendengar nasehat Mohammad Hatta mereka kemudian berapat dan menghasilkan permufakatan: mendirikan suatu Badan Pegawai Negeri dan Kota (BPNK), menyatukan sejumlah besar partai serta organisasi di Sumatra menjadi

⁴⁵ Mohammad Hatta. *op. cit.*, hlm. 517.

⁴⁶ *Ibid.* hlm. 520.

suatu Fron Pertahanan Nasional dan menyatukan berbagai unit tempur yang saling terpisah menjadi Tentara Reguler.⁴⁷

Dalam pemerintahan daerah Sumatra Mohammad Hatta juga memperbaiki pengaruh pemerintahan yang terpusat hanya di Jawa, Mohammad Hatta berusaha memulihkan kembali otonomi lokal guna memperbaiki ekonomi rakyat Sumatra. Selain itu Mohammad Hatta juga berusaha mengatur perdagangan eksternal atas komediti penting Sumatra dengan Singapura dan Semenanjung Malaya, dengan membentuk perusahaan perdagangan pusat. Usaha Mohammad Hatta memperbaiki sistem pemerintahan di Sumatra ialah dengan cara membimbing dan mengatur ketertiban yang didukung oleh rakyat, maka kekuatan untuk mempertahankan daerah Sumatra bisa diharapkan dengan adanya semangat juang untuk tetap merdeka. Keberadaan Mohammad Hatta di Sumatra juga mengusahakan pengumpulan uang (harta benda) untuk menyokong perjuangan. Candu dan barang berharga lainnya yang dapat diselamatkan dari Jakarta ke Yogyakarta yang kemudian dibawa ke Bukit Tinggi diserahkan kepada Mohammad Hatta kemudian diberikan kepada Komodor Udara Halim Perdana Kusuma untuk membeli pesawat terbang di Luar Negri.⁴⁸

Usaha Mohammad Hatta mengobarkan semangat perjuangan kepada Rakyat Sumatra, karena rakyat Sumatra perjuangannya masih bersifat kedaerahan dan belum terorganisir sehingga mengakibatkan kurang adanya persatuan di antara rakyat, maka Mohammad Hatta dalam pidatonya menitik beratkan perlunya persatuan guna

⁴⁷ Mavis Rose, *op. cit.*, hlm. 232.

⁴⁸ Deliar Noer, *op. cit.*, hlm. 306.

menggalang kekuatan menghadap Belanda. Wejangan-wejangan yang diberikan Mohammad Hatta selalu mengobarkan semangat rakyat untuk berjuang dan selalu mengingatkan pentingnya persatuan rakyat menghadapi Belanda yang ingin berkuasa kembali di Indonesia. Mohammad Hatta sadar benar kurang adanya persatuan dikalangan rakyat Sumatra, bukti kurangnya persatuan di kalangan rakyat Sumatra dapat dilihat dengan jatuhnya beberapa daerah yang berhasil diduki Belanda sedangkan laskar-laskar berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya satu komando.

Belanda berhasil menduduki beberapa daerah di Sumatra, keberadaan tentara Belanda semakin diperkuat setelah disetujuinya perjanjian Renville, yang memuat pengakuan Republik Indonesia akan wilayah pendudukan Belanda dengan adanya garis Demarkasi Van Mook. Beberapa daerah Sumatra berhasil diduduki Belanda ketika Mohammad Hatta berada di sana, kekawatiran akan penangkapan Wakil Presiden oleh Belanda, menyadarkan Mohammad Hatta dan rakyat Sumatra perlunya kesatuan komando untuk mengatur dan menyusun kekuatan bersama guna satu tujuan yaitu kemenangan. Atas nasehat Mohammad Hatta kepada beberapa partai dan organisasi-organisasi Sumatra membentuk suatu Fron Pertahanan Nasional guna mempertahankan daerah Sumatra yang belum diduduki Belanda.

Mohammada Hatta berada di Pematang Siantar ketika Belanda mulai merebut kekuasaan Indonesia, daerah-daerah penting di Sumatra berhasil diduduki oleh Belanda. Mohammad Hatta melihat sendiri tidak adanya suatu komando sehingga Ia

berkesimpulan persatuan masih terletak pada niat belum pada kenyataan.⁴⁹ Perjuangan mempertahankan daerah Sumatra masih belum didukung adanya persatuan, Laskar-laskar yang menyerbu pendudukan Belanda tidak didukung oleh kekuatan tentara. Mohammad Hatta kemudian memanggil Kolonel Hotman Sitompul untuk menanyakan kenapa ia tidak mau membantu laskar-laskar, Hotman Sitompul menjawab pertanyaan Mohammad Hatta bahwa laskar-laskar itu menentukan strategi sendiri.⁵⁰ Pada waktu itu Mohammad Hatta dianjurkan meninggalkan Pematang Siantar karena daerah di sekitarnya sudah diduduki Belanda, maka Mohammad Hatta pun pergi ke utara sebab daerah Sumatra Utara belum banyak diduduki Belanda.

Hasil perjanjian Renville sangatlah merugikan kekuasaan Republik Indonesia sebab daerah kekuasaan Republik menjadi semakin sempit, menurut garis demarkasi Van Mook ada sebagian daerah Republik menjadi daerah pendudukan Belanda. Persetujuan perjanjian Renville sangat membuat kekecewaan pada rakyat Sumatra sebab banyak daerah Sumatra menjadi daerah pendudukan Belanda. Sewaktu berada di Bukit Tinggi setelah pulang dari India Mohammad Hatta mendapat informasi ada kapal terbang yang mendarat di Gandut yang membawa Perdana Menteri Amir Sjarifudin, Sjahrir, Zaenal Baharudin dan Prawoto untuk membawa Mohammad Hatta kembali ke Yogyakarta. Sebelum Mohammad Hatta meninggalkan Sumatra ia memberika pidato yang terakhir pada rakyat Sumatra, Mohammad Hatta mengatakan

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 305.

⁵⁰ Mohammad Hatta, *op. cit.*, hlm. 518.

bahwa perjanjian Renville hanyalah suatu mata rantai dalam perjuangan kita yang panjang. Mohammad Hatta memperingatkan, bahwa bangsa yang kalah adalah bangsa yang mengaku kalah, perjuangan kita teruskan dengan berbagai resikonya. Kita sudah diterima mempertahankan kemerdekaan kita dalam PBB, sebab itu Republik Indonesia tidak bisa lagi dihapus dari peta dunia.⁵¹

B. Hatta ke India

Ketika Mohammad Hatta berada di Sumatra Ia sempat pernah pergi ke India atas saran Presiden Soekarno. Pada waktu Hatta berada di Bukit Tinggi datang sebuah kapal terbang dari Yogyakarta yang dikemudikan oleh Patnaik orang dari India. Tujuan Patnaik datang ke Indonesia guna membawa obat-obatan ke Yogyakarta sebagai balas jasa India kepada Republik Indonesia yang telah memberikan bantuan beras kepada India sewaktu Sjahrir menjabat sebagai Perdana Menteri. Setibanya di Yogyakarta Patnaik diutus oleh Presiden Soekarno untuk singgah terlebih dahulu ke Sumatra guna membawa Mohammad Hatta berbicara dengan Nehru, apakah India dapat membantu Republik Indonesia⁵² dalam peralatan senjata, sebab Belanda kelihatannya baru menyusun kekuatan untuk menyerang Republik Indonesia kembali.

Mohammad Hatta pergi ke India dengan cara menyamar sebagai Co-Pilot nama samaran Mohammad Hatta adalah Abdullah, semua keperluan Mohammad Hatta sudah dipersiapkan dari Yogyakarta diantaranya adalah Pasport dengan nama Abdullah dan pakain Co Pilot yang diukur sesuai dengan baju Mohammad Hatta yang

⁵¹ *Ibid.* hlm. 522.

⁵² *Ibid.* hlm. 503.

berada di Yogyakarta. Mohammad Hatta bersedia memenuhi saran Presiden Soekarno untuk datang ke India, Ia telah mengenal Nehru sejak lama, sebab mereka pernah berteman dan berjuang bersama dalam negara masing-masing dengan tujuan yang sama yaitu berjuang untuk mencapai kemerdekaan bebas dari segala macam bentuk penjajahan. India telah mendapatkan kemerdekaan secara penuh terlebih dahulu, kemerdekaan India juga didukung oleh pemerintah Inggris setelah Kabinet Koalisi Churchill yang diganti dengan kabinet Labour di bawah Attlee.⁵³ Penyamaran Mohammad Hatta dengan nama Abdullah mempunyai tujuan supaya dalam perjalanan lebih terjaga keselamatannya, karena selama ini Belanda selalu mengamati gerak para pemimpin Indonesia yang mengupayakan kemerdekaan, Belanda juga terus membatasi hubungan Republik Indonesia dengan negara lain.

Kepergian Mohammad Hatta ke India disertai oleh Mr. A. Karim, Dr. Masdulhak Nasution dan Adisutjipto sebagai Co Pilot asli. Dalam perjalanannya ke India Mohammad Hatta sempat singgah di beberapa kota guna keperluan perjuangan. Kota-kota yang disinggahi Mohammad Hatta antara lain: Kuala Lumpur, Rangoon, Calcuta dan terakhir New Delhi. Pada saat Mohammad Hatta berada di India Ia tinggal di Constitution Hall⁵⁴ atas saran Dr. Sudarsono wakil Republik Indonesia di India. Mohammad Hatta baru sampai di India pukul 9.30 malam, pada pagi harinya Mohammad Hatta baru bisa datang kerumah Jawaharlal Nehru. Kedatangan

⁵³ *Ibid.* hlm. 506.

⁵⁴ Constitution Hall dahulu adalah tempat tinggal tentara Amerika di India guna mempertahankan India dari penjajahan Jepang.

Mohammad Hatta tidak diketahui oleh Nehru sama sekali, ketika Mohammad Hatta menemui Nehru Patnaik hanya memberitahukan bahwa ada tamu dari Indonesia bernama Abdullah yang akan menyampaikan suatu pesan dari Presiden Soekarno. Setelah melihat yang datang adalah Mohammad Hatta Nehru memarahi Patnaik karena Patnaik tidak memberitahukan yang sebenarnya tamu yang datang. Mohammad Hatta disambut baik oleh Nehru tetapi Nehru tidak bisa berbicara banyak karena ia harus menghadapi sidang Kabinet yang telah dijadwalkan terlebih dahulu.

Mohammad Hatta baru bisa menemui Nehru pada keesooan harinya, sebagai sahabat lama pembicaraan mereka berjalan dengan santai tetapi serius. Mohammad Hatta meminta bantuan senjata pada Nehru, tetapi Nehru menjawab bahwa ia belum bisa memberikan bantuan senjata karena urusan senjata masih di tangani oleh Inggris guna mencegah kerusuhan Hindia/Muslim menjelang saat kemerdekaan dan pemisahan India.⁵⁵ Nehru baru bisa menjanjikan dukungan kepada Mohammad Hatta lewat protes-protes kepada negara-negara barat yang ingin menghilangkan pengaruh kolonialisme. Nehru juga memberikan dukungan kepada Mohammad Hatta untuk terus berjuang sebab sekalipun Republik Indonesia menderita dan kena pukulan yang hebat dari Belanda, tetapi Republik Indonesia sudah ada maka tidak mungkin dihilangkan dari peta dunia⁵⁶ apalagi setelah diselenggarakannya perjanjian Linggar Jati.

⁵⁵ Mavis Rose, *op. cit.*, hlm. 508.

⁵⁶ Mohammad Hatta, *op. cit.*, hlm. 508.

Sewaktu berada di India Mohammad Hatta juga sempat menemui Mahatma Gandhi, Mohammad Hatta diperkenalkan oleh Nehru kepada Mahatma Gandhi dengan nama Abdullah yang berasal dari Indonesia. Mahatma Gandhi heran juga akan sikap Belanda yang tetap ingin menjajah Indonesia kembali, padahal Belanda tahu bahwa bahwa Republik Indonesia telah memproklamasikan sebagai negara merdeka. Mahatma Gandhi berpendapat Belanda sekarang ini tidak mengenal dunia yang telah berubah wajah yaitu menentang adanya kolonialisme, Mahatma Gandhi percaya bagaimanapun juga agresifnya Belanda, Indonesia tetap akan menang. Mahatma Gandhi juga mengatakan bahwa perjuangan Indonesia pasti menang dan kemerdekaan Indonesia sepenuhnya mesti terlaksana dalam beberapa tahun lagi.⁵⁷

Setelah menemui Mahatma Gandhi, Mohammad Hatta langsung berpamitan kepada Nehru untuk segera kembali ke Indonesia. Keyakinan Mohammad Hatta setelah menemui Nehru dan Mahatma Gandhi semakin kuat bahwa bangsa Indonesia pasti akan terbebas dari penjajahan dan menjadi sebuah negara merdeka. Dukungan Nehru kepada Indonesia dengan cara memprotes tindakan Belanda di negara-negara barat nanti berbuah juga sebab akhirnya Indonesia berhasil mendapat kedaulatannya secara penuh. Dukungan itu dapat kita lihat pada waktu India mendukung Sjahrir dalam berjuang didepan Majelis Perserikatan Bangsa-bangsa, masalah Indonesia dibawa dalam Konferensi Asia dan perjuangan India membawa masalah Indonesia kedalam sidang PBB. Sedangkan perkataan Mahatma Gandhi semakin memberikan

⁵⁷ *Ibid.* hlm. 511.

keyakinan dan kekuatan bagi Mohammad Hatta untuk terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

C. Perjanjian Renville

Pada waktu Mohammad Hatta berada di Sumatra untuk memberikan semangat perjuangan dan persatuan bagi rakyat Sumatra di Jawa telah terjadi banyak pergolakan politik dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Mohammad Hatta tidak menyaksikan beberapa peristiwa bersejarah yang menentukan kedudukan Republik, peristiwa-peristiwa tersebut diantaranya adalah: Penggantian Perdana Menteri dan perjanjian Renville. Belanda menekan terus menerus pemerintahan Republik Indonesia untuk tujuan perluasan pendudukan Belanda setelah tercapainya perjanjian Linggar Jati, ketidakpuasan Belanda akan hasil Linggar Jati mengakibatkan kemacetan perundingan dengan Republik Indonesia. Perundingan dilakukan kembali dengan bantuan KTN, dalam perundingan kali ini berhasil mencapai kesepakatan Perundingan Renville, dikenal dengan nama Renville karena dilakukan di atas kapal AS yang bernama Renville.

Ketidaksetujuan Parlemen Belanda akan hasil Linggar Jati membuat kemacetan dalam hubungan Indonesia dan Belanda. Pemerintahan Belanda menekan Republik Indonesia dengan memberikan usul-usul baru untuk menjembatani kembali hubungan dengan Indonesia, tetapi usul-usul tersebut kebanyakan merugikan pihak Republik Indonesia. Sjahrir menanggapi niat Belanda untuk membuka kembali hubungan dengan Republik dengan cara memberikan usul-usul balasan kepada Belanda tetapi saran Sjahrir membuat Belanda semakin marah kepada Republik.

Keadaan tersebut membuat partai-partai tidak puas pada Kabinet Sjahrir sehingga Kabinet Sjahrir jatuh untuk ke tiga kalinya.

Kabinet Amir Sjarifudin menggantikan Kabinet Sjahrir, dalam Kabinetnya Ia juga menggunakan cara diplomasi untuk bekerjasama dengan Belanda. Pada awal berfungsinya Kabinet tidak berjalan dengan lancar sebab Belanda tidak menyetujui usul-usul yang diberikan oleh Amir Sjarifudin, Belanda juga menuduh bahwa pihak Republik tidak mau menaati perjanjian Linggar Jati. Ketidak puasan Belanda akan hal tersebut mengakibatkan pada tanggal 21 Juli 1947 Belanda melakukan Agresi Militernya yang pertama dengan cara melakukan penyerangan dengan tujuan menghilangkan wilayah Republik Indonesia dari peta dunia. Usaha Belanda untuk menghapuskan wilayah Republik tidak berhasil sebab Republik Indonesia sudah diakui secara de Fakto oleh beberapa Negara. Setelah Belanda melakukan penyerangan maka dimulailah babak baru dalam perjuangan Indonesia, perjuangan kali ini kembali untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Tanggapan Dunia terhadap tindakan Belanda menyerang Republik Indonesia menimbulkan reaksi beberapa negara menentang tindakan Belanda. Inggris dan AS sebenarnya tidak setuju atas tindakan Belanda menyerang Republik Indonesia tetapi mereka ragu-ragu untuk turun tangan membantu Republik, karena Inggris dan AS menganggap urusan Republik Indonesia adalah urusan Belanda jadi mereka tidak turut campur dalam masalah Indonesia. Reaksi dari beberapa negara lain diantaranya: Rusia, Cina, India, Polandia dan Australia mengecam tindakan Belanda, mereka mengusulkan supaya masalah Indonesia diajukan ke DK-PBB. India sangat membela

Indonesia dengan berpegang pada pasal 34 yaitu yang menyebutkan tentang pemeliharaan perdamaian dan keamanan dunia. Sedangkan Australia mendasarkan atas pasal 39 yang menyebutkan tentang adanya ancaman terhadap perdamaian dunia.

Desakan India dan Australia untuk membawa masalah Indonesia ke DK-PBB sangatlah kuat, maka AS mengusulkan kompromi untuk mendesak Belanda dan Republik Indonesia supaya menghentikan permusuhan dan menyelesaikan persengketaan dengan cara arbitrase, usulan AS tersebut kemudian diterima oleh DK-PBB. Masalah Indonesia akhirnya dibawa ke dalam sidang DK-PBB, DK-PBB mengeluarkan keputusan untuk membentuk suatu *Committee Of Good Offices* atau komisi Jasa-jasa Baik yang di kenal dengan nama KTN (Komisi Tiga Negara). Atas dasar keputusan tersebut maka Belanda memilih Belgia dan Republik Indonesia memilih Australia yang kemudian Belgia dan Australia memilih AS sebagai negara ke tiga.

KTN akhirnya berhasil menghubungkan Indonesia dan Belanda untuk menyelesaikan persengketaan dengan cara berunding. Perundingan dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 1947 diatas kapal Renville milik AS dimana nantinya perundingan dikenal dengan nama Perjanjian Renville. Pada awal perundingan tidaklah berjalan lancar karena seringnya tawar menawar antara kedua belah pihak menimbulkan kemacetan dalam perundingan. Guna memecahkan masalah ini maka KTN mengajukan usul yang kemudian usul tersebut terkenal sebagai "Pesan Natal" (*Christmas Massage*) karena disampaikannya kepada kedua belah pihak pada tanggal

26 Desember 1947.⁵⁸ Usul KTN cenderung berpihak pada Belanda yang menghendaki perdamaian dengan diterimanya garis Van Mook dalam catatan waktu tidak kurang dari tiga bulan, Belanda akan menarik tentaranya ketempat kedudukan sebelum 21 Juli 1947 dan Pemerintah Republik akan difungsikan kembali sesudah penarikan.⁵⁹ Walaupun keputusan tersebut telah menguntungkan Belanda tetapi Belanda tetap tidak puas dengan hasil tersebut, maka Belanda mengajukan usul 12 pasal yang isinya sangat merugikan kedudukan Indonesia. Pihak Republik menolak usul tersebut tetapi setelah KTN menawarkan enam pasal tambahan yang memberikan jaminan pada Republik Indonesia untuk menentukan nasib sendiri maka RI maumenerima usul tersebut, dengan adanya kekuatiran Republik Indonesia kehilangan kekuasaan Graham memberikan jawaban singkat yang dikenal dengan “*You Are What You Are*” yang diartikan bahwa Republik Indonesia tetap berstatus sebagai sediakala.⁶⁰ Pada tanggal 17 Januari 1948 ditandatangani perjanjian Renville oleh pihak Republik Indonesia dan Belanda yang disaksikan oleh KTN.

Hasil persetujuan Renville banyak ditentang dan tidak mendapat dukungan dari beberapa partai yang mengakibatkan Kabinet Amir Sjarifudin harus mengembalikan mandat. Untuk mengatasi masalah tersebut Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia menunjuk Mohammad Hatta untuk membentuk Kabinet guna menjalankan tugas melaksanakan perjanjian Renville.

⁵⁸ Ali Sastroamidjojo. *Tonggak-tonggak di Perjalananku*. Kinta: Jakarta, 1974, hlm. 219.

⁵⁹ G. Moedjanto. Jilid II, *op.cit.*, hlm. 20.

⁶⁰ Ali Sastroamidjojo. *op. cit.*, hlm. 220.

D. Pelaksanaan Perjanjian Renville

Perjanjian Renville yang telah ditandatangani Amir Sjarifudin dilaksanakan oleh Kabinet Mohammad Hatta, sebab setelah penandatanganan Perjanjian Renville Amir Sjarifudin mengundurkan diri dan mengembalikan mandat pada Presiden Soekarno. Dalam keadaan yang sulit ini Presiden Soekarno mengutus Mohammad Hatta untuk membentuk Kabinet guna melaksanakan hasil perjanjian Renville. Dipilihnya Mohammad Hatta untuk melaksanakan hasil perjanjian Renville karena dalam situasi seperti ini diperlukan suatu pemimpin yang kuat dan tegas memimpin pemerintahan Republik Indonesia.

Hasil perjanjian Renville sangat merugikan kedudukan Republik Indonesia, karena dalam persetujuan Renville nantinya Republik Indonesia hanya akan menjadi negara bagian dari suatu Negara Indonesia Serikat yang akan dibentuk, Negara Indonesia serikat akan turut dalam suatu Uni dengan Belanda yang dikepalai oleh Ratu Belanda. Hal yang sangat mengecewakan Republik Indonesia adalah disetujuinya garis Van Mook yang mengakibatkan wilayah Republik menjadi semakin sempit. Garis Van Mook adalah suatu garis batas wilayah kedudukan Belanda dan Republik Indonesia yang dibuat oleh Van Mook sendiri tanpa berunding terlebih dahulu dengan Republik Indonesia.

Presiden Soekarno menyarankan Mohammad Hatta untuk merangkap Jabatan sebagai Wakil Presiden dan Perdana Menteri sebab dalam situasi seperti ini hanya Mohammad Hattalah yang cocok dan bisa mengatasi situasi yang serbas sulit. Dalam menjalankan hasil perjanjian Renville diperlukan orang yang dapat dipercaya di

dalam Negri maupun di Luar Negri. Dalam Negri Mohammad Hatta diyakini bisa memulihkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah dan bisa memulihkan kepercayaan Tentara kembali, sedangkan di Luar Negri Mohammad Hatta harus bisa memulihkan kepercayaan dari Negara Lain terutama Belanda guna meneruskan perundingan.

Mohammad Hatta dalam membentuk Kabinetnya melibatkan semua partai kecuali Fron Demokrasi Rakyat (FDR). FDR sebenarnya juga diajak dalam pembentukan Kabinet tetapi mereka terlalu banyak menuntut kursi yang harus diduduki oleh FDR dalam Kabinet yang di pimpin oleh Hatta. Mula-mula mereka menuntut 10 kursi dalam Kabinet. Mohammad Hatta tidak menyetujui usulan tersebut Mohammad Hatta hanya menawarkan satu kursi untuk FDR yang akan diduduki oleh Amir Sjarifudin atau tidak ada sama sekali wakil dari FDR, pihak FDR tetap menuntut sebagian kursi Kabinet sehingga mengakibatkan FDR tidak ikut dalam Kabinet Mohammad Hatta. Mohammad Hatta dalam menjalankan Kabinet mempunyai empat program pokok yaitu:

1. Meneruskan perundingan-perundingan dengan pemerintahan Belanda atas dasar persetujuan Renville.
2. Menyegarkan pembentukan Negara Indonesia Serikat.
3. Rasionalisasi dan rekonstruksi angkatan perang dan Pegawai Negri.
4. Pembangunan.⁶¹

⁶¹ Ide Anak Agung Gde Agung, *Renville*, Sinar Harapan: Jakarta, 1983, hlm. 79.

Pokok-pokok terpenting dalam program Kabinet Mohammad Hatta ialah: melanjutkan perundinga-perundingan atas dasar hasil persetujuan Renville dan langkah-langkah menuju kepembentukan segera Negara Indonesia Serikat.

Perundingan telah dimulai kembali berdasarkan hasil persetujuan Renville, pelaksanaan perundingan terlebih dahulu adanya persetujuan gencatan senjata diantara kedua belah pihak. Tentara Nasional Indonesia (TNI) hijrah dari kantong-kantong Militer yang telah dikuasai Belanda dapat berjalan lancar terutama pasukan Siliwangi dari Jawa Barat yang Hijrah ke daerah Republik Indonesia. Van Vreeden wakil Delegasi Belanda menyatakan adanya pelanggaran gencatan senjata berkenaan dengan adanya aksi kontak senjata yang dilakukan oleh orang-orang daerah yang dikuasai Belanda. Roem wakil dari Republik Indonesia menyatakan bahwa hijrah telah dilaksanakan maka kontak senjata yang dilakukan orang-orang daerah pengawasan Belanda bukan tanggung jawab Republik Indonesia. Komisi Jasa-jasa baik mengusulkan supaya dalam perundingan kali ini jangan membahas tentang pelanggaran gencatan senjata tetapi perundingan harus berdasar pada persetujuan Renville.

Perundingan kembali dilakukan atas dasar hasil persetujuan Renville. Delegasi Belanda bertolak dari pendiriannya bahwa tercapainya suatu persetujuan tentang masuknya Pemerintahan Republik dan semua lembaganya kedalam pemerintahan Federal Sementara Indonesia harus sesuai dengan persetujuan Renville. Kedaulatan dan tanggung Jawab atas seluruh Hindia Belanda selama masa peralihan

sampai terbentuknya Uni Indonesia-Belanda dan terbentuknya Negara Indonesia Serikat ada di tangan Pemerintahan Belanda. Selanjutnya harus dicapai pula kesepakatan tentang struktur Uni Indonesia-Belanda dan bentuk Negara Indonesia Serikat ditambah ekonomi keuangan Indonesia-Belanda dan kerjasama di bidang pertahanan juga hubungan Luar Negri.

Delegasi Indonesia tidak setuju pendapat Belanda tentang penderitaan mereka. Republik berpendapat bahwa RI mengakui kedaulatan Kerajaan Belanda atas seluruh Hindia-Belanda selama masa peralihan. Harus diakui bahwa Republik telah berdiri sebagai negara oleh sebab itu Republik berhak untuk memelihara hubungan dengan Luar Negri dan mempunyai Tentara sendiri. Delegasi Republik berpendapat tentang hubungan-hubungan dengan Luar Negri dan adanya Tentara Republik Indonesia dapat dipertahankan selama masa peralihan sampai Negara Indonesia Serikat yang berdaulat telah terbentuk.⁶²

Jalanya perundingan yang telah dilakukan tidak berjalan dengan lancar sebab banyak perbedaan-perbedaan pendapat antara kedua belah pihak. Masalah yang tidak bisa diselesaikan adalah tentang kedudukan Republik Indonesia dan Belanda pada masa Peralihan, masalah Tentara Republik dan masalah hubungan Luar Negri. Dengan adanya masalah-masalah yang sulit dipecahkan membuat hubungan Republik Indonesia dan Belanda mengalami ketegangan yang mengakibatkan kembali Perundingan terhenti kembali.

⁶² *Ibid.* hlm. 88.

Pihak KTN berusaha keras menjembatani kembali hubungan Belanda dan Republik Indonesia supaya masalah-masalah yang ada dapat terselesaikan. Sebelum terselenggaranya perundingan antara Belanda dan Republik ada suatu usulan dari wakil KTN yang berasal dari Amerika Serikat dan Australia mengajukan suatu usul yang dikenal dengan Pland Du Bois Critchley. Usul Du Bois Critchley diberikan kepada kedua belah pihak supaya mereka dapat mempelajari terlebih dahulu usul yang akan menjadi arah pembicaraan diantara kedua negara. Belanda sangat menentang usul Du Bois Critchley tersebut sebab usulan tersebut berbeda dengan rencana yang telah dibuat oleh Pemerintah Belanda, sehingga Belanda berusaha keras menggagalkan rencana KTN tersebut. Sedangkan pihak Indonesia setuju dengan usul pihak KTN tersebut, karena usul KTN tersebut menguntungkan pihak Republik Indonesia.

Usul Du Bois Critchley berisikan tentang diadakannya suatu pemilihan umum Konstituante dalam waktu tiga bulan setelah tercapainya persetujuan politik antara Republik Indonesia dan kerajaan Belanda, yang diawasi dibawah tanggung jawab suatu komisi yang keanggotaannya berimbang. Selain itu Du Bois Critchley mengusulkan supaya selama pemilihan umum hubungan Luar Negeri diserahkan kepada Pemerintahan Federal dan angkatan Perang Republik secara keseluruhan akan ditampung. Belanda tidak setuju dengan usulan tersebut sebab Belanda berencana mendirikan Pemerintahan Federal terlebih dahulu baru diadakan pemilihan umum untuk Konstituante. Belanda bersikeras dalam masa peralihan semua wewenang Federal akan dijalankan oleh Gubernur Jendral dan Hubungan Luar Negeri

ditanganinya juga, sedangkan tentang masalah Tentara Republik Indonesia Belanda menghendaki supaya Tentara di Bubarkan. Adanya perbedaan tersebut maka pihak Belanda menolak usul Du Bois Critchley dengan cara halus yaitu melaporkan pada Komisi Jasa-jasa Baik agar tindakan Du Bois Critchley dilaporkan kepada Dewan Keamanan. Adanya laporan tentang usulan Du Bois Critchley kepada komisi Jasa-jasa Baik mengakibatkan Du Bois ditarik oleh Pemerintah Amerika dari Indonesia. Dengan kejadian tersebut maka hubungan Republik Indonesia dan Belanda kembali terputus.

Suatu perundingan baru bisa dilakukan lagi dengan adanya kedatangan Menteri Luar Negri Belanda yang datang ke Indonesia yaitu Mr. Stikker. Stikker datang ke Yogyakarta berhasil meyakinkan Mohammad Hatta untuk memulai lagi perundingan. Pelaksanaan perundingan dilakukan tiga jam sehari selama tiga hari, yang menjadi pokok pembicaraan menyangkut dua hal yaitu: Pertama soal kedudukan TNI, Belanda menghendaki TNI dibubarkan tetapi Mohammad Hatta menyatakan kalau TNI tidak bisa dibubarkan karena TNI sudah berjuang bersama rakyat begitu lama maka TNI tidak bisa dibubarkan. Kedua tentang pembentukan Negara Federal dipercepat sebagai pendahuluan pembentukan Negara Indonesia Serikat.⁶³ Mr. Stikker sudah merencanakan orang Indonesia yang akan dijadikan Menteri diantaranya adalah: Abdul Malik dan Wali Negara Sumatra Selatan., Mohammad Hatta tidak setuju dengan Orang-orang yang telah dipilih Belanda sebab mereka

⁶³ Mohammad Hatta, *op.cit.*, hlm. 537.

dianggap orang kedua dalam kepemimpinan masyarakat maka Mohammad Hatta mengusulkan supaya rakyat diberi kesempatan untuk memilih sendiri wakilnya. Berakhirnya Pertemuan Mr. Stikker dengan Mohammad Hatta maka pembicaraan terhenti terlebih dahulu karena Mr. Stikker akan ke Jakarta terlebih dahulu baru nantinya akan kembali ke Yogyakarta untuk meneruskan perundingan.

Kedatangan Mr. Stikker ke Yogyakarta tidak sendiri ia datang bersama Mr. Sanssen untuk berunding kembali. Dalam perundingan kali ini Mr. Stikker tidak banyak bicara yang berbicara adalah Sanssen, Sanssen tetap berpendirian dengan pendapat Pemerintahan Belanda yaitu TNI tetap harus dihilangkan ketentaraannya dan dijadikan Gendarmari saja,⁶⁴ pendapat Sanssen menyebabkan pembicaraan terhenti kembali.

Mr. Stikker kembali ke Jakarta tetapi sebelumnya ia berpesan pada Mohammad Hatta untuk menemuinya di Jakarta. Satu minggu setelah pembicaraan terhenti Mohammad Hatta menemui Sanssen untuk mencoba membuka kebuntuan, ternyata pembicaraan tetap sama dan tidak menghasilkan apapun. Sebelum pulang Mohammad Hatta bertanya pada Sanssen "Apakah benar akan membangun Negara Federal dengan negara-negara BFO tanpa membawa serta Republik Indonesia?". Sanssen menjawab pemerintah Belanda tidak bermaksud seperti itu.⁶⁵ Pembicaraan yang menemui jalan buntu mengakibatkan terputusnya kembali pembicaraan antara Indonesia dan Belanda.

⁶⁴ *Ibid.* hlm. 538.

⁶⁵ *Ibid.* hlm. 538.

E. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia

Sebelum membicarakan Agresi Belanda kedua akan dibicarakan terlebih dahulu adanya pemberontakan Partai Komunis Indonesia yang terjadi selama berlangsungnya pembicaraan antara Belanda dan Republik Indonesia. Pemberontakan PKI dibahas terlebih dahulu karena dengan keberhasilan Republik Indonesia menangani pemberontakan PKI menyebabkan banyak Negara-negara Luar yang bersimpatik kepada Republik Indonesia.

Pada awal pembentukan Kabinet Mohammad Hatta akan mengikutsertakan semua partai tidak terlupakan FDR juga diberi kursi. FDR yang dipimpin oleh Amir Sjarifudin, pada awalnya Mohammad Hatta menawarkan tiga kursi kepada pihak FDR tetapi mereka menuntut 10 kursi dan meminta jabatan Menteri Pertahanan. Mohammad Hatta tidak setuju dengan usul tersebut maka Hatta menawarkan satu kursi yang akan diduduki oleh Amir Sjarifudin atau tidak ada wakil sama sekali untuk FDR, pihak FDR tetap menuntut sebagian kursi Kabinet oleh sebab itu Mohammad Hatta memutuskan untuk tidak mengikut sertakan FDR dalam Kabinetnya.

Amir Sjarifudin sangat kecewa dengan keputusan Mohammad Hatta untuk tidak mengikut sertakan FDR dalam Kabinetnya. Dengan adanya peristiwa tersebut FDR berusaha menandingi Kabinet yang dibentuk Mohammad Hatta, Amir Sjarifudin kemudian membentuk Kabinet dan menyusun program Nasionalnya. Program Nasionalnya terdiri atas empat pasal yaitu:

1. Pembatalan Persetujuan Renville.

2. Penghentian Perundingan dengan Belanda sampai mereka menarik diri dari Bumi Indonesia.
3. Nasionalisasi semua kekayaan Belanda tanpa memberikan ganti rugi.
4. Pembubaran Kabinet Presidensial Hatta dan pembentukan Kabinet Parlementer dimana Wakil-wakil FDR diikutsertakan dengan menduduki kursi-kursi yang penting.⁶⁶

Mohammad Hatta setuju dengan Program Nasional yang diusulkan oleh FDR tetapi ia tidak setuju dengan Program yang ke empat karena Mohammad Hatta sudah mengambil keputusan untuk tidak mengikutsertakan FDR maka penggantian Kabinet tidak diperlukan.

Kegagalan Program FDR membawa kekecewaan tetapi kekecewaan itu tidak berlangsung lama, karena Suripno yang dituntut Amir Sjarifudin untuk menjalin hubungan dengan Soviet pulang dengan membawa Muso. Kedatangan Muso kembali ke Republik Indonesia diharapkan bisa memberi semangat perjuangan terhadap anggota Sosialis sayap kiri harapan ini datang dari pihak FDR. Tujuan Muso sendiri pilang untuk menyebarkan paham Komunis dan akan mendirikan negara komunis di Indonesia.

Kedatangan Muso disambut gembira oleh penganut komunis, banyak anggota FDR yang kemudian menggabungkan diri dengan PKI Amir Sjarifudin pun ikut bergabung dengan kepemimpinan Muso. PKI sangat berusaha keras menggulingkan

⁶⁶ G. Moedjanto, *op. cit.*, hlm. 31.

pemerintahan Republik dan menghancurkan Kabinet Mohammad Hatta. PKI berusaha melancarkan isu sosial dan mengatakan bahwa Mohammad Hatta akan menjual Republik Indonesia kepada pihak Amerika, isu-isu itu dilancarkan guna mempengaruhi rakyat supaya berpihak pada mereka. Tindakan PKI tidak hanya itu saja tetapi juga melakukan penculikan-penculikan terhadap anggota TNI supaya situasi Republik menjadi keruh.

Pada tanggal 18 September 1948 PKI melakukan Coup (perebutan kekuasaan) dengan cara memproklamasikan pemerintahan Soviet di Madiun. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden juga sebagai Perdana Menteri sekaligus sebagai Menteri pertahanan bertindak cepat mengatasi masalah, Mohammad Hatta mengutus pasukan TNI supaya menghancurkan kekuatan PKI yang telah melakukan Coup. Pada tanggal 19 September Soekarno berpidato lewat radio Ia mengatakan PKI akan menggulingkan pemerintahan Republik Indonesia dan akan mendirikan negara komunis di Indonesia, Soekarno kemudian memberikan pilihan kepada rakyat untuk memilih Soekarno dan Mohammad Hatta atau ikut Muso dengan PKInya. Muso kemudian menjawab lewat radio Ia mengajak rakyat supaya menggulingkan pemerintahan Soekarno dan Mohammad Hatta.⁶⁷

Kepemimpinan Mohammad Hatta mengajak rakyat untuk bekerja mendukung dan membantu pemerintah menumpas pemberontakan komunis. Pasukan TNI berusaha keras mematahkan pemberontakan PKI dengan cara menangkap

⁶⁷ Mavis Rose, *op. cit.*, hlm. 257.

pemimpin-pemimpin PKI dan menghancurkan pengikut-pengikutnya. Pidato Muso yang terang-terangan ingin menggulingkan pemerintahan yang dipimpin Soekarno-Mohammad Hatta membuat beberapa pengikut PKI sadar kalau mereka telah membuat kekeliruan, hal ini membuktikan prestis pemerintahan Soekarno-Mohammad Hatta lebih tinggi dibanding Muso. Akhirnya pemberontakan PKI berhasil digagalkan dan dihancurkan karena adanya kerjasama antara TNI dan rakyat. Banyak pemimpin-pemimpin PKI yang berhasil ditangkap bahkan Muso sebagai pemimpin PKI terbunuh karena tertembak peluru TNI sewaktu berusaha melarikan diri. Pada tanggal 20 September BP KNIP mengadakan sidang, dalam sidang Mohammad Hatta memberikan kekuasaan penuh kepada Presiden Soekarno selama tiga bulan guna menjaga keselamatan Negara.⁶⁸

Pada waktu terjadi pemberontakan PKI Van Mook menawarkan bantuan pada Republik Indonesia dalam menghadapi PKI. Mohammad Hatta secara tegas menolak bantuan Belanda, Mohammad Hatta menyatakan pemberontakan PKI adalah urusan dalam negeri Republik dan dengan pasti dapat ditangani. Keberhasilan Mohammad Hatta menghancurkan pemberontakan PKI menyebabkan bertambah kuatnya kedudukan Republik di dalam perjuangan diplomasi Internasional. Amerika makin tertarik untuk membantu dan membela Republik Indonesia.⁶⁹

F. Agresi Militer Belanda ke II

⁶⁸ Deliar Noer, *op.cit.*, hlm. 331.

⁶⁹ G. Moedjanto, *op. cit.*, hlm. 40.

Mohammad Hatta tidak sempat untuk beristirahat setelah berhasil menumpas pemberontakan PKI karena Mohammad Hatta merasa Belanda akan segera melakukan penyerangan lagi ke wilayah Republik Indonesia. Pembicaraan antara Mohammad Hatta dengan Stikker dan Sanssen mengalami kegagalan di karenakan Belanda ingin kekuasaan Komisaris Tinggi selama masa peralihan tetap bisa menggerakkan pasukan di daerah Republik, Mohammad Hatta menolak hal itu sebab ia berpendapat Belanda nantinya pasti akan ikut campur dalam pemerintahan Republik Indonesia. Dengan adanya keputusan tersebut menyatakan bahwa pembicaraan ini tidak bisa dilanjutkan kembali, maka Belanda akan mendirikan pemerintahan Fedral tanpa mengikut sertakan Republik Indonesia.

Adanya berita tentang rencana Belanda akan melakukan Agresi Militer lagi maka Cochran mengusulkan pada Mohammad Hatta untuk membuka kembali perundingan dengan Belanda. Pada tanggal 13 Desember 1948 Mohammad Hatta membuat surat untuk delegasi Belanda supaya perundingan bisa dibuka kembali "Ia menyatakan RI bersedia mengakui kedaulatan Belanda selama masa peralihan".⁷⁰ Pada hari yang sama Menteri Sanssen mengirim telegram kepada Beel dengan adanya keputusan dari Pemerintah Belanda untuk melancarkan aksi Militer secara total. Surat Mohammad Hatta tersebut membuat kedudukan pemerintahan Belanda di Indonesia menjadi sulit karena itu surat Mohammad Hatta kemudian dikirimkan kepada Pemerintahan di Belanda supaya diputuskan dalam Kabinet.

⁷⁰ *Ibid.* hlm. 29.

Tanggal 17 Desember Mohammad Hatta menerima jawaban Belanda lewat Cochran yang berisi tentang desakan Belanda supaya pihak Republik menerima seluruh tuntutan Belanda sebelum pukul 10 pagi.⁷¹ Waktu yang diberikan Belanda untuk menjawab tuntutannya begitu sempit sehingga Mohammad Hatta mengambil keputusan untuk tidak menjawab surat tersebut. Tanggal 18 Desember Cochran menerima sebuah nota yang menyatakan Belanda menyatakan membatalkan perjanjian Renville, hubungan komunikasi antara Jakarta dengan Yogyakarta telah terputus sehingga Cochran tidak bisa memberitahukan keputusan Belanda tersebut kepada Republik dan anggota KTN yang sedang berada di Yogyakarta.

Aksi Militer ke II dilakukan oleh Belanda pada tanggal 19 Desember dengan cara menyerang Pemerintahan Republik Indonesia. Pada waktu itu Mohammad Hatta beserta beberapa anggota KTN sedang berada di Kaliurang, dari Kaliurang dapat terlihat jelas kapal udara Belanda sedang menjatuhkan bom-bom di Maguwo dan mendaratkan pasukan terjun payungnya. Mohammad Hatta menyatakan pada Critcley "Tuan telah melihat sendiri perbuatan Belanda, mula-mula mengulur-ulur waktu perundingan, sesudah itu dijalankan aksi Militer ke II."⁷² Mohammad Hatta segera kembali ke Yogyakarta untuk membicarakan tindakan apa yang akan dilakukan selanjutnya.

Ditengah perjalanann ke Yogyakarta Mohammad Hatta bertemu Hamengku Buwono IX yang hendak menjemput Mohammad Hatta di Kaliurang. Sesampainya di

⁷¹ Mavis Rose, *op. cit.*, hlm. 263.

⁷² Mohammad Hatta, *op. cit.*, hlm. 540.

ke Presidennan Mohammad Hatta mengutus Arifin untuk memberikan surat pada Yunus Seorang Wakil India di Yogyakarta, dalam surat tersebut mengatakan bahwa Belanda telah melakukan aksi Militernya yang ke II. Sesampainya Mohammad Hatta di ke Presidennan telah berkumpul beberapa Menteri dan Presiden Soekarno untuk melakukan sidang, dalam sidang itu menghasilkan:

1. Presiden dan Wakil Presiden serta para Mentri yang bersidang itu tetap berada di Yogyakarta.
2. Menteri kemakmuran Sjafruddin Prawiranegara yang sedang berada di Sumatra di beri mandat untuk membentuk Pemerintahan Republik darurat di Sumatra dan bila tidak berhasil untuk memberikan kuasa kepada Sudarsono, L.N. Palar dan A.A Maramis untuk membentuk pemerintahan Indonesia di India.⁷³

Menurut Mohammad Hatta Pertimbangan supaya Presiden dan Wakil Presiden tetap berada di Yogyakarta tidak ikut bergerilya adalah: tidak cukup banyak pasukan tentara yang masih berada di kota untuk melindungi mereka dalam pelarian dan akan lebih menguntungkan dilihat dari sudut pandang laporan Komite Jasa-jasa Baik kepada PBB, karena mereka akan dianggap sebagai korban Agresi Militer Belanda ke II. Pasukan TNI sebenarnya sudah pergi terlebih dahulu dari Yogyakarta sebelum Belanda melakukan Agresi Militer Belanda ke II, TNI bukannya takut pada Belanda melainkan untuk berlatih perang sebab sebelum terjadinya agresi militer Presiden

⁷³ Deliar Noer, *op. cit.*, hlm. 339.

Soekarno telah memperingatkan terlebih dahulu pada Tentara dan rakyat supaya tetap waspada karena Negara sedang dalam keadaan genting. Beberapa pasukan TNI yang tetap tinggal di Yogyakarta tidak bisa mengatasi serangan-serangan Belanda, jumlah tentara yang tidak memadai mengakibatkan Yogyakarta dapat dengan mudah diduduki oleh tentara Belanda.

Pendapat Mohammad Hatta untuk tetap berada di Yogyakarta di dasarkan pada suatu pertimbangan, apabila para pejabat tetap berada di Yogyakarta Belanda pasti akan lebih menghadapi kesukaran selain itu pihak KTN telah turut campur dalam menyelesaikan persengketaan antara Republik Indonesia dan Belanda. Anggota KTN telah melihat sendiri kecurangan-kecurangan yang telah dilakukan Belanda untuk menghancurkan Republik, terjadinya peristiwa agresi Belanda ke II membuat anggota Jasa-jasa Baik mendesak PBB untuk membawa masalah Belanda dan Republik Indonesia ke dalam sidang Dewan.

Adanya peristiwa Agresi tersebut membuat Negara-negara Luar semakin bersimpati terhadap perjuangan yang dilakukan oleh Republik Indonesia, adanya dukungan dan simpati dari Luar Negri memberikan keyakinan pada pihak Republik untuk terus berjuang karena mereka tidak akan mudah dihapus dari Peta Dunia. Negara yang paling mendukung perjuangan Republik Indonesia adalah India dengan cara melancarkan protes-protesnya pada Dunia Barat melalui Konfrensi-konfrensi, selain itu Australia dan Amerika berusaha keras membawa masalah Indonesia dalam sidang PBB, kedua negara tersebut melakukan aksi protes dengan cara melarang semua kapal udara dan laut milik Belanda singgah di negara mereka. Pemerintahan

AS mengecam tindakan Belanda, AS mengambil keputusan untuk melakukan penghentian bantuan Marsshal bagi Belanda sebab ada informasi bahwa bantuan Marsshal yang diterima Belanda digunakan untuk membeli senjata untuk menyerang Republik, karena itu Pemerintah AS kemudian menghentikan bantuan Marsshal.

Keyakinan Belanda mendirikan suatu negara Federasi tanpa Republik Indonesia gagal, kegagalan tersebut disebabkan ada dua negara bagian Federal yang sangat kuat akan mengundurkan diri dari pembentukan negara Federal. Parlemen Indonesia Timur mengundurkan diri karena Belanda telah melakukan Agresi Militer ke II yang berarti telah melanggar politik luar daerah Indonesia Timur, hal tersebut menyebabkan program Kabinet tidak berhasil dilakukan sehingga Kabinet mengubdurkan diri. Pengunduran diri Ide Anak Agung dari Kabinet mengakibatkan perundingan terhenti sampai terbentuknya Kabinet baru. Sedangkan pemerintah negara bagian Pasundan mengundurkan diri karena Belanda melanggar janjinya untuk menyelesaikan masalah Republik Indonesia dengan cara damai tidak terbukti, maka Kabinet Pasundan mengundurkan diri dalam pembentukan protes Kabinet Pasundan terhadap tindakan Belanda pada Republik Indonesia.

Belanda merasa berhasil melakukan Agresi ke II menyerang wilayah Republik Indonesia karena tidak ada perlawanan berarti yang telah dilakukan Tentara Indonesia di Yogyakarta. Mayor Jendral Meyer merupakan panglima Belanda di Jawa meminta pada Presiden Soekarno untuk mengumumkan gencatan senjata, Presiden Soekarno dengan tegas menolak permintaan tersebut. Pada tanggal 22 Desember Presiden Soekarno, Sultan Sjahrir dan Haji Agus Salim dibawa oleh Belanda ke Berastagi

sedangkan Mohammad Hatta, Asat dan Abdul Gafar Pringgodikdo di bawa ke Menumbing (di pegunungan dekat Muntok, Bangka),⁷⁴ tidak lama kemudian Roem dan Ali Sastroamidjojo ditahan juga di Menumbing. Cara Belanda dalam menangani tahanan politik tidaklah berubah dari dulu sampai sekarang sebab mereka selalu menggunakan cara mengasingkan para tahanan agar para tahanan tidak bisa bergerak dan melakukan perjuangan politiknya.

Adanya penangkapan para pemimpin Pemerintahan Republik Indonesia membuktikan Belanda selalu melanggar hasil-hasil perundingan antara Belanda dan Indonesia. Mohammad Hatta gagal menjalankan perjanjian Renville juga gagal dalam usahanya berunding dengan Belanda karena Belanda terlalu menekan pihak Indonesia dan terlalu banyak permintaan yang harus dipenuhi oleh Indonesia. Kegagalan tersebut dapat kita lihat jelas adanya Agresi Belanda II dan penangkapan juga disertai pengasingan kepada para pemimpin Republik Indonesia.

Walaupun para pemimpin Indonesia telah ditahan Belanda Sjafruddin berhasil membentuk suatu pemerintahan darurat di Sumatra. Perjuangan pemerintahan Republik darurat pada akhirnya nanti berhasil membawa masalah tentang Indonesia ke Dewan Keamanan yang pada akhirnya dibawa ke dalam sidang PBB. Penahanan para pemimpin pemerintahan Republik Indonesia semakin mengobarkan semangat perjuangan dan kesadaran rakyat pentingnya persatuan dalam berjuang melawan Belanda.

⁷⁴ Ide Anak Agung Gde Agung, Renville, *op. cit.*, hlm.97.

Kemanunggalan Rakyat dan TNI semakin membuka mata dunia terutama pihak Belanda bahwa Republik tidak mudah untuk dihapuskan dari peta dunia. Pemerintahan Belanda yang berusaha menunjukkan kepada PBB kalau masalah Indonesia adalah masalah Interen Belanda saja ternyata gagal. Belanda dalam Agresi ke II hanya bisa menguasai daerah kota-kota Republik saja, sedangkan Republik mempunyai kekuatan besar di wilayah desa-desa. Perjuangan TNI yang dilakukan secara bergerilya didukung sepenuhnya oleh rakyat, perjuangan TNI tersebut pada akhirnya dapat menunjukkan pada dunia bahwa Republik masih ada. Sri Sultan Hamengku Buwono ke IX berhasil menunjukkan pada PBB bahwa Republik Indonesia masih ada dan TNI masih kuat, terbukti dengan adanya serangan umum 1 Maret karena TNI berhasil menduduki kota Yoyakarta walau hanya enam jam. Adanya kejadian tersebut semakin mendukung perjuangan lewat diplomasi di depan sidang DK-PBB berhasil menarik perhatian Dunia tentang masalah Republik Indonesia.

BAB IV
SIKAP DAN TINDAKAN MOHAMMAD HATTA
DALAM KABINETNYA TH 1948-1949

Penangkapan dan pengasingan para pemimpin Pemerintahan Republik Indonesia tidak membuat patah semangat untuk terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia berhasil didirikan oleh Sjafrudin Prawiranegara di Sumatra, sedangkan Tentara Republik Indonesia terus berjuang dengan cara bergerilya. Perang gerilya di Yogyakarta dipimpin oleh Jendral Sudirman yang didukung sepenuhnya oleh rakyat dengan cara memberikan tempat sebagai posko dan bantuan makanan disetiap desa yang ditinggali atau dilewati para gerilyawan. Agresi Militer Belanda ke II tidak sepenuhnya menghancurkan Republik Indonesia sebab hanya pemimpin-pemimpin pemerintahan yang ditangkap tetapi rakyat dan TNI masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Para pemimpin pemerintahan dalam pembuangan tidak pernah menyerah kepada Belanda, mereka tetap berusaha mempertahankan Kemerdekaan Indonesia walaupun tidak secara langsung. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia berusaha keras membawa masalah Indonesia keinternasional, perjuangan itu akhirnya berhasil sebab masalah Indonesia kemudian dibicarakan dalam Konferensi Asia yang diselenggarakan di New Delhi dan bersama India membawa masalah Indonesia ke

sidang PBB. Masalah pertikaian antara Indonesia dan Belanda akhirnya dibicarakan dalam sidang PBB walaupun Belanda berusaha keras supaya masalah Indonesia tidak diangkat dalam pembicaraan sidang, Belanda mengatakan bahwa masalah Indonesia hanyalah masalah interen saja tetapi pembelaan Belanda itu gagal karena pihak KTN telah melaporkan kecurangan-kecurangan yang dilakukan Belanda kepada Republik Indonesia.

Belanda mengalami banyak tekanan yang memojokkan kedudukannya dalam sidang PBB karena telah melakukan Agresi Militer ke II. Pihak Amerika yang tadinya condong membantu Belanda, sekarang berbalik mendukung perjuangan Republik Indonesia dengan cara menghentikan bantuan Marshall sebab Belanda telah menyalahgunakan uang tersebut selain itu Amerika juga mengusulkan kepada PBB supaya KTN berubah menjadi badan PBB yang bernama UNCI (*United Nations Commission for Indonesia*). Pada tanggal 28 Januari Dewan Keamanan PBB menghendaki supaya perundingan antara Indonesia dan Belanda dibuka kembali, tetapi terlebih dahulu menghentikan peperangan yang muncul sebagai akibat aksi militer Belanda, dan melepaskan semua tahanan politik agar pemerintah Republik kembali ke Yogyakarta.⁷⁵ Adanya keputusan tersebut menyebabkan Pemerintah Belanda semakin tertekan tentang masalah Indonesia karena mereka harus mau melepaskan para Pemimpin pemerintahan Republik Indonesia.

⁷⁵ Deliar Noer, *op. cit.*, hlm. 343.

Pemerintahan Belanda pada akhirnya membuka perundingan lagi dengan Republik Indonesia untuk membicarakan penyerahan kedaulatan kekuasaan pemerintahan Belanda kepada RIS. Kedudukan Belanda di Indonesia semakin tertekan apa lagi Belanda kemudian kehilangan dukungan dari negara-negara BFO. BFO salut atas perjuangan Republik Indonesia dalam melawan Belanda maka BFO mendukung perjuangan Republik, dengan keadaan yang ada Belanda kemudian setuju untuk melepaskan para pemimpin Republik dan akan mengembalikan pemerintahan ke Yogyakarta. Pemimpin Republik Indonesia bersatu menghadapi Belanda untuk menyelesaikan persengketaan diantara mereka, terlebih dahulu mereka menuntut supaya para pemimpin dibebaskan terlebih dahulu dan di kembalikan di Yogyakarta.

Pemerintahan Belanda dan Indonesia akhirnya membuka kembali perundingan pada tanggal 14 April, pihak Indonesia diwakili oleh Moh. Rum sedang pihak Belanda diwakili oleh Van Royen, adapun pembicaraan persetujuan Rum-Royen itu adalah:

1. Pengeluaran pemerintah oleh pihak RI kepada kesatuan-kesatuan bersenjata RI untuk menghentikan perang gerilya, sedangkan pemerintah dan pemimpin RI dipulihkan kembali ke Yogyakarta.
2. Kerjasama dalam pemulihan perdamaian, dan pemeliharaan ketertiban dan keamanan

3. Belanda akan menyongsong RI untuk menjadi negara bagian RIS dengan mempunyai sepertiga suara dalam perwakilan Federal.
4. Ikut serta dalam KMB di Den Haag untuk mempercepat penyerahan kedaulatan tanpa syarat, nyata dan lengkap.⁷⁶

Dalam pembicaraan tentang Indonesia sedikit banyak mengalami hambatan karena Beel tidak setuju dengan dikembalikannya pemerintahan Republik ke Yogyakarta, Ia berpendapat kembalinya Republik hanya sebagai lambang saja. Pihak Republik tidak setuju dengan pendapat Beel apabila Republik Indonesia hanya sebagai lambang saja sehingga pembicaraan menjadi terhenti. Pada 22 April Mohammad Hatta menerima anjuran dari Cochran untuk berunding dengan Van Royen tentang batas daerah Yogyakarta, dan pengembalian Republik Indonesia ke Yogyakarta sebelum perundingan KMB. Dengan kedatangan Mohammad Hatta untuk turut serta dalam pembicaraan perundingan dapat berjalan kembali dimana pada akhirnya Van Royen menyetujui dikembalikannya pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta sesuai dengan anjuran PBB. Sebelum dikembalikan pemerintahan ke Yogyakarta Belanda mengusulkan supaya dilaksanakan gencatan senjata terlebih dahulu diantara kedua belah pihak supaya pengembalian Republik dapat berjalan dengan lancar.

Sebelum Pemerintahan Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono terlebih dahulu mengeluarkan perintah kepada semua TNI untuk menghindari kontak senjata dengan tentara Belanda dan mereka harus menghentikan

⁷⁶ G. Moedjanto, *op. cit.*, hlm. 53.

segala permusuhan waktu penarikan tentara Belanda dari Yogyakarta. Dengan kembalinya Pemimpin pemerintahan Republik Indonesia Sjafruddin Prawiranegara sebagai pemimpin pemerintahan Darurat mengembalikan mandat kepada wakil Presiden atau Perdana Menteri pada tanggal 13 Juli 1949.

Setelah pengembalian mandat dari Sjafruddin Prawiranegara, Mohammad Hatta kemudian menyusun Kabinetnya kembali guna menyiapkan perundingan KMB. Untuk mewujudkan RIS pihak BFO bekerjasama dengan pemerintah Republik dalam sidang KMB. Sebelum keberangkatan mereka ke Belanda diadakan pembicaraan Inter-Indonesia di Yogyakarta tanggal 20 Juli dan ditutup di Jakarta pada tanggal 2 Agustus. Hasil pembicaraan tersebut adalah:

1. Negara Indonesia Serikat menjadi Republik Indonesia Serikat.
2. Bendera Merah-Putih disahkan.
3. Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Persatuan disahkan.
4. Lagu Indonesia Raya disahkan.
5. 17 Agustus diakui sebagai hari Nasional.⁷⁷

A. Konferensi Meja Bundar (KMB)

Tujuan diadakan KMB adalah untuk menyelesaikan persengketaan Indonesia-Belanda dan untuk mencari kesepakatan tentang cara penyerahan kedaulatan yang

⁷⁷ Mohammad Hatta, *op.cit.*, hlm. 556.

penuh kepada RIS. Pelaksanaan KMB dilakukan di Den Haag dengan diikuti oleh Belanda, Republik Indonesia dan BFO. Ketua delegasi Belanda dipimpin oleh Van Maarseveen, Republik Indonesia oleh Mohammad Hatta dan BFO oleh Sultan Hamid II. Sebagai ketua KMB dipimpin oleh Perdana Menteri Drees dan UNCI bertindak sebagai mediator.

Berlangsungnya KMB dimulai 23 Agustus sampai 2 November 1949. Pembicaraan dalam KMB mencakup beberapa masalah diantaranya adalah pembentukan UNI, waktu penyerahan kedaulatan Belanda pada RIS dan urusan yang menyangkut antara kepentingan-kepentingan pemerintahan Belanda-Indonesia. Sidang KMB berjalan sangat lancar hanya urusan-urusan yang menyangkut ke dua belah pihak memerlukan waktu yang lumayan banyak terutama tentang urusan Politik, Ekonomi dan Militer walau masih ada beberapa masalah lagi tetapi bisa cepat dibicarakan tanpa banyak kendala.

Dalam pembukaan Konferensi Meja Bundar Mohammad Hatta sebagai ketua delegasi Republik Indonesia berpidato sebagai awal pembuka keikutsertaan Republik untuk membicarakan masalah peralihan kedaulatan tanpa syarat dari Belanda kepada RIS. Mohammad Hatta menekankan masalah kedepan dalam membangun RIS harus dipersiapkan benar-benar, masalah Indonesia-Belanda di masa lalu tentang kegagalan-kegagalan perundingan yang telah dilakukan janganlah dibahas kembali dalam sidang KMB melainkan mempersiapkan pelaksanaan penyerahan kedaulatan Republik Indonesia Serikat yang merdeka. Mohammad Hatta menuturkan telah empat tahun lamanya kita bermusuhan, empat tahun lamanya kita berada ditengah-

tengah persengketaan senjata, kini kita menghadapi lembaran baru, menghadapi sejarah baru dimana dasar damai akan menjadi dasar utama. Setelah selesai berpidato pembukaan maka pembicaraan KMB dapat dilaksanakan.

1. Masalah urusan politik dan konstitusional

Masalah pembentukan Uni Indonesia-Belanda merupakan masalah politik yang harus dilakukan dengan cepat. Belanda mau menerima usulan delegasi Indonesia yaitu tentang hubungan Uni Indonesia-Belanda akan tetap dijalankan guna menjalin hubungan Indonesia-Belanda yang dikepalai oleh Ratu Belanda, dimana kedudukan Ratu Belanda hanyalah sebagai simbol adanya suatu Uni Indonesia-Belanda. Sedangkan waktu penyerahan kedaulatan akan dilakukan secepatnya kepada RIS sebelum 1 Januari 1950. Penyerahan kedaulatan akan diterima RIS dari Belanda yaitu berupa kedaulatan penuh dan tanpa syarat apapun dari Pemerintahan Belanda.

Pembicaraan yang memakan waktu banyak adalah tentang urusan-urusan yang menyangkut kedudukan kedua belah pihak. Masalah konstitusional juga memakan waktu banyak dalam pembicaraan terutama masalah Irian, pihak Republik Indonesia dan negara Federal menghendaki supaya Irian masuk dalam kesatuan RIS tetapi Belanda menyatakan Irian tidak akan masuk dalam penyerahan kedaulatan. Mohammad Hatta berusaha keras untuk mempertahankan Irian agar tetap ikut dalam RIS sebab sebelum keberangkatannya ke Belanda ia sudah diberi mandat oleh Presiden Soekarno untuk membawa Irian kembali kedalam wilayah Indonesia karena Irian masih merupakan wilayah integarasi RIS. Belanda berusaha untuk tetap mempertahankan Irian karena Belanda ingin tetap dipandang sebagai penguasa di

wilayah Asia. Adanya kepentingan kedua negara tersebut menyebabkan akan terjadi kemacetan karena itu PBB mengutus wakilnya untuk menengahi pembicaraan masalah Irian. Dengan adanya utusan dari PBB maka pada tanggal 1 November tercapailah suatu kompromi, telah ditetapkan bahwa status karesidenan Irian berlaku dibawah pemerintahan Belanda dengan ketentuan dalam waktu setahun setelah penyerahan kedaulatan, soal setatus ketatanegaraan Irian akan ditentukan dan pertikaian mengenai soal ini akan disudahi dengan musyawarah antara Indonesia Serikat dan Belanda.⁷⁸

2. Ekonomi

Masalah ekonomi juga merupakan masalah yang sulit dipecahkan sebab Belanda menuntut pada Indonesia tentang pembayaran hutang Belanda yang dibebankan pada Republik Indonesia. Belanda sebenarnya telah memperoleh kebebasan yang sangat luas dalam penyelenggaraan usaha Ekonomi di Republik Indonesia. Pihak Republik masih memberikan kelonggaran kepada ahli-ahli untuk tetap bekerja di Republik tetapi mereka wajib memberikan pelatihan terhadap orang-orang Republik yang dipersiapkan untuk mengambil alih pimpinan. Sedangkan para penanam modal masih diberi kebebasan dalam menanam modalnya di Indonesia, tetapi mereka harus tunduk pada Undang-undang yang ditetapkan RIS. Hubungan ekonomi terutama dalam perdagangan di usahakan tetap dapat berjalan lancar karena para pedagang Belanda tetap akan membantu dalam perdagangan untuk memenuhi kebutuhan negara barat akan hasil bumi dari Indonesia.

⁷⁸ Ide Anak Gde Agung, Renville, *op.cit.*, hlm. 298.

Masalah hutang Belanda yang harus dibayar oleh RIS merupakan masalah yang paling berat dalam pembicaraan di KMB. Sebagai negara baru yang menggantikan kedaulatan negara lama biasanya harus mewarisi juga kewajiban-kewajiban negara lama dalam bidang keuangan, Pemerintahan Belanda menuntut supaya semua hutang Hindia-Belanda akan ditanggung pemerintahan RIS. Pihak Indonesia bersedia membayar hutang Belanda hanya sampai pada tahun 1942 tidak sampai tahun 1949, Delegasi Indonesia berpendapat apabila RIS mau membayar hutang Belanda sampai tahun 1949 berarti Indonesia membiayai sendiri peperangan-peperangan yang telah dilakukan Belanda kepada Republik, maka pihak Republik tidak setuju dengan pendapat Belanda. Pembicaraan tentang hutang-hutang Belanda yang harus dibayar RIS mengalami kemacetan.

PBB berusaha keras membantu dalam setiap pembicaraan-pembicaraan yang dilakukan dalam KMB. PBB berusaha keras membantu memecahkan masalah tentang hutang Belanda supaya pembicaraan tidak terhenti. PBB mengutus UNCI yang diwakili Cochran untuk membantu memecahkan masalah hutang, dengan adanya penengah akhirnya dapat ditetapkan jumlah uang yang harus dibayar oleh RIS. Keputusan tersebut sebenarnya merugikan pihak Republik karena RIS pada akhirnya harus menanggung hutang yang begitu banyak. RIS menerima keputusann tersebut karena Cochran memberikan janji bahwa AS akan membantu pembangunan ekonomi Indonesia bila RIS menerima usulnya, bila tidak AS tidak mau membantu.⁷⁹

⁷⁹ G. Moedjanto, *op.cit.*, hlm. 58

Diterimanya keputusan untuk membayar hutang-hutang Belanda oleh Republik tersebut maka terselesaikanlah masalah ekonomi.

3. Militer

Dalam pembicaraan tentang militer ada beberapa pokok masalah yang dibicarakan dengan serius. Masalah terpenting yang akan dibahas adalah tentang cara dan waktu penarikan tentara-tentara Belanda, masalah status tentara Indonesia dalam pembentukan menjadi negara Federal. Pembahasan Militer tidak banyak dibicarakan sebab kedua belah pihak sanggup melaksanakan gencatan senjata dengan baik selama KMB sehingga dimungkinkan pelaksanaan peralihan kekuasaan dapat berjalan lancar dan tertib.

Pembicaraan tentang masalah militer berkisar tentang kemungkinan pemberian bantuan untuk mendirikan angkatan laut RIS dan soal-soal mengenai penerbangan militer dapat kita lihat dalam:

1. Setelah penyerahan kedaulatan, Republik Indonesia Serikat bertanggung jawab, atas keamanan ke dalam dan atas pertahanan Indonesia terhadap luar.
2. Setelah penyerahan kedaulatan, angkatan perang Belanda akan ditarik kembali dari Indonesia.
3. Sambil menunggu mereka diangkat dengan kapal ke Negri Belanda, Pasukan-pasukan ini dilarang dipergunakan untuk oprasi-oprasi militer, kecuali hal ini diminta oleh pemerintah Republik Indonesia Serikat.

4. Anggota-anggota angkatan perang, yang diorganisasikan dan dipersenjatai oleh pemerintah Hindia Belanda, seperti KNIL dan apa yang disebut batalyon-batalyon Federal, pada dasarnya dapat ditampung oleh angkatan perang Republik Indonesia Serikat: peralatan-peralatan dan persenjataan mereka harus diserahkan dengan cara yang efisien, hal yang satu dan lainnya ditentukan setelah kedua belah pihak bermusyawarah.
5. Tanggung jawab militer teritorial harus diserahkan dengan suatu cara yang tertib antara pembesar-pembesar Belanda dan Indonesia.
6. Suatu misi militer Belanda akan dikirim ke Indonesia untuk membantu RIS di dalam membangun angkatan perang.⁸⁰

Hasil tentang pembicaraan militer memang mengalami persengketaan walau sedikit, masalah tersebut adalah waktu penarikan dan penyerahan pangkalan militer Belanda kepada Indonesia. Dengan adanya kompromi yang berlanjut akhirnya masalah militer dapat terselesaikan. Ada dua pokok pembicaraan lagi dalam KMB yaitu masalah sosial dan kebudayaan tetapi dalam penulisan kali ini tidak membahas masalah tersebut.

Sidang KMB akhirnya berhasil memecahkan masalah Indonesia dan Belanda. Mohammad Hatta tidak pernah mengenal lelah dalam perjuangan membela kepentingan-kepentingan Republik Indonesia membela kepentingan Indonesia dalam sidang KMB, perjuangan Mohammad Hatta tidaklah sia-sia sebab pihak

⁸⁰ Ide Anak Agung Gde Agung, Renville, *op. cit.*, hlm. 311-312.

Republik Indonesia akhirnya dapat mendirikan RIS tanpa intervensi dari pemerintahan Belanda.

B. Menata Pemerintahan Indonesia

KMB secara resmi ditutup pada tanggal 2 November dengan ditandatangani dokumen yang telah disetujui diantara kedua belah pihak. Seusai sidang KMB Mohammad Hatta langsung kembali ke Indonesia, sesampainya di Yogyakarta Mohammad Hatta disambut dengan gembira oleh Presiden Soekarno dan beberapa pejabat menteri.

Sekembalinya ke Yogyakarta Mohammad Hatta harus mempertanggung jawabkan hasil KMB di dalam sidang KNIP. Sidang KNIP dilaksanakan pada tanggal 25 November 1949 untuk mendengarkan laporan Mohammad Hatta, dalam sidang KNIP Hatta melaporkan dan mempertanggung jawabkan tentang hasil KMB. Mohammad Hatta menekankan terlebih dahulu keberhasilan tuntutan Republik walaupun ke berhasilanya 95% saja bukan 100% yang dihasilkan, itu disebabkan masalah Irian akan dibicarakan satu tahun kemudian. Mohammad Hatta menegaskan bahwa hasil KMB merupakan suatu keberhasilan dalam perundingan antara Belanda dan Indonesia dibandingkan dengan Lingga Jati dan Renville. Hasil KMB seakan-akan Republik Indonesia sudah diakui secara de Jure dan de Facto oleh internasional. Menurut Mohammad Hatta, Indonesia Merdeka jangan dilihat sebagai tujuan akhir

perjuangan tetapi “Syarat untuk mencapai keberhasilan dan kemakmuran rakyat”.⁸¹ dilaksanakan oleh Wakil Tinggi Mahkota Loving yang diterima oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX berlangsung di Jakarta.

Diakuinya kedaulatan RIS oleh Belanda maka secara resmi Pemerintahan Republik Indonesia Serikat mulai dijalankan. Satu hari setelah penyerahan kedaulatan

Pada tanggal 7-15 Desember KNIP mengadakan sidang pleno di Siti Inggil Kraton Yoyakarta untuk membahas hasil KMB. Presiden Soekarno yang membuka sidang pleno KNIP, ia mengingatkan kepada anggota sidang untuk berpikir dinamis supaya hasil KMB dipandang sebagai alat perjuangan. Presiden meminta KNIP untuk memikirkan sedalam-dalamnya dan tanggung jawab sepenuh-penuhnya terhadap tahap akhir pengambilan keputusan, sesudah mempertimbangkan masak-masak apakah dengan hasil KMB itu dapat dicapai cita-cita kita⁸² tentang pandangan kemasa depan. Memang didalam sidang Pleno ada perdebatan-perdebatan tentang hasil sidang KMB tetapi akhirnya KNIP menerima hasil KMB setelah melalui pemungutan suara yang menghasilkan 226 menerima, 62 menolak dan 31 kosong dengan demikian KNIP menerima hasil KMB.

Pada bulan Oktober terbentuklah Panitia Persiapan Nasional (PPN) yang bertujuan untuk membicarakan persiapan penyerahan kedaulatan. Sidang pertama dibuka Mohammad Hatta sebagai pemimpin PPN, anggota PPN beranggotakan 31 orang

⁸¹ Deliar Noer, *op. cit.*, hlm. 361.

⁸² K.L.M. Tobing, *Politik Perjuangan Bangsa Indonesia KMB*, Haji Masagung, Jakarta, 1987, hlm. 232.

BAB V

SIMPULAN

Perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak hanya berhenti setelah Proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Soekarno didampingi Mohammad Hatta atas nama Bangsa Indonesia yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945. Tetapi kemerdekaan Indonesia masih terus diperjuangkan dalam kancah politik sebab kedatangan Belanda ke Indonesia dengan cara membonceng tentara Inggris ingin berkuasa kembali di Indonesia seperti Jaman kolonial dahulu. Kekalahan Jepang melawan Sekutu membuat peluang terhadap Indonesia untuk memproklamasikan dirinya sebagai bangsa baru, tetapi Belanda tidak mengakui Proklamasi kemerdekaan Indonesia sebab Belanda menganggap proklamasi dilakukan oleh pemberontak-pemberontak yang ingin berkuasa dan menganggap proklamasi itu buatan Jepang. Kedatangan Belanda yang ingin berkuasa kembali menyebabkan rakyat Indonesia harus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan.

Terbentuknya suatu negara diperlukan pemimpin yang kuat untuk memimpin bangsa, Soekarno terpilih untuk memimpin bangsa yang berkedudukan sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai wakil Presiden. Perjuangan kedua pemimpin tersebut pertama-tama berusaha mewujudkan negara demokrasi terlebih dahulu. Berdirinya suatu negara juga diperlukan adanya pengakuan atas identitasnya sebagai bangsa secara de Jure dan de Facto. Perjuangan Bangsa Indonesia pada tahun 1945-

1949 tidaklah terlepas dari peranan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden, karena itu dalam penulisan Sekripsi tentang Peranan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden akan mengungkapkan perjuangan yang telah dilakukan oleh Mohammad Hatta untuk bangsa Indonesia.

1. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia Th 1945-1947.

Kedudukan Mohammad Hatta sebagai wakil Presiden tidaklah kalah penting dengan kedudukan Presiden yang di pegang oleh Soekarno. Mohammad Hatta mempunyai banyak peran dalam kedudukannya sebagai wakil Presiden sebab Mohammad Hatta adalah seorang organisator handal dalam menata pemerintahan Republik Indonesia. Peranan Mohammad Hatta terkait erat oleh Soekarno dalam hubungannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Kepemimpinan Presiden Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai wakilnya telah terjalin erat dan sangat baik sehingga kepemimpinan mereka dikenal dengan nama dwitunggal Soekarno Hatta. Soekarno dan Mohammad Hatta merupakan dua pribadi yang berbeda tetapi mereka bisa saling melengkapi dalam memimpin bangsa Indonesia. Soekarno merupakan orang yang sangat piawai berpidato sehingga berhasil menarik rakyat untuk mengikutinya, Ia merupakan orang yang berdarah panas sehingga Soekarno biasa membakar semangat rakyat untuk terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden merupakan patner yang baik untuk Soekarno, Mohammad Hatta merupakan seorang perencana dan organisator yang disertai ketekunan, perhatian yang cermat dan detail

juga mampu memikirkan dampak jangka panjang dari suatu tindakan menjadikan kontrol terhadap langkah yang diambil Soekarno.

Dwitunggal Soekarno Hatta dalam kepemimpinannya mengalami berbagai macam ujian, sehingga Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden sering kali harus mengambil keputusan secara cepat. Mereka berdua saling mendukung keputusan yang telah diambil oleh salah satu dari mereka, beberapa keputusan yang telah diambil Mohammad Hatta yang didukung oleh Presiden Soekarno diantaranya adalah: Pembentukan TKR yang telah ditandatangani oleh Mohammad Hatta bersama Urip Sumohardjo, Maklumat No. X tanggal 16 Oktober 1945, Manifesto politik 1 November dan peristiwa 3 Juli.

Pada tanggal 14 November 1945 Presiden Soekarno menunjuk Syahrir untuk membentuk suatu Kabinet guna menghadapi Pemerintahan Belanda. Syahrir dalam berjuang menggunakan cara diplomasi, cara berjuang Sjahrir didukung sepenuhnya oleh Mohammad Hatta. Mohammad Hatta beberapakali membantu Sjahrir dalam mempertahankan Kabinetnya, Dwitunggal Soekarno Hatta pernah juga memecahkan masalah Indonesia sewaktu perundingan Linggar Jati yang dilakukan oleh kabinet Sjahrir.

Kekalahan Jepang membuat wilayah Indonesia menjadi daerah pengawasan Sekutu. Inggris diberikuasa untuk menangani masalah Indonesia, kedatangan Inggris di Indonesia digoncengi tentara Belanda yang ingin kembali berkuasa di Indonesia. Keterlambatan Sekutu datang ke Indonesia dipergunakan sebaik-baiknya oleh para pemimpin perjuangan untuk memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia.

Kedatangan tentara Sekutu di Indonesia mengalami banyak perlawanan yang dilakukan rakyat, karena sebenarnya rakyat takut kedatangan bangsa Barat akan menjajah Indonesia kembali. Pada awalnya para pemimpin Indonesia mau membantu tugas Sekutu di Indonesia yang dijalankan oleh Inggris sebab Christison berjanji akan mengakui pemerintahan Indonesia secara de Facto, tetapi dengan kedatangan tentara Belanda ke Indonesia membuat kekecewaan Hatta terhadap Christison sebab ia pernah berjanji kalau tentara Belanda tidak akan turut mendarat bersama Sekutu ternyata tidak benar. Mohammad Hatta menyarankan pada pihak Sekutu untuk membatasi ruang gerak tentara Belanda supaya tidak terjadi kekacauan, telah banyak kekacauan yang terjadi disebabkan karena Belanda tetap melebarkan sayapnya di Indonesia. Inggris mendesak Belanda untuk melakukan perundingan dengan Indonesia, pada awalnya Belanda menolak untuk berunding, akhirnya Belanda sadar perlunya dilakukan perundingan Republik Indonesia. Adanya bantuan Sekutu maka terlaksanalah perundingan Linggar Jati walupun akhirnya Belanda melakukan Agresi Militer Belanda I.

2. Tindakan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden dan Pelaksanaan Perjanjian Renville sampai Agresi Belanda ke II.

Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden berkewajiban untuk memberikan semangat perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Adanya undangan anggota KNIP asal Sumatra kepada Mohammad Hatta untuk datang Sumatra, Kedatangan Mohammad Hatta disambut hangat oleh rakyat Sumatra. Di Sumatra Mohammad Hatta melihat kurang adanya persatuan rakyat sehingga beberapa daerah

diduduki tentara Belanda dengan mudah, dengan adanya hal tersebut Mohammad Hatta menekankan perlunya persatuan rakyat dalam perjuangan, sebab dengan adanya persatuan rakyat tidak akan mudah dijajah kembali.

Ketika Mohammad Hatta berada di Bukit Tinggi ada utusan dari Presiden Soekarno yang memerintahkan Hatta berangkat ke India guna meminta bantuan senjata pada Nehru, karena Belanda terlihat akan melakukan Agresi militernya lagi. Kedatangan Mohammad Hatta diterima baik oleh Nehru sebab mereka telah lama bersahabat, Nehru kali ini tidak bisa memberikan bantuan senjata kepada Indonesia karena persenjataan India masih diurus dan dalam pengawasan Inggris. Nehru berjanji pada Mohammad Hatta akan membantu dengan cara memprotes pada Bangsa Barat atas tindakan Belanda terhadap Indonesia. Sewaktu di India Mohammad Hatta juga berhasil menemui Mahatma Gandhi, Ia tidak habis pikir dengan tindakan Belanda terhadap Indonesia tetapi Gandhi percaya kalau suatu saat nanti Indonesia pasti akan mendapat kemerdekaannya secara penuh. Kata-kata Gandhi membuat semangat Mohammad Hatta dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Sekembalinya dari India Mohammad Hatta kembali ke Sumatra tetapi tidak lama kemudian ada perintah supaya Mohammad Hatta kembali ke Jakarta. Pada waktu Mohammad Hatta di Sumatra di Jakarta telah dilaksanakan perjanjian Renville yang dilakukan oleh Kabinet Amir Sjarifuddin. Hasil perjanjian Renville mengalami banyak sekali protes karena dalam perjanjian Renville Wilayah Republik Indonesia semakin sempit sehingga banyak yang protes, oleh sebab itu Amir Sjarifuddin



mengembalikan mandat pada Presiden Soekarno. Karena posisi Indonesia sedang dalam posisi yang sulit, tidak ada orang yang mau memimpin Kabinet maka Presiden Soekarno mengutus Mohammad Hatta supaya secepatnya membentuk Kabinet guna melaksanakan hasil perjanjian Renville.

Dalam menjalankan Kabinet Mohammad Hatta membuat program untuk dilaksanakan, program-program tersebut diantaranya: meneruskan perundingan dengan Belanda, rasionalisasi dan pembangunan. Program rasionalisasi dilaksanakan dengan semaksimal mungkin, pada awal rasionalisasi Mohammad Hatta melakukan penertiban organisasi kemiliteran dengan cara menurunkan satu pangkat kepada semua tentara dan beberapa tentara dipekerjakan pada pabrik-pabrik atau dikembalikan kepada masyarakat. Usaha Mohammad Hatta dalam melaksanakan perundingan dengan Belanda dibantu oleh KTN. Pada awal perundingan Belanda menyatakan tidak puas dengan hasil perundingan-perundingan yang telah dilakukan, Belanda kemudian menuntut beberapa permintaan yang sering kali merugikan pihak Indonesia, karena itu pihak Indonesia kerap kali menolak permintaan Belanda. Permintaan Belanda yang membuat kemacetan perundingan adalah persoalan kedudukan Komisaris Tinggi Mahkota selama peralihan memiliki kekuasaan menggerakkan pasukan Nederland ke daerah yang dianggap tidak aman, permintaan ini ditolak dengan tegas oleh Mohammad Hatta tetapi membuka kemungkinan untuk berunding kembali. Pihak Belanda tidak puas dengan hasil perundingan yang telah dilakukan apalagi Mohammad Hatta tidak membalas surat yang berisi tuntutan dari pemerintah Belanda dalam waktu yang telah ditentukan, dengan ketidakpuasan

Belanda maka secara resmi mereka mencabut pernyataan gencatan senjata sehingga Belanda akhirnya melakukan Agresi Militer ke II. Pada Agresi kali ini para pemimpin Republik Indonesia ditangkap dan ditahan yang kemudian diasingkan keluar Jawa. Cara Belanda menangani tahanan politik tidak berubah dari dahulu yaitu dengan cara mengasingkan para pemimpin dan membatasi ruang gerak politiknya.

Pada waktu terjadinya kemacetan perundingan di wilayah Republik Indonesia sedang terjadi Pemberontakan yang dilakukan Komunis pimpinan Muso, Muso berusaha menggulingkan Pemerintahan Soekarno dan Mohammad Hatta tetapi gagal karena Mohammad Hatta segera mengutus pasukan TNI untuk menghancurkan kekuatan PKI. Mohammad Hatta mengajak rakyat untuk bekerjasama dalam menumpas pemberontakan PKI, kemanunggalan rakyat dan TNI berhasil menghancurkan PKI. Keberhasilan Mohammad Hatta menghancurkan pemberontakan PKI membuat kedudukan Republik Indonesia semakin kuat dalam perjuangan diplomasi internasional.

3. Sikap dan Tindakan Mohammad Hatta dalam Kabinetnya Th 1948-1949.

Penangkapan dan penahanan pemimpin Republik Indonesia membuat reaksi Negara-negara Luar mengecam tindakan Belanda. India dan Australia berusaha keras membantu masalah Republik Indonesia untuk dibawa kedalam sidang PBB. Pihak KTN yang melihat sendiri tindakan Belanda dalam Agresi Militer II juga melaporkan kecurangan-kecurangan yang telah dilakukan Belanda. Dengan usaha-usaha yang keras dari berbagai pihak maka masalah Indonesia berhasil dibawa kedalam sidang DK-PBB.

Kedudukan Belanda yang tertekan akhirnya menerima usul PBB untuk membuka kembali pembicaraan dengan Indonesia tentang penyerahan kedaulatan Belanda pada pemerintah RIS. Sebelum diadakan KMB dilaksanakan terlebih dahulu dilakukan perundingan Rum-Royen yang menekankan supaya pemerintahan Republik Indonesia di kembalikan terlebih dahulu ke Yogyakarta. Belanda awalnya tidak bersedia melepaskan para Pemimpin Republik Indonesia tetapi dengan desakan BFO yang tidak mau melangsungkan perundingan dengan Belanda dalam KMB apabila pemimpin RI tidak dilepaskan, dengan adanya ultimatum dari BFO akhirnya Belanda bersedia mengembalikan para pemimpin Republik Indonesia ke Yogyakarta.

KMB dilakukan di Den Haag yang di ikuti oleh delegasi Belanda dipimpin oleh Van Maarseveen, Republik Indonesia oleh Mohammad Hatta dan BFO oleh Sultan Hamid II. Dalam KMB ada beberapa pokok masalah yang dibicarakan yaitu: Urusan politik, ekonomi, militer, sosial dan kebudayaan, tetapi dalam penulisan ini adalah masalah politik, ekonomi dan militer. Urusan politik dan konstitusional membicarakan tentang kedudukan Uni Indonesia-Belanda dan mengenai batas wilayah Indonesia, pembicaraan mengenai status Irian sedikit mengalami hambatan, tetapi akhirnya masalah Irian akan dibahas satu tahun kemudian. Pembicaraan ekonomi merupakan masalah yang sulit sebab Belanda meminta pada Republik untuk menanggung semua hutang Hindia Belanda sampai tahun 1949, Republik Indonesia menolak hal tersebut karena bila diterima berarti Republik membiayai perangnya sendiri. Pihak AS mendesak Republik Indonesia untuk menerima tanggung jawab tersebut dengan janji akan membantu perkembangan perekonomian Indonesia

nantinya apabila tidak mau maka AS tidak akan membantu Indonesia, maka Republik Indonesia menerima tanggung jawab tersebut. Masalah Militer di bicarakan sebab menyangkut pelaksanaan gencatan senjata untuk memperlancar jalannya penarikan tentara Belanda dari Republik Indonesia.

Selesai KMB Mohammad Hatta mempertanggung jawabkan hasil KMB dalam sidang KNIP. Dalam sidang Pleno KNIP dibicarakan tentang hasil KMB dengan hasil 226 menerima, 62 menolak dan 31 kosong dengan hasil tersebut berarti KNIP menerima persetujuan KMB. Pada tanggal 16 Desember dibicarakan tentang pemilihan Presiden RIS, Soekarno terpilih menjadi Presiden RIS yang pertama sedangkan Mohammad Hatta terpilih sebagai Perdana Menteri dan kedudukan Wakil Presiden dihapuskan.

Penyerahan kedaulatan Belanda kepada RIS dilakukan di de Dam di Amsterdam dilaksanakan oleh Ratu Juliana yang diterima oleh Mohammad Hatta, sedangkan di Indonesia dilaksanakan di Jakarta yang dilakukan oleh Wakil Tinggi Mahkota Loving dan diterima oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Diakuinya kedaulatan RIS oleh Belanda maka secara resmi RIS diakui keberadaannya secara de Jure dan de Facto. Diakuinya kedaulatan RIS maka secara langsung Pemerintahan RIS mulai berlaku secara resmi, dilaksanakannya pemerintahan RIS maka berakhirilah kedudukan Mohammad Hatta sebagai Waki Presiden.

Dengan demikian dapat kita lihat begitu banyak peran Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perannan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden tidak

kalah penting dengan Presiden Soekarno terutama dalam hal diplomasi, Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden merupakan kontrol yang baik bagi Soekarno dalam memimpin pemerintahan, selain itu Mohammad Hatta merupakan partner yang baik untuk memimpin dan membangun Republik Indonesia.

Belanda yang datang kembali ke Indonesia dengan cara menggonceng Sekutu ingin berkuasa kembali di Indonesia seperti pada waktu pemerintahan Hindia-Belanda. Kedatangan Belanda ke Indonesia tidak diterima baik oleh rakyat Indonesia sebab rakyat sudah tidak mau dijajah kembali setelah Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Usaha Pemerintah Republik Indonesia menghadapi Belanda dengan cara diplomasi, Presiden Soekarno beberapa kali menunjuk orang untuk membentuk Kabinet guna menghadapi Belanda dalam berunding. Pada th 1945-1949 telah ada 3 orang yang memimpin Kabinet dalam usaha menghadapi Belanda, ketiga Kabinet itu telah menghasilkan persetujuan-persetujuan antara Belanda dan Indonesia yaitu: Linggar Jati yang diadakan dalam Kabinet Sjahrir, Renville yang diadakan dalam Kabinet Amir Sjarifudin dan KMB yang diselenggarakan dalam Kabinet Mohammad Hatta. Dalam KMB Mohammad Hatta memimpin delegasi Republik Indonesia menghadapi Belanda guna membicarakan hal-hal yang penting dalam penyerahan kedaulatan Belanda kepada RIS, maka dengan disahkan hasil perundingan KMB Republik Indonesia diakui secara de Jure dan de Facto.

Dalam uraian diatas dapat kita lihat Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden mempunyai peran banyak dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan Mohammad Hatta dan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia tidaklah

sia-sia, sebab akhirnya kemerdekaan Indonesia diakui sepenuhnya oleh negara-negara lain terutama oleh Belanda, Indonesia merupakan negara berdaulat



Daftar Pustaka

Ali Sastroamidjojo,

1974: *Tonggak-tonggak di Perjalananku*, Kinta, Jakarta.

Deliar Noer, ,

1990: *Mohammad Hatta Biografi Politik*, LP3ES, Jakarta.

Faride Swasono Meutia,

1980: *Bung Hatta Pribadinya dalam Kenangan*, Sinar Harapan dan Universitas Indonesia, Jakarta.

Ide Anak Agung Gde Agung,

1995: *Persetujuan Linggarjati Prolog dan Epilog*, Pustaka Nusantara dan Sebelas Maret University Press. Yogyakarta.

1983: *Renville*, Sinar Harapan Jakarta.

1995: *Pernyataan Rum Van Roijen*, Pustaka Nusantara dan Sebelas Maret University Press. Yogyakarta.

Lapian, A. B., dan P.J.,

1991: *Droglever, Menelusuru Jalur Linggarjati*, Grafitri, Jakarta.

Nugroho Notosusanto, dkk.,

1977: *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*. Balai Pustaka, Jakarta.

Notosoetarjo, H.A.,

1956: *Dokumen-dokumen KMB*, Endang, Jakarta.

Moedjanto, G.,

1988: *Indonesia Abad Ke-20 Jilid I*, Kanisius Jogjakarta.

—————,

1988: *Indonesia Abad Ke-20 Jilid II*, Kanisius Jogjakarta.

Mohammad Hatta,

1978: *Memoir, Tintamas Indonesia*, Jakarta.

Mavis Rose,

1991: *Indonesia Merdeka Biografi Politik Mohammad Hatta*, Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta.

Peter Salim dan Yenny Salim

1991: *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer Edisi Pertama*, Modern English
Prees, Jakarta.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan

1983: *Kamus Bahasa Indonesia Jilid II*, Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.

Roem, M.,

1989: *Diplomasi Ujung Tombak Perjuangan RI*, PT Gramedia, Jakarta.

—————,

1977: *Suka Duka Berunding dengan Belanda*, Idayu Press, Jakarta.

Suwarno Basuki,

1980: *Hubungam Indonesia Belanda Periode 1945-1949 Jilid 1*, Pan Percetakan Upakara, Jakarta.

Sumanang, dkk.,

1972: *Bung Hatta Mengabdikan pada Tjita-tjita Perdjjoangan Bangsa*, Panitia Peringatan Ulang Tahun Bung Hatta Ke-70, Jakarta.

Tobing, K. M. L.,

1986: *Politik Bangsa Indonesia Lingga Jati*, Gunung Agung, Jakarta.

1987: *Politik Perjuangan Bangsa Indonesia KMB*, Haji Masagung, Jakarta.

1986: *Politik Perjuangan Bangsa Indonesia Renville*, Gunung Agung, Jakarta.

Yayasan Idayu,

1980: *Bung Hatta Kita*, Yayasan Idayu, Jakarta.

SILABUS

SEKOLAH MENENGAH ATAS

Mata Pelajaran : Sejarah

Kelas/ semester : 3

Alokasi waktu : 4 x 45 (dua kali pertemuan @ 2x 45)

Kompetensi Dasar	Kemampuan membahas peranan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Hasil Belajar	Memahami peranan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden th 1945-1949.
Indikator	<ol style="list-style-type: none">1. Menjelaskan peranan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden RI th 1945-19472. Menjelaskan tindakan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden th 1947 dan pelaksanaan perjanjian Renville th 1948 sampai Agresi Belanda II3. Mendeskripsikan sikap dan tindakan Mohammad Hatta dalam Kabinetnya th 1948-1949.
Tujuan Pembelajaran	Siswa mampu menjelaskan: <ol style="list-style-type: none">1. Peranan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden RI th

	<p>1945-1947</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Tindakan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden th 1947 dan pelaksanaan perjanjian Renville th 1948 sampai Agresi Belanda II. 3. Sikap dan tindakan Mohammad Hatta dalam Kabinetnya th 1948-1949.
<p>Langkah Pembelajaran</p>	<p>Kegiatan Pembelajaran dilakukan dalam dua tahap skenario pengalaman belajar siswa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Di luar kelas <ol style="list-style-type: none"> a. Pengalaman Belajar siswa melalui studi pustaka (buku, koran, majalah) sehubungan (a) soal peranan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden RI th 1945-1947, (b) soal tindakan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden th 1947 dan pelaksanaan perjanjian Renville th 1948 sampai Agresi Belanda II, (c) soal sikap dan tindakan Mohammad Hatta th 1948-1949. b. Sebelum siswa melakukantugas, guru membagi kelompok antara lain: (1) kelompok peranan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden RI th 1945-1947; (2) kelompok tindakan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden th 1947 dan pelaksanaan perjanjian Renville th 1948 sampai Agresi

Belanda II: (3) kelompok sikap dan tindakan Mohammad Hatta th 1948-1949.

Tugas siswa dalam bentuk lembaran kerja, diantaranya berisikan:

1. a. Judul laporan: Peranan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden RI th 1945-1949
 - b. Isi laporan singkat:
 - Dwi tunggal Soekarno Hatta
 - Mohammad Hatta dalam Kabinet Sjahrir
 - Kedatangan Sekutu dan Belanda di Indonesia
 - Lingga Jati
 - c. Identifikasi fakta-fakta peranan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden RI.
 - d. Deskripsi peranan Mohammad Hatta dalam kedudukannya sebagai Wakil Presiden RI th 1945-1947.
 - e. Kesimpulan:

Mohammad Hatta banyak berperan mempertahankan Kemerdekaan Indonesia dalam kedudukannya sebagai Wakil Presiden.
2. a. Judul laporan: tindakan Mohammad Hatta sebagai Wakil th 1947 dan pelaksanaan perjanjian Renville th 1948 sampai Agresi Belanda II.

	<p>b. Isi Laporan singkat</p> <ul style="list-style-type: none">- . Mohammad Hatta di Sumatra- . Mohammad Hatta ke Sumatra- . Perjanjian Renville- . Pelaksanaan perjanjian Renville- . Pemberontakan Partai Komunis Indonesia- . Agresi militer Belanda II <p>c. Identifikasi tindakan - tindakan Mohammad Hatta di Sumatera dan India.</p> <p>d. Mendiskripsikan pelaksanaan hasil perjanjian Renville sampai Agresi Belanda II.</p> <p>e. Mohammad Hatta berjuang keras dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan cara kerja sama bersama para pemimpin Indonesia dan negara-negara lain dalam menghadapi Belanda.</p> <p>3. a. Judul: sikap dan tindakan Mohammad Hatta dalam Kabinetnya th 1948-1949.</p> <p>b. Isi laporan singkat:</p> <ul style="list-style-type: none">- . Konfrensi Meja Bundar- . Menata pemerintahan Indonesia <p>c. Identifikasi pelaksanaan Konfrensi Meja Bundar</p>
--	---

	<p>d. Deskripsi tindakan Hatta menata pemerintahan Indonesia kembali.</p> <p>e. Kesimpulan:</p> <p>Perjuangan Mohammad Hatta di KMB membuahkan hasil pengakuan pemerintah Indonesia yang merdeka dan berdaulat.</p> <p>2. Di kelas</p> <p>a. Apersepsi (15 menit)</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Guru membuka pembelajaran dengan menanyakan kesiapan tugas yang akan didiskusikan? Siswa menjawab sudah siap.➤ Guru menanyakan secara singkat proses penyusunan laporan dari masing-masing kelompok? Dan setiap kelompok memberi penjelasan proses penyusunan laporan kelompok. <p>b. Kegiatan Inti</p> <p>Mempresentasikan hasil laporan kelompok secara bergantian mulai dari kelompok (1), (2) dan (3), dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. Dalam diskusi kelas siswa mempresentasikan hasil laporan dengan kemampuan yang didapatkan dari kajian pustaka, keterlibatan dan observasi. Dalam diskusi kelompok akan terlihat kemampuan siswa dalam mempertahankan pendapatnya dengan argumentasinya, menghormati pendapat teman dan merumuskan</p>
--	---

hipotesis atau pemikirannya setelah presentasi semua kelompok dengan disertai diskusi dan tanya jawab, guru memaparkan materi ajar untuk melengkapi, menyempurnakan, mengklarifikasi dan memperkuat hasil laporan semua kelompok. Cara penyampaian dapat dengan ceramah, membagikan bahan ajar untuk di baca secara individual atau kelompok lalu tanya jawab, diskusi dan penegasan oleh guru.

c. Penutup (15 menit)

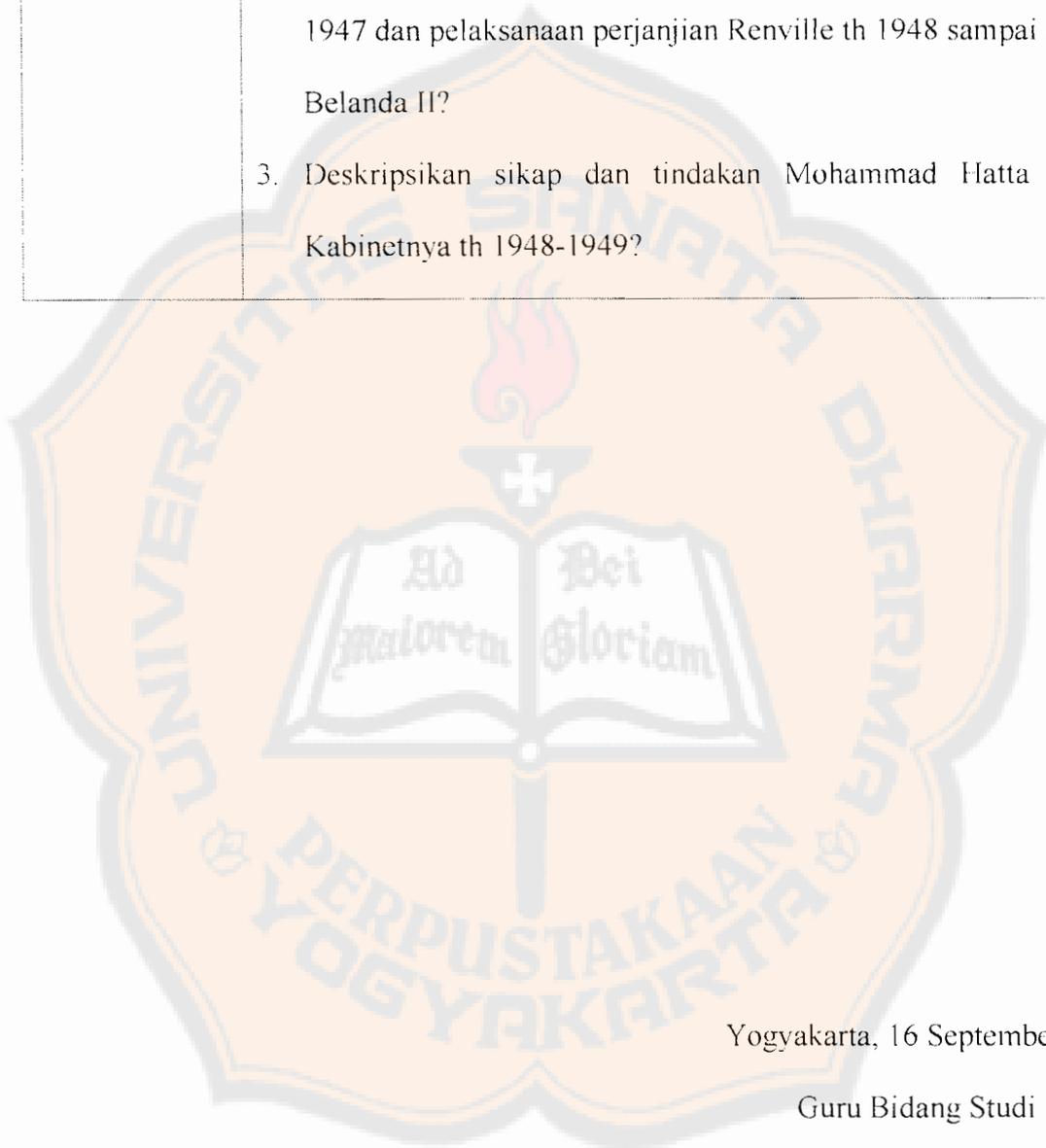
Kesimpulan yang dilakukan oleh guru sebagai moderator dan fasilitator dengan menyarankan bukan satu-satunya kebenaran

- Peranan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden RI th 1945-1947.
- Tindakan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden th 1947 dan pelaksanaan perjanjian Renville th 1948 sampai Agresi Belanda II.
- Sikap dan tindakan Mohammad Hatta dalam Kabinetnya th 1948-1949.

Kesimpulan: Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden berperan banyak dalam mempertahankan kemerdekaan sampai pengakuan kedaulatan Indonesia.

<p>Sumber Pembelajaran</p>	<p>Sumber Pembelajaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Arsip-arsip nasional yang berisikan tentang Lingga Jati, Renville dan KMB ➤ Buku referensi <ul style="list-style-type: none"> - Deliar Noer, <i>Mohammad Hatta Biografi Politik</i>, LP3ES, Jakarta: 1990. - Mohammad Hatta, <i>Memoir</i>, Tintamas Indonesia, Jakarta : 1978. - Mavis Ros, <i>Indonesia Merdeka Biografi Politik Mohammad Hatta</i>, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 1991.
<p>Penilaian</p>	<p>a. Penilaian Kognitif</p> <p>Penilaian ini dilakukan menggunakan post-tes dengan membuat pertanyaan yang tidak mengulang pengalaman belajar yaitu melalui tes uraian bebas (buka buku) dan untuk memudahkan penskoran, maka dibuat rambu-rambu jawaban yang akan dijadikan acuan.</p> <p>b. Penilaian Afektif</p> <p>Penilaian ini dilakukan dengan lembar pengamatan individual, yang dilakukan oleh guru, selam proses pembelajaran berlangsung, baik berupa “ komentar” atau dalam bentuk pengamatan.</p> <p>c. Penilaian Portofolio</p> <p>Berupa laporan kerja kelompok</p>

Alat Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan peranan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden RI th 1945-1947? 2. Jelaskan tindakan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden th 1947 dan pelaksanaan perjanjian Renville th 1948 sampai Agresi Belanda II? 3. Deskripsikan sikap dan tindakan Mohammad Hatta dalam Kabinetnya th 1948-1949?
---------------	--



Yogyakarta, 16 September 2004

Guru Bidang Studi

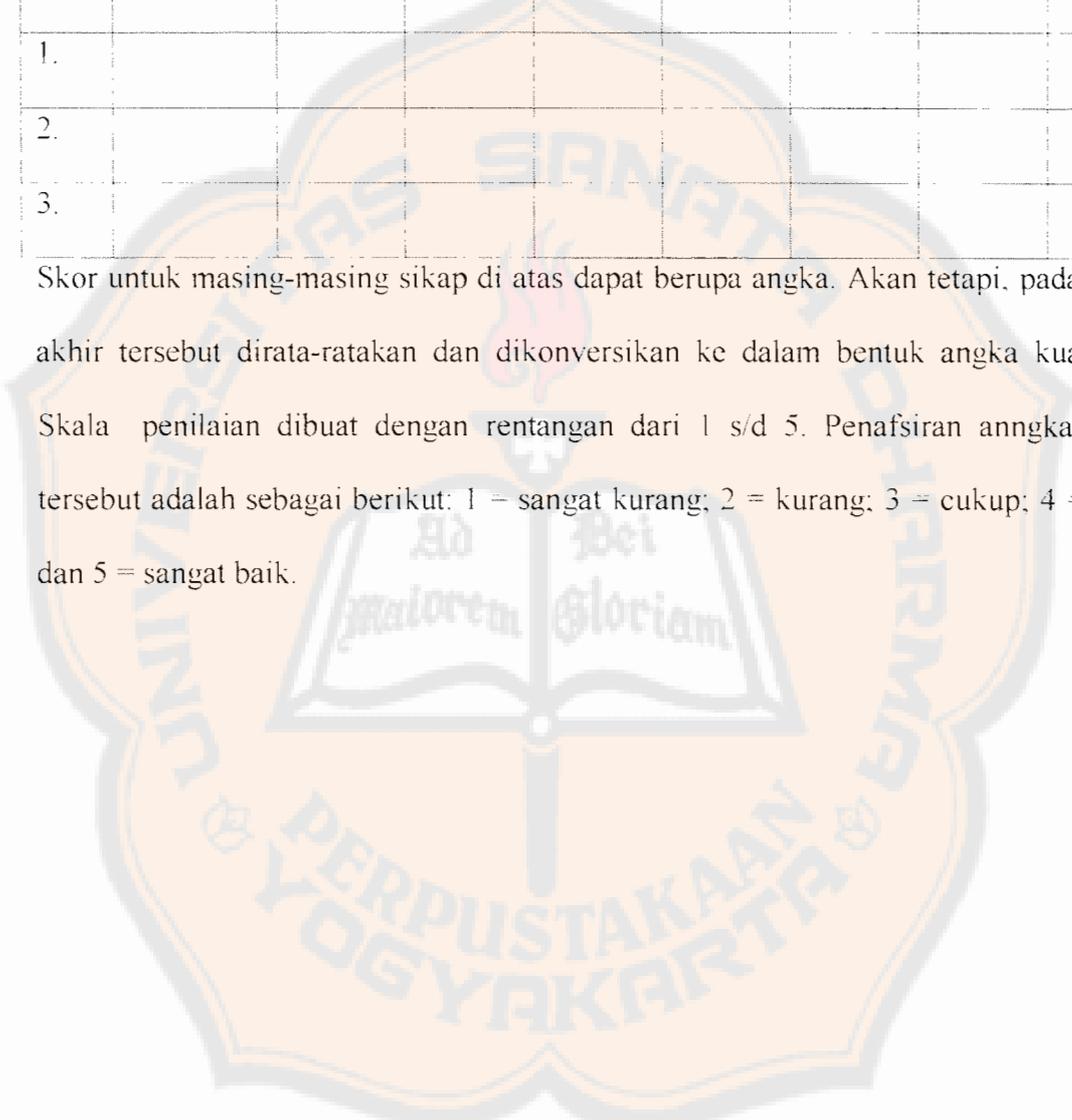
(Christina Septi N)

Format lembar pengamatan sikap siswa (penilaian afektif)

No.	Kerja Sama	Pembagian Tugas	Tanggung Jawab	Tanggung Rasa	Penggunaan Materi	Mutu Presentasi	Nilai Rata-rata
1.							
2.							
3.							

Skor untuk masing-masing sikap di atas dapat berupa angka. Akan tetapi, pada tahap akhir tersebut dirata-ratakan dan dikonversikan ke dalam bentuk angka kualitatif.

Skala penilaian dibuat dengan rentangan dari 1 s/d 5. Penafsiran angka-angka tersebut adalah sebagai berikut: 1 = sangat kurang; 2 = kurang; 3 = cukup; 4 = baik; dan 5 = sangat baik.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



LAMPIRAN



Sumber:

Mohammad Hatta, Memoir, Tintamas Indonesia: Jakarta, 1978.

Memperlihatkan ketekunan Mohammad Hatta dalam belajar seperti tertera dalam bab I.

PIDATO DRS. MOH. HATTA.

Ketua Delegasi Republik Indonesia pada Pembukaan K.M.B.

KITA sekarang berkumpul didalam Konperensi Medja Bundar yang segera akan melangsungkan persidangnya, karena kita yakin, bahwa dengan ini akan dapat tertjapai ujudnja kedaulatan yang penuh tiada bersjarat bagi negara Indonesia.

Selama ini kita selalu berunding dan bertempur silih berganti. Tiada sesuatu yang membatasi segalanya ini kita bertempur dan berunding dengan tiada berhentinja, dengan tiada sampai kebatas yang tertentu.

Pengalaman² pahit diwaktu yang sudah-sudah menundjukkan, bahwa djalan satu²nja untuk menyelesaikan masalah Indonesia hanjalah penjerahan kedaulatan dengan segera pada bangsa Indonesia. Sedjarah perundingan yang sudah² menundjukkan, bahwa pokok kesulitan terletak pada soal² kedaulatan. Kedaulatan Belanda di Indonesia berdsarkan sedjarah.

Tetapi pada tanggal 17 Agustus 1945, hari proklamasi, hari menjtjetusnja revolusi di Indonesia adalah suatu pernyataan daripada gerakan perdjungan bangsa Indonesia seluruhnja. Dan sesudah itu, perdjungan bangsa Indonesia dilirikan dalam satu saluran yang tertentu, karena sesudah ini bangsa Indonesia telah menjatakan diri sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat. Sesudah hari ini pulalah, bangsa Indonesia bertindak keluar atas nama negaranya yang diwujudkan disini dalam Republiknja.

Rakjat Republik merasa berdaulat, karena mereka mempunyai pemerintahan sendiri, tentara sendiri, uang sendiri dan last but not least politik luar negeri sendiri.

Benar atau tidak, diakui atau tidak, rakjat Republik menganggap dirinja berdaulat. Apalagi setelah pengakuan de facto dari Republik Indonesia oleh negara² besar.

Timbul pertengkaran dan persengketaan yang diachiri dengan per-setudjuan Linggardjati. Tetapi ini kandas. Dan sesudah sekian lamanja bertempur dan berunding lagi, timbul lagi satu per-setudjuan Renville yang djuga tidak memberikan kata putusan yang terachir. Karena per-setudjuan Linggardjati inilah, yang terpaksa tidak dapat hidup lama sebagai satu per-setudjuan, Republik tampil kemuka didepan forum internasional.

Sumber:

Notosoetardjo, H. A., Dokumen-dokumen KMB, Endang, Jakarta, 1956, hlm. 58-63.

Semua persetujuan yang sekian kali telah ditanda tangani itu kandas, karena selalu dibatasi dalam pemertjahan soal sekitar penjerahan kedaulatan dalam prakteknja. Dan dalam hal ini masa peralihan selalu mendjadi pertengkaran yang tidak mentjapai udjungnja. Karena Belanda selalu berpendapat, bahwa pada masa peralihan ini, segala kedaulatan masih penuh berada ditangan Belanda, sedang dari pihak Indonesia mengemukakan konsepsinja bahwa dalam masa peralihan hendaknja diberikan tjorak yang tegas sebagai lajaknja suatu negara merdeka. Dengan ini akan diberikan satu tanggungdjawab yang penuh kepada pemerintah sementara.

Sekali lagi kembali kita menghadapi medja perundingan. Republik sedia berkorban turut sebagai satu negara yang telah berdaulat penuh mendjadi satu negara bagian, terutama dalam penjerahan kekuasaan Angkatan Perang dan perwakilan Luar Negeri yang akan diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat nanti. Pada masa peralihan memang dalam theorie Belanda masih memegang kedaulatan, tetapi dalam prakteknja, kedaulatan penuh ada ditangan Pemerintah Sementara. Dengan konsepsi daripada bangsa Indonesia inilah akan diadakan nanti pembagian tanggungdjawab yang hingga kini dipegang oleh Wakil Tinggi Mahkota di Indonesia kepada pemerintah interim.

Tetapi karena konsepsi Republik ini rupanja tidak dapat disetujui oleh Belanda timbullah persengketaan, hingga dua kali terdjadi pertempuran antara Belanda dengan Republik. Memang masa interim sukar dilalui. Maka satu-nja djalan yang dapat melaluinja ini ialah penjerahan kedaulatan dengan segera tiada bersjarat, yang bagi kalangan Belanda dalam masa akhir ini telah mendjadi anggapan suatu konsekwensi yang tidak dapat dielakkan. Dan dengan demikian, hendaknja RTC dilangsungkan dalam masa yang se-singkatnja.

Telah njata kepada kita semua, bahwa persengketaan yang ada antara Republik dan Belanda merupakan suatu soal psychologie yang mempunjai pangkalnja pada sedjarah kolonial, dan yang makin mendjadi karena psychologie conflict selama 4 tahun. Itulah sebabnja, maka tiap penundaan penjerahaan kedaulatan setelah diadakannya suatu persetujuan, oleh bangsa Indonesia dirasakan sebagai siasat politik untuk mempertahankan kekuasaan kolonial di Indonesia dan akibatnja ketjurigaan pada maksud Belanda bertambah besar. Memang, atas dasar tjuriga tidak akan bisa didapatkan kerdja sama yang baik; maka hendaknja hilangkan rasa tjuriga ini, yang hendaknja disampingi dengan saling mengerti dan dengan demikian penjerahan kedaulatan yang tiada bersjarat akan mendjadi suatu kenjataan yang tidak dapat dibantah.

Sebenarnya penjerahan kedaulatan itu tidak boleh dikatakan dengan tiada bersjarat sama sekali.

Kita mengetahui Pemerintah Belanda minta djaminan bahwa kedaulatan harus diserahkan pada suatu pemerintah federal Indonesia,

dan bahwa antara RIS dan Keradjaan Belanda akan dibentuk suatu Uni menurut dasar-dasar Renville.

Oleh karena Republik dan BFO menjetudjui sifat federal dari negara Indonesia, demikian pula tentang hubungan unie, dengan sjarat² jang tidak membatasi kedaulatan daripada kedua belah pihak, dari kedua anggota unie, maka ini tak dirasakan sebagai sesuatu jang membatasi kedaulatan. Bentuk federasi telah disetudjui oleh Republik sedjak masa Lingardjati dulu. Hal ini dinjatakan lagi dalam Konferensi Inter Indonesia. Dalam unie kedua pihak mempunyai hak jang sama, associatie bebas dengan tidak membatasi kedaulatan masing-masing anggota unie. Bentuk gambaran superstaat jang pada masa jang lalu mendjadi bajangan bagi kebanyakan golongan Belanda, mempunyai pengaruh psychologie rakyat Indonesia. Karena dengan gambaran superstaat ini, rakyat menganggap Belanda akan menutupi maksudnja dengan mempergunakan sebagai tabir maksudnja tersebut. Tetapi sjukurlah, kini anggapan kalangan Belanda tentang bajangan superstaat ini sudah tidak lagi ada. Unie hendaknja merupakan suatu associatie-bebas, tidak kaku, jang akan melantjarkan kerdja sama antara Indonesia dengan Belanda. Unie hendaknja tidak kaku dan masing² anggota sama-sama merdeka, karena kalau tidak demikian, tiap² ikatan akan putus dengan sendirinja. Associatie bebas ini diperlukan, buat lantjarnja kerdja sama dimasa jang lama, dan dengan tegas saja njatakan bahwa tidak dapat disetudjui bilamana unie jang kaku jang akan dikemukakan. Dengan bentuk unie ini, hendaknja rakyat dan masyarakat Belanda mempunyai pandangan djauh dalam menentukan langkah² lebih landjut.

Banyak dari kalangan masyarakat Belanda, terutama kalangan kapitalisnja jang merasa khawatir kalau² sesudah berdirinja RIS nanti, akan terantjam penanaman modalnja di Indonesia. Mereka takut, sebagaimana jang mereka bajangkan sebagai akibat konflik psychologie, jang menimbulkan pertentangan sendjata, hingga alat-alat banyak dihantjurkan : dengan demikian dunia kurang mendapatkan bahan jang perlu jang terdapat di Indonesia. Maka alangkah baiknja kalau dapat dengan didapatkan persetujuan tentang penjerahan jang penuh, dan tidak bersjarat.

Tetapi tidak perlu kita mengoreksi masa jang sudah². Apa boleh buat, nasi telah mendjadi bubur. Kedjadian dan djalan sedjarah telah mendapat hukum psychologienja sendiri.

Sebetulnja ketakutan jang ada dalam kalangan golongan bangsa Belanda ini tidak beralasan. Karena dalam Manifes Politik Republik Indonesia jang dikeluarkan pada tanggal 1 Nopember 1945 dengan tegas dinjatakan, bahwa milik dan kepentingan asing akan didjamin seperlunja. Bagian ini ialah sebagai berikut bunjinja :

„Kita mengetahui bahwa kedudukan negeri kita meletakkan suatu tanggungjawab yang besar dibahu kita terhadap keluarga dunia. Kita tidak membentji bangsa Belanda. Malahan kita mengetahui dan mengerti benar, bahwa untuk keperluan negeri dan bangsa kita didalam beberapa tahun yang akan datang ini kita akan memerlukan pertolongan bangsa asing didalam pembangunan negeri kita berupa kaum teknik, dan kaum terpeladjar, pun djuga kapital asing. Didalam memenuhi keperluan itu kita tidak akan menghindarkan kenyataan bahwa orang yang berbahasa Belanda, jaitu orang Belanda, mungkin akan lebih banyak dipergunakan, oleh karena mereka telah ada disini dan lebih biasa akan keadaan disini. Sehingga pelaksanaan kemerdekaan kita itu belum perlu berarti kerugian besar untuk pihak Belanda, djika diukur dengan uang atau djiwa, akan tetapi tentu sekali perubahan yang sebesar-besarnya didalam kedudukan politiknya.

Kita yakin bahwa tanah kita yang kaya raya ini djika diusahakan dengan sesungguhnya untuk meninggikan derajat penghidupan bangsa kita serta dunia umumnya akan masih banyak benar memberi ruangan untuk tenaga dari seluruh dunia, terutama dari Amerika Serikat, Australia dan Philipina, untuk turut dalam pembangunan negara dan bangsa kita.

Akan tetapi sekalian itu hanya akan dapat dimulai djikalau pertentangan kedaulatan antara Belanda dan kita dapat selesai dengan pengakuan hak kita untuk menentukan nasib kita sendiri, jaitu dengan pengakuan negara dan pemerintahan yang telah kita pilih. Bukan sadja kita dan barangkali pihak Belanda, berkepentingan dengan lekas terlaksananya hal ini, akan tetapi seluruh dunia yang menunggu² sumbangan tanah serta bangsa Indonesia terhadap kekurangan yang ada didunia sekarang.

Dengan pengakuan kemerdekaan kita, kita akan menanggung segala yang patut kita tanggung menurut kedudukan kita. Segala hutang Hindia Belanda sebelum penjerahan Djepang yang patut mendjadi tanggungan kita, kita akui hutang kita.

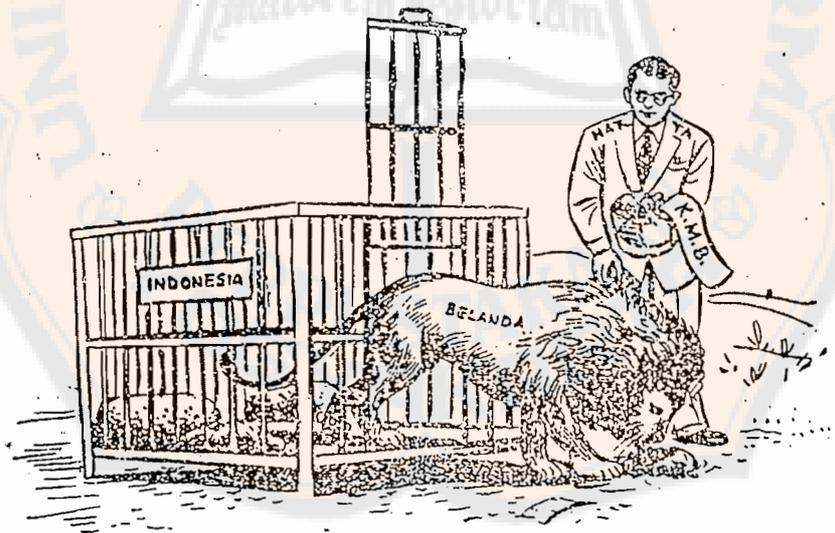
Segala milik bangsa asing selain daripada yang diperlukan oleh negara kita untuk diusahakan oleh negara sendiri, dikembalikan pada yang berhak, serta yang diambil oleh negara akan dibayar kerugiannya dengan se-adil²nja.

Hendaknya kini orang Belanda pandai melihat kemuka, melihat masa depan, setjara dinamis, dan saja tegaskan disini, bahwa ini tidak akan merugikan kedudukan Belanda malahan akan lebih menguntungkan. Pembangunan yang akan segera dilangsungkan di Indonesia akan berimbangan djuga dengan pembangunan yang diselenggarakan dinegeri Belanda sendiri.

Sudah barang tentu, dalam suasana baru nanti Pemerintah akan menjalankan politik kemakmuran rakyat. Indonesia tidak akan lagi menjadi penanaman modal asing yang akan merugikan tingkat hidup bangsa Indonesia. Penanaman modal asing akan diatur sedemikian rupa hingga tidak akan merugikan tingkat hidup rakyat di Indonesia. Indonesia tidak lagi akan menjadi suatu inlander kolonie. Indonesia akan menjadi makmur dan tidak akan merugikan negara manapun, malahan akan menguntungkan, terutama Belanda sendiri.

Memang, penjerahan kedaulatan, penjerahan hutang piutang serta hak kewajiban akan menjadi atjara terpenting daripada konferensi. Memang, banjak seluk beluknya soal² ini, tetapi tidak boleh hendaknya karena ini konferensi kita pandjang²kan.

Hendaknya dalam Konferensi ini kita rundingkan soal-soal yang pokok-pokok dan prinsipil saja, sedang detail dan pelaksanaannya dapat nanti diselenggarakan oleh Pemerintah Sementara daripada Republik Indonesia Serikat.



Gambar tersebut menerangkan bab IV tentang posisi Indonesia dan Belanda dalam sidang KMB.



Konperensi hendaknja djangan diperpanjang waktunja lebih dari waktu psychologisch jang mendjadi batas'nja.

Satu Djanuari 1949 telah lama liwat, tidak lagi dapat kita kenangkan kembali apa jang seharusnya terdjadi pada saat tersebut. Tetapi dengan mengingat semua perhitungan jang ada sekarang, hendaknja sebelum fadjar menjingsing ditahun 1950, Republik Indonesia Serikat jang merdeka dan berdaulat telah berdiri.

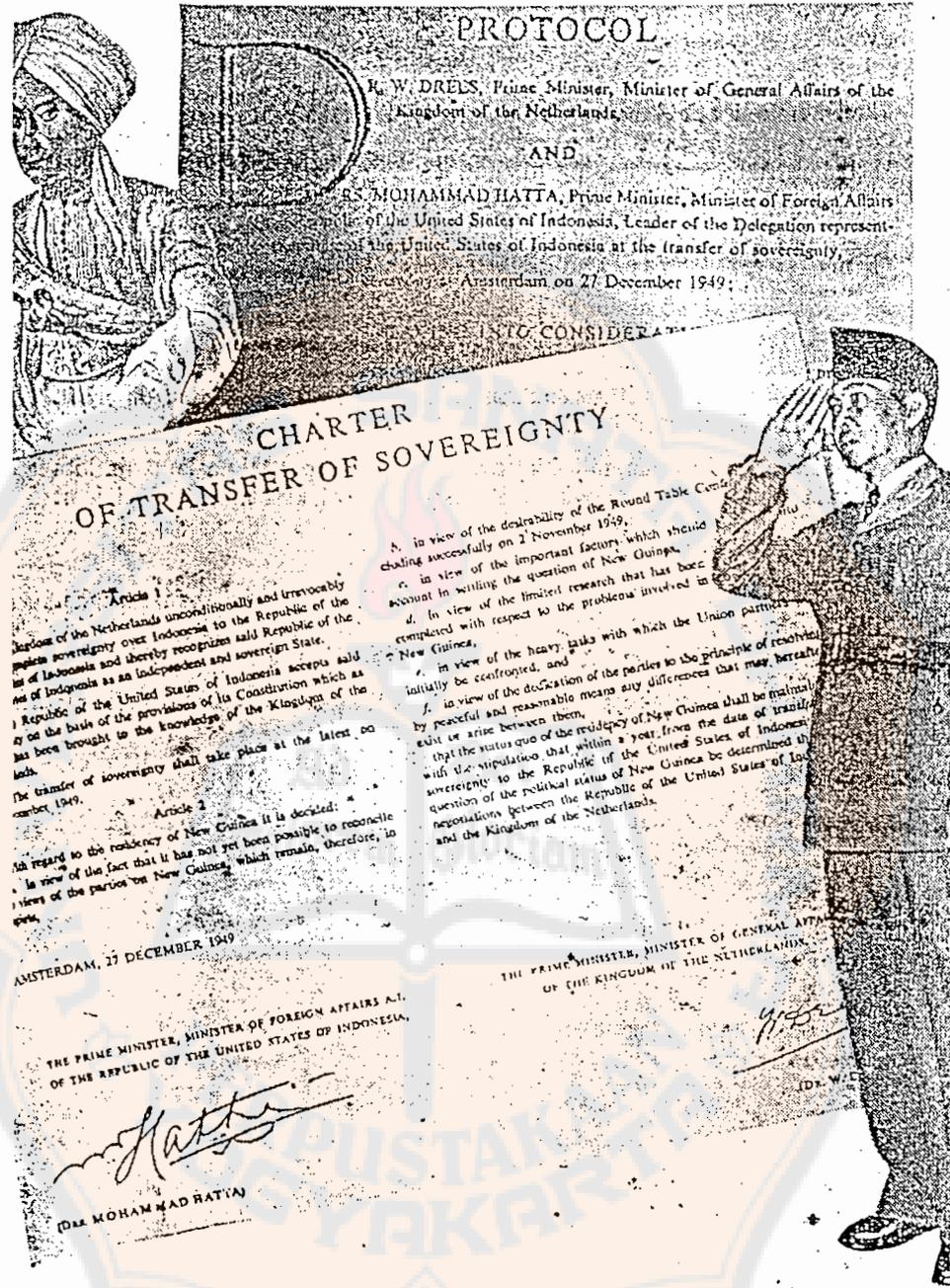
Tuntutan daripada psychologi masa ini hendaknja djangan diabaikan.

Sekali ini hendaknja kita berunding dengan maksud sungguh² untuk bisa mendapatkan penjelesaian. Kita pusatkan kepentingan kita dimasa datang, buat kepentingan kedua belah pihak. Dengan demikian, akan dapat diperketjil masalah-masalah jang sulit² jang baru dipetjahkan dalam Konperensi ini.

Empat tahun lamanja kita bermusuhan, empat tahun lamanja kita berada di-tengah² persengketaan sendjata. Kini kita menghadapi lembaran baru kita menghadapi sedjarah baru, dimana dasar damai akan mendjadi dasar jang utama.

Dengan sedjarah baru ini, Indonesia dan Belanda akan menghadapi masa bahagia. Anak²-tjutju kita akan berterima kasih kepada kita, dengan hasil² jang didapatkan pada saat dewasa ini.

Semoga hendaknja Tuhan jang Maha Esa memberkahi djalannja perundingan selandjutnja.



„Sampai pada tujuan”
Kemerdekaan yang telah ditjapai setelah memperjuangkan bertahun-tahun.

Gambar tersebut menerangkan bab IV tentang proses perjuangan Indonesia yang pada akhirnya Proklamasi kemerdekaan diakui secara de Facto dan de Jure.

INDUK PERSETUDJUAN

Delegasi-delegasi :

1. Pemerintah Republik Indonesia,
2. Pertemuan untuk Bemusjawaratan Federaal (Bijeenkomst voor Federaal Overleg),
3. Keradjaan Nederland,

menimbang bahwa mereka telah bersidang dalam Konperensi Medja Bundar supaya secepat mungkin ditjapai perdamaian jang baik dan kekal dalam pertikaian Indonesia dengan djalan memperoleh persetujuan antara peserta-peserta tentang tjara bagaimana akan diserahkan kedaulatan jang sesungguhnya-sungguhja, sempurna dan tiada bersjarat kepada Republik Indonesia Serikat sesuai dengan asas-asas Renville ; menimbang bahwa mereka telah mentjapai tudjuan itu dalam kerdja-sama jang baik ;

menimbang bahwa Komisi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Indonesia dalam peristiwa itu telah memberikan bantuan jang berharga ;

telah memutuskan sebagai berikut :

I. Sekalian hasil Konperensi Medja Bundar termaktublah dalam rantjangan-rantjangan persetujuan dan surat-surat ; segala dokumen itu dilampirkan pada resolusi ini ;

II. A. Rantjangan-rantjangan persetujuan sebagai berikut :

1. Rantjangan Piagam penjerahan kedaulatan ;
2. Rantjangan Statut-Uni, termasuk pula lampiran dan persetujuan-persetujuan khusus tentang pokok-pokok jang terpenting hal kerdja-sama dikemudian hari ;
3. Rantjangan persetujuan Perpindahan, termasuk persetujuan-persetujuan khusus berisi peraturan pokok-pokok jang perlu diurus sebagai akibat penjerahan kedaulatan.

B. Tentang beberapa soal jang tersendiri, Delegasi-delegasi telah saling mempermaklumkan masing-masing pendirian dengan surat-menjurat.

III. Dokumen-dokumen jang disebut pada A dan B disusun dalam bahasa Indonesia dan Belanda.

Kedua naskah itu mempunjai kekuatan jang sama.

Adalah pula dibuat naskah resmi berbahasa Inggeris ; naskah itulah

Sumber:Sumber:

Notosoetardjo, H.A., Dokumen-dokumen KMB, Endang: Jakarta, 1956, hlm. 65-78.

jang akan menentukan djikalau ada terdapat perbedaan arti antara naskah Indonesia dan naskah Belanda.

IV. Penerimaan resolusi ini oleh daerah-daerah jang berhimpun dalam Republik Indonesia Serikat dipihak jang satu dan oleh Kerajaan Nederland dipihak jang lain akan dipandang ratifikasi dokumen-dokumen jang dilampirkan pada resolusi ini. Ratifikasi oleh salah satu pihak tidak akan mempunyai kekuatan, djika salah satu dari pihak jang lain tidak meratifikasi resolusi ini.

V. Persetujuan-persetujuan jang disebut pada II akan mulai berlaku pada saat penyerahan kedaulatan ; penyerahan itu akan dilangsungkan dengan segala upatjara pada sidang di Amsterdam, selambat-lambatnja pada tanggal 30 Desember 1949.

VI. Komisi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Indonesia atau suatu badan Perserikatan Bangsa-bangsa jang lain akan mengawasi di Indonesia penepatan segala persetujuan tertjapai dalam Konperensi Medja Bundar.

Delegasi Pemerintah Republik
Indonesia,
MOHAMMAD HATTA,
Ketua.

Delegasi Pertemuan untuk
Permusjawaratan Federal
(Bijeenkomst voor Federaal
Overleg).
HAMID,
Ketua.

Delegasi Keradjaan Nederland,
J. H. VAN MAARSEVEEN,
Ketua,

Ketua Konperensi Medja
Bundar,
W. DREES.

Sekretaris-Umum
Konperensi Medja Bundar,
M. J. PRINSEN.

Komisi Perserikatan Bangsa-
bangsa untuk Indonesia,
R. HERREMANS,
Ketua-minggu.

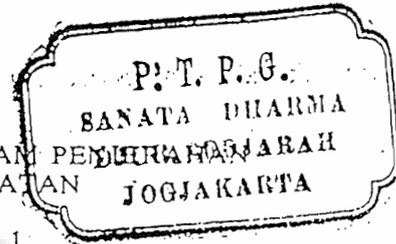
H. MERLE COCHRAN,
Anggota.

TH. K. CRITCHLEY,
Anggota.

J. A. ROMANOS,
Sekertaris I.

Tjataan. Naskah induk-persetudjuan berbahasa Belanda pertama-tama ditandatangani oleh Ketua Delegasi Keradjaan Nederland, naskah berbahasa Indonesia pertama-tama oleh Ketua Delegasi Republik Indonesia dan naskah berbahasa Inggeris pertama-tama oleh Ketua Delegasi Pertemuan untuk Permusjawaratan Federal.

RANTJANGAN PIAGAM PENYERAHAN
KEDAULATAN



Pasal 1

1. Keradjaan Nederland menjerahkan kedaulatan atas Indonesia jang sepenuhnya kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat lagi dengan tidak dapat ditjabut, dan karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai Negara jang merdeka dan berdaulat.
2. Republik Indonesia Serikat menerima kedaulatan itu atas dasar ketentuan-ketentuan pada Konstitusinja ; rantjangan konstitusi itu telah dipermaklumkan kepada Keradjaan Nederland.
3. Kedaulatan akan diserahkan selambat-lambatnja pada tanggal 30 Desember 1949.

Pasal 2

Tentang keresidenan Irian (Nieuw-Guinea) telah tertjapai persetudjuan sebagai berikut :

- a. disebabkan hal persesuaian antara pendirian masing-masing pihak tentang Irian belum dapat ditjapai, sehingga soal itu masih mendjadi pokok pertikaian ;
- b. disebabkan keharusan Konperensi Medja Bundar diachiri dengan berhasil pada tanggal 2 Nopember 1949 ;
- c. mengingat faktor penting-penting jang harus diperhatikan pada pemetjahan masalah Irian itu ;
- d. mengingat singkatnja penjelidikan jang telah dapat diadakan dan diselesaikan perihal soal-soal jang bersangkutan dengan masalah Irian itu ;
- e. mengingat sukarnja tugas-kewadajiban jang akan dihadapi dengan segera oleh peserta Uni, dan
- f. mengingat kebulatan hati pihak-pihak jang bersangkutan hendak mempertahankan asas supaya semua perselisihan jang mungkin terjnata kelak atau timbul diselesaikan dengan djalan patut dan rukun; maka status quo keresidenan Irian (Nieuw-Guinea) tetap berlaku seraja ditentukan bahwa dalam waktu setahun sesudah tanggal penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat masalah kedudukan kenegaraan Irian akan diselesaikan dengan djalan perundingan antara Republik Indonesia Serikat dan Keradjaan Nederland.

RANTJANGAN STATUT-UNI

Republik Indonesia Serikat dan Keradjaan Nederland,

telah memutus mengadakan kerdjasama dengan persahabatan atas dasar kesukarelaan, persamaan dan kemerdekaan sepenuh-penuhnya dan membentuk Uni Indonesia-Nederland, ja'ni dengan maksud mewujudkan kerdjasama itu dimasa depan, telah sepakat akan meletakkan dasar perhubungannya sebagai negara-negara jang merdeka dan berdaulat pada Statut-Uni ini, seraja berpendapatan bahwa tidak suatu apa pada Statut-Uni boleh ditafsirkan begini, bahwa diketjualikan sesuatu tjara kerdjasama jang tidak disebut padanja ataupun kerdjasama di sesuatu lapangan jang tidak disebut padanja, jang sekiranya dimasa perlu oleh kedua peserta dimasa depan.

TJORAK UNI

Pasal 1

1. Uni Indonesia-Belanda mewujudkan kerdjasama berbadan-perengkapan jang teratur antara Republik Indonesia Serikat dan Keradjaan Nederland atas dasar sukarela dan persamaan status dengan hak-hak jang sama.
2. Uni tidak memperkurang status tiap-tiap peserta sebagai negara jang merdeka dan berdaulat.

MAKSUD UNI

Pasal 2

1. Maksud Uni ialah kerdjasama kedua peserta guna mengurus kepentingannya jang bersama.
2. Kerdjasama itu akan berlangsung terutama dalam hal-hal dilapangan perhubungan luarnegeri, pertahanan dan sekedar perlu keuangan, serta pula dalam hal-hal jang bertjorak perekonomian dan kebudajaan.

Pasal 3

1. Kedua peserta berdjandji akan memperdasarakan ketatanegaraannya pada asas-asas kerakjatan dan akan mengusahakan mengedjar pengadilan jang bebas.
2. Kedua peserta akan mengakui hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia jang termaktub pada lampiran Statut ini.

TJARA UNI BERLAKU

Pasal 4

Semua keputusan dalam Uni diambil atas persetujuan antara kedua peserta.

KEPALA UNI

Pasal 5

1. Dipuntjak Uni adalah Seri Baginda Ratu Juliana, Puteri Oranje-Nassau, dan, pada pergantian-Tachta, ahli waris Baginda jang sah pada Mahkota Nederland turun temurun.
2. Apabila Kepala Uni belum dewasa atau apabila Kepala Uni tidak sanggup lagi menjelenggarakan djabatannja, begitupun djikalau Kepala Uni meletakkan djabatannja untuk sementara waktu, maka kedua peserta dengan sepakat mengatur perwakilannja. Dengan semupakat bolehlah peraturan sedemikian itu diadakan lebih dahulu.

Pasal 6

Kepala Uni mendjelamakan lambang kerdjasama dengan sukarela dan jang landju-lama antara kedua peserta.

BADAN-BADAN PERLENGKAPAN UNI

Pasal 7

1. Untuk melaksanakan Uni maka dua kali setahun, lagi pula seberapa kali dianggap perlu oleh kedua peserta, diadakanlah konperensi oleh menteri-menteri atau orang-orang jang mempunjai pertanggung-djawab jang sama atau serupa menurut ketatanegaraan peserta itu; menteri-menteri dan orang-orang itu ditundjukkan oleh masing-masing peserta.
2. Ketjuali djika sudah bermupakat lain, maka dari tiap-tiap peserta tiga orang menteri akan menghadiri konperensi itu.

Pasal 8

Menteri-menteri jang menghadiri konperensi tetap bertanggung-djawab kepada badan-badan perlengkapan peserta masing-masing, menurut ketatanegaraan masing-masing peserta.

Pasal 9

Konperensi menteri itu membentuk panitia-panitia sekedar perlu; jang diangkat mendjadi anggota panitia tadi diangkat oleh kedua peserta dengan angka jang sama.

Pasal 10

1. Kedua peserta akan mengadakan hubungan berpadanan dan kerdjasama jang tetap antara parlemen-parlemen peserta masing-masing.
2. Perundingan pertama para wakil parlemen-parlemen akan diadakan didalam waktu delapan bulan setelah parlemen sementara Republik Indonesia Serikat terbentuk.

Pasal 11

1. Uni mempunjai sekertariat jang tetap. Tiap-tiap peserta menundjuk seorang sekertaris-umum ; seorang diantaranya memegang pimpinan sekertariat bergiliran sekahun seorang.
2. Sekalian pegawai lain diangkat dengan sepakat kedua sekertaris-umum menurut sepatjuk instruksi jang disusun bersama-sama oleh kedua peserta.

KEPUTUSAN DAN PERATURAN BERSAMA

Pasal 12

1. Pada konperensi menteri tersebut diambil keputusan dengan sepakat perwakilan Republik Indonesia Serikat pada suatu pihak dan perwakilan Keradjaan Nederland pada pihak jang lain.
2. Keputusan konperensi dapat diperlakukan menurut atjara sebagai berikut.
3. Keputusan-keputusan hendak mengadakan peraturan-peraturan bersama jang diambil pada konperensi menteri perlu disahkan oleh parlemen peserta masing-masing. Setelah keputusan itu disahkan oleh kedua parlemen, maka Kepala Uni akan mentjatat (konstatir) bahwa adalah persetudjuan antara kedua peserta dan selandjutnja peraturan bersama itu akan diumumkan dalam Surat-berita Negara resmi masing-masing peserta. Karena pengumuman itu maka peraturan bersama mendapat kekuatan hukum. Peraturan-peraturan bersama tidak boleh dibanding (onsohendbaar).
4. Tentang keputusan konperensi jang lain maka atas permohonan konperensi dapat pula Kepala Uni mentjatat bahwa sudah ada persetudjuan antara kedua peserta.

MAHKAMAH-ARBITRASI UNI

Pasal 13

1. Ada sebuah Mahkamah-Arbitrasi Uni jang mendjalankan pengadilan atas nama Kepala Uni.
2. Mahkamah itu mengadili pertikaian hukum jang dihadapkan kepadanya oleh salah satu peserta terhadap peserta jang lain ataupun oleh kedua peserta bersama dan jang timbul daripada Statut-Uni, daripada sesuatu persetudjuan antara peserta atau daripada peraturan bersama.

Pasal 14

1. Mahkamah-Arbitrasi Uni beranggota tiga orang jang diangkat mendjadi anggota oleh Republik Indonesia Serikat dan lagi tiga orang jang diangkat mendjadi anggota oleh Keradjaan Nederland.
2. Anggota-anggota Mahkamah diangkat mendjadi anggota untuk masa sepuluh tahun lamanja. Apabila sudah berusia 65 tahun tak boleh tidak mereka harus meletakkan djabatannja.

3. Bergiliran seorang Indonesia dan seorang Belanda maka tiap-tiap tahun seorang diantara anggota Mahkamah tersebut dipilih menjadi ketua oleh Mahkamah itu.

4. Sebelum memangku djabatannya maka anggota-anggota Mahkamah itu bersumpah atau berdjandji menurut agamanya dihadapan Kepala Uni bahwa mereka akan memenuhi segala kewadajiban djabatannya dengan djudjur, teliti dan adil dan tengah mendjalankan kewadibannya akan bertingkah-laku dengan patut, sebagaimana seharusnya bagi seorang anggota Mahkamah-Arbitrasi Uni yang baik.

Pasal 15

1. Mahkamah-Arbitrasi Uni mengambil keputusan dengan suara terbanyak.

2. Djika suara yang berlawanan sama banjaknja, maka — ketjuali djika kedua peserta meminta lain — Mahkamah itu akan menghadapkan permintaan kepada Presiden Mahkamah Djustisi Internasional atau kepada badan internasional lain yang ditunjuk dengan suara terbanyak, supaja diangkat seorang berkebangsaan lain menjadi anggota luar biasa pada Mahkamah-Arbitrasi Uni; anggota itu akan turut mengulangi bermusjawarat tentang pertikaian hukum itu serta memutuskannja, ialah dengan segala hak anggota biasa.

Pasal 16

Ketentuan-ketentuan landjut tentang atjara Mahkamah-Arbitrasi Uni dan hal menjusun dan mengatur pekerdjaan Mahkamah itu akan ditetapkan dengan peraturan bersama. Selama peraturan bersama sedemikian itu belum ada, maka Mahkamah sendirilah yang mengatur atjara, susunan dan aturan pekerdjaannya. Djika hal itu Mahkamah tadi tidak dapat mentjapai persetudjuan, maka berlakulah ajat kedua pasal tadi.

Pasal 17

Kedua peserta berdjandji akan menurut keputusan Mahkamah-Arbitrasi Uni; mereka akan mendjalankan keputusan itu atas kuasa dan tanggung-djawab sendiri, masing-masing didalam lingkungan daerah-hukumnja.

Pasal 18

Djika ketentuan-ketentuan pada hukum salah satu peserta atau pada hukum badan-badan hukum-publik didalam lingkungan daerah-hukumnja dipihak satu bertentangan dengan ketentuan-ketentuan pada Statut Uni, pada sesuatu persetudjuan antara peserta ataupun pada sesuatu peraturan bersama dipihak lain, maka yang akan diutamakan ialah golongan ketentuan yang tersebut kudian itu.

I

Pasal 19

Kedua peserta tidaklah kehilangan keleluasaan mendjalankan segala hak jang ada padanja menurut hukum bangsa-bangsa atau lain-lain perihal meminta keputusan sesuatu hakim atau hakim internasional dalam hal-hal Mahkamah-Arbitrasi Uni itu menurut pendapat kedua peserta tidak berkuasa ataupun dalam hal-hal Mahkamah itu menjatakan dirinja tidak berkuasa.

PERHUBUNGAN LUAR NEGERI

Pasal 20

Aturan mengenai kerdjasama kedua peserta dilapangan perhubungan luar-negeri diberikan pada persetujuan jang dilampirkan pada Statut ini.

PERTAHANAN

Pasal 21

Aturan mengenai kerdjasama kedua peserta dilapangan pertahanan diberikan pada persetujuan jang dilampirkan pada Statut ini.

PERHUBUNGAN KEUANGAN DAN PEREKONOMIAN

Pasal 22

Aturan mengenai kerdjasama kedua peserta dilapangan perhubungan keuangan dan perekonomian diberikan pada persetujuan jang dilampirkan pada Statut ini.

PERHUBUNGAN KEBUDAJAAN

Pasal 23

Aturan mengenai kerdjasama kedua peserta dilapangan kebudayaan diberikan pada persetujuan jang dilampirkan pada Statut ini.

KEWARGANEGARAAN

Pasal 24

1. Dengan tidak mengurangi segala apa jang sudah atau lagi akan ditentukan pada persetujuan khusus-khusus antara kedua peserta, maka hal hak-hak kenegaraan dan lain-lain didjalankan oleh warganegara peserta jang satu didaerah-hukum peserta jang lain, akan berlaku jang ditentukan dibawah ini :

a. kebangsaan warganegara peserta jang satu tidak akan mendjadi halangan hal berdjabatan didaerah-hukum peserta jang lain; melainkan terhadap kepada :

1°. djabatan-djabatan jang pemangkunja bertanggung-djawab kepada suatu badan perwakilan, melainkan jang sekiranya diketjualikan undang-undang ;

2°. segala djabatatan politik, berkuasa, kehakiman dan jang bersifat pemimpin jang ditundjukkan undang-undang ;

b. hal mendjalankan hak-hak sipil dan bekerdja dilapangan kemasjarakatan, tiap-tiap peserta senantiasa akan mengindahkan sepenuhnya segala kepentingan khusus didalam lingkungan daerah-hukumnja jang ada pada warganegara dan badan-badan hukum peserta jang lain, dan karena itu tidaklah seberapa ia akan membedakan antara warganegara dan badan-badan hukum masing-masing peserta, dengan tidak mengurangi kekuasaan tiap-tiap peserta akan menetapkan peraturan-peraturan jang perlu, baik guna mendjaga kepentingannya jang bersifat kebangsaan, maupun guna melindungi golongan-golongan jang lemah perekonomiannya.

2. Sekali-kali tidak boleh terdjadi warganegara dan badan-badan hukum peserta jang satu didaerah-hukum peserta jang lain dibawa setjara jang kurang sempurna daripada tjara membawa warganegara dan badan-badan hukum Negara asing.

KETENTUAN-KETENTUAN CHUSUS

Pasal 25

Untuk mengurus kepentingan peserta jang satu didaerah-hukum peserta jang lain Pemerintah peserta mengangkat Komisaris Agung. Mereka itu berkedudukan wakil diplomatik serta berpangkat Duta Besar (Ambassadeur).

Pasal 26

1. Sekadar tidak ada persetujuan jang menetapkan lain, maka belandja Uni seperdua ditanggung tiap-tiap peserta.
2. Aturan-aturan landjut mengenai belandja Uni akan ditetapkan dengan peraturan bersama. Selama belum diadakan peraturan bersama sedemikian, maka konperensi menteri itu akan mengadakan aturan-aturan seperlunya.

Pasal 27

1. Semua surat-surat resmi jang terbit daripada konperensi menteri dan badan-badan perlengkapan Uni akan dikarang berbahasa-bahasa Indonesia dan Belanda.
2. Kedua naskah itu sama kekuatannya.

Pasal 28

Statut-Uni dan persetujuan-persetudjuan jang bersangkutan, serta peraturan-peraturan bersama dan persetujuan-persetudjuan jang akan diadakan, boleh dikirimkan ke Sekertariat Perserikatan Bangsa-bangsa untuk didaftarkan sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa pasal 102.

LAMPIRAN PADA RANTJANGAN STATUT-UNI

Hak-hak dan kebebasan dasar manusia jang diakui kedua peserta karena pasal 3 Statut-Uni dan jang mendjadi hak setiap orang mendjaulankannya dan mengalaminya dengan tidak diadakan perbedaan apa djuapun karena bangsa, warna kulit, laki-perempuan, bahasa, agama, kebangsaan mula dan asal-usul, kemampuan atau keturunan, adalah sebagai berikut :

1. (1) Setiap orang diakui manusia peribadi terhadap Undang-Undang.
(2) Semua orang berhak menuntut diperlakukan sama dan dilindungi sama oleh Undang-undang.
(3) Semua orang berhak menuntut perlindungan jang sama dari segala pembelakangan dan segala penghasutan jang bertudjuan pembelakangan demikian itu.
2. Semua orang jang ada didaerah Negara sama berhak menuntut perlindungan dirinja dan harta-bendanya.
3. (1) Setiap orang berhak dengan bebas bergerak dan berdiam didalam perbatasan negara.
(2) Setiap orang berhak meninggalkan negeri dan — asal warga-negara atau penduduk — kembali kesitu.
4. Tiada seorang djuapun boleh ditangkap atau ditahan melainkan atas perintah kekuasaan jang sah menurut peraturan-peraturan undang-undang, lagi dalam hal-hal dan dengan tjara tersebut padanja.
5. (1) Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu-gugat.
(2) Masuk halaman-rumah atau memasuki tempat kediaman orang tidak dengan seizin sipenghuni hanja diperbolehkan dalam hal-hal jang ditetapkan pada aturan-hukum jang berlaku atasnja.
6. Kebebasan surat-menjurat dan rahasia-surat tidak boleh dilanggar, ketjuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain jang dinjatakan sah oleh peraturan-peraturan undang-undang dalam hal-hal temmaktub jang tersebut pada peraturan-peraturan itu.
7. Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, keinsafan batin dan agama ; hak itu mengandung pula kebebasan bersalin agama atau kejakinan, lagi pula kebebasan menganut agama atau kejakinannya, baik seorang diri maupun berdjama'ah, baik dimuka umum maupun didalam lingkungannya sendiri, dengan djalan mengadjar-

kannja, mengamalkannja, beribadat, mendjundjung tinggi suruhan dan larangan agama dan mendidik anak-anak menurut agama atau kejakinan orang-tuanja.

8. Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan melahirkan pendapat.
9. Hak penduduk atas kebebasan berkumpul dan berapat setjara damai diakui dan sekadar perlu didjamin pada peraturan-peraturan undang-undang.
10. (1) Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama dengan orang lain.
(2) Tak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan tiada semena-mena.
11. (1) Dengan diperhatikan sjarat-sjarat ketjakapan, setiap orang berhak atas pekerdjaan jang ada, atas kebebasan untuk memilih pekerdjaan dan atas sjarat-sjarat perburuhan jang adil.
(2) Setiap pekerdja berhak atas upah jang berpadanan sehingga didjamin kepadanya dan kepada keluarganja kehidupan jang patut bagi seorang manusia.
12. Setiap orang berhak mendirikan serikat sekerdja ataupun turut serta dalam serikat sekerdja untuk melindungi kepentingannya.
13. (1) Pengadjaran bebas diberikan, dengan tidak mengurangi pengawasan Pemerintah menurut peraturan-peraturan undang-undang.
(2) Peladjaran bebas dipilih.
14. Pemerintah sesanggupnja memadjukan kepastian sosial ; terutama dimadjukannya memberi kepastian dan djaminan atas sjarat-sjarat dan keadaan perburuhan jang baik, mentjegah dan membasmi pengangguran dan memadjukan mengadakan persediaan untuk hari-tua dan memelihara djanda-piatu.
15. (1) Hal meninggikan deradjat kemakmuran rakjat senantiasa diperhatikan Pemerintah dengan sehimmat-himmatnja, sedang jang selalu ditjita-tjitakannya ialah supaya bagi setiap orang dan bagi keluarganja terdjaminlah hendaknya deradjat kehidupan jang patut bagi seorang manusia.
(2) Dengan tidak mengurangi pembatasan jang akan ditentukan untuk keperluan umum dengan peraturan-peraturan undang-undang, maka kepada semua orang sedapat mungkin diberi kesempatan jang sama akan turut serta mengusahakan sumber kemakmuran negeri, ialah sesuai dengan tabiat, pembawaan dan ketjakapannya.
16. Keluarga berhak mendapat perlindungan masjarakat dan Negara.

17. (1) Pemerintah berusaha sedapat-dapatnja akan memadjukan ketjerdasan rakjat, baik rohani maupun djasmani.
 - (2) Dimana dirasa perlu, Pemerintah menjediakan pengadjaran umum ; pengadjaran umum itu diberikan atas dasar tenggang-menenggang dan penghormatan jang sama terhadap kejakinan agama tiap-tiap orang dan dengan kesempatan memberikan pengadjaran agama diwaktu djam-peladjaran biasa, sesuai dengan kehendak orang tua si murid.
 - (3) Murid-murid sekolah partikelir mempunjai hak jang sama dengan murid-murid sekolah umum, ja'ni djikalau sekolah partikelir itu mentjukupi sjarat-sjarat kebaikan pengadjaran jang ditentukan bagi pengadjaran umum.
 - (4) Diakuilah kebebasan akan mendjalankan pekerdjaan-pekerdjaan sosial dan amal, akan membentuk organisasi untuk itu dan untuk pengadjaran partikelir, pun djuga akan memperoleh serta mempunjai harta untuk maksud itu.
18. Hal memadjukan kesehatan umum (openbare hygiëne) dan kesehatan rakjat senantiasa diperhatikan Pemerintah dengan sehimmat-himmatnja.
19. Pemerintah memberi perlindungan jang sama kepada semua persekutuan dan organisasi-organisasi agama jang diakui.

Tiap-tiap peserta didaerah-hukumnja mempeitahankan pelaksanaan bebas hak-hak dan kebebasan dasar manusia jang terdaftar pada lampiran ini, sambil memperhatikan perdjandjian-perdjandjian internasional dan asas-asas hukum jang diakui internasional mengenai pelaksanaan itu. Pelaksanaan hak-hak dan kebebasan-kebebasan jang terdaftar pada lampiran ini tidak boleh dibatasi melainkan dengan maksud supaya dapat diperhatikan hak-hak dan kebebasan orang lain, kesusilaan, ketenteraman dan kesedjahteraan umum dalam ketertiban-hukum demokrasi belaka.

RENTJANA PERSETUDJUAN LINGGARDJATI.

Pemerintah Belanda dalam hal ini berwakilkan *Komisi Djenderal*
dan

Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini berwakilkan *Delegasi Indonesia*.

Oleh karena mengandung keinginan yang iklas hendak menetapkan perhubungan yang baik antara kedua bangsa, Belanda dan Indonesia, dengan mengadakan tjara dan bentuk bangun yang baru, bagi kerdja-sama dengan suka rela yang merupakan djaminan sebaik-baiknya bagi kemajuan yang bagus, serta dengan kukuh teguhnja daripada kedua negeri itu, didalam masa datang, dan yang membukakan djalan kepada kedua bangsa itu untuk mendasarkan perhubungan antara kedua belah pihak atas dasar-dasar yang baru, menetapkan mupakat seperti berikut, dengan ketentuan akan mengandjurkan ini selekas-lekasnja untuk memperoleh kebenaran daripada madjelis-madjelis perwakilan rakjat masing-masing :

Pasal 1.

Pemerintah Belanda mengakui kenjataan kekuasaan de facto Pemerintah Republik Indonesia atas Djawa, Madura dan Sumatera.

Adapun daerah-daerah yang diduduki oleh tentara Serikat atas tentara Belanda dengan berangsur-angsur dan dengan kerdja bersama antara kedua belah pihak akan dimasukkan pula kedalam Daerah Republik. Untuk menjelenggarakan yang demikian itu, maka dengan segera akan dimulai melakukan tindakan yang perlu-perlu supaja, selambatnja pada waktu yang disebutkan dalam Pasal 12 termasuknja daerah-daerah yang tersebut itu telah selesai.

Pasal 2.

Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia bersama-sama menjelenggarakan segera berdirinja sebuah negara berdaulat dan berdemokrasi, yang berdasarkan perserikatan, dan dinamai Negara Indonesia Serikat.

Pasal 3.

Negara Indonesia Serikat itu akan meliputi daerah Hindia Belanda seluruhnja dengan ketentuan, bahwa, djika kaum penduduk daripada sesuatu bagian daerah, setelah dimusjawaratkan dengan lain-lain bagian daerah pun djuga, menjatakan menurut aturan demokratis, tidak atau masih belum suka masuk kedalam perikatan Negara Indonesia Serikat itu, maka untuk bagian daerah itu berkedudukan istimewa terhadap Negara Indonesia Serikat itu dan terhadap keradjaan Belanda.

Pasal 4.

(1) Adapun negara-negara yang kelak merupakan Negara Indonesia Serikat itu ialah Republik Indonesia, Borneo dan Timur Besar jaitu dengan tidak mengurangi hak kaum penduduk daripada sesuatu bagian daerah, untuk menjatakan kehendaknja, menurut aturan demokratis, supaja kedudukannja dalam Negara Indonesia Serikat itu diatur dengan tjara lain.

(2) Dengan tidak menjalahi ketentuan didalam pasal 3 tadi dan didalam ajat ke (1) pasal ini, Negara Indonesia Serikat boleh mengadakan aturan istimewa tentang daerah ibu negerinja.

Pasal 5.

(1) Undang-undang Dasar dari pada Negara Indonesia Serikat itu ditetapkan nanti oleh sebuah persidangan pembentuk negara, yang akan didirikan daripada

Sumber:

Notosoetardjo, H.A.. Dokumen-dokumen KMB. Endang: Jakarta, 1956, hlm. 189-

wakil-wakil Republik Indonesia dan wakil-wakil sekutu lain-lain jang akan termasuk kelak dalam Negara Indonesia Serikat itu jang wakil-wakil itu ditundukkan dengan djalan demokratis, serta dengan mengingat ketentuan ajat jang berikut dalam pasal ini.

(2) Kedua belah pihak akan bermusjawarat tentang tjara turut tjampurnja dalam persidangan pembentuk negara itu oleh Republik Indonesia, oleh daerah-daerah jang tidak termasuk dalam daerah kekuasaan Republik itu dan oleh golongan-golongan penduduk jang tidak ada atau tidak tjukup perwakilannja, segala itu dengan mengingat djawab daripada pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia masing-masing.

Pasal 6.

(1) Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia, untuk membela peliharakan kepentingan-kepentingan bersama daripada Negara Belanda dan Indonesia akan bekerdja bersama untuk membentuk Persekutuan Belanda Indonesia, jang dengan terbentuknja itu Keradjaan Belanda, jang meliputi Negeri Belanda, Hindia Belanda Suriname dan Curacao ditukar sifatnja mendjadi persekutuan itu jang terdiri pada satu pihak daripada Keradjaan Belanda, jang meliputi Negeri Belanda, Suriname dan Curacao dan pada pihak lainnja daripada Negara Indonesia Serikat.

(2) Jang tersebut diatas ini tidaklah mengurangi kemungkinan untuk mengadakan pula aturan kelak kemudian berkenaan dengan kedudukan antara Negeri Belanda dengan Suriname dan Curacao satu dengan lainnja.

Pasal 7.

(1) Untuk membela peliharakan kepentingan-kepentingan jang tersebut didalam pasal diatas ini persekutuan Belanda — Indonesia itu akan mempunjai alat-alat kelengkapan sendiri.

(2) Alat-alat kelengkapan itu akan dibentuk kelak oleh Pemerintah Keradjaan Belanda dan Pemerintah Negara Indonesia Serikat mungkin djuga oleh madjelis madjelis perwakilan rakjat negara-negara itu.

(3) Adapun jang akan dianggap kepentingan bersama itu ialah kerdja-bersamu dalam hal perhubungan luar negeri, pertahanan dan, seberapa perlu keuangan sertu djuga hal-hal ekonomi dan kebudayaan.

Pasal 8.

Di putjuk Persekutuan Belanda Indonesia itu duduklah Radja Belanda. Keputusan-keputusan bagi mengusahakan kepentingan-kepentingan bersama itu ditetapkan oleh alat-alat kelengkapan Persekutuan itu atas nama Baginda Radja.

Pasal 9.

Untuk membela pelihara kepentingan-kepentingan Negara Indonesia Serikat di Negeri Belanda, dan kepentingan-kepentingan Keradjaan Belanda di Indonesia, maka Pemerintah masing-masingnja kelak mengangkat Komisaris Luhur.

Pasal 10.

Anggar-anggar Persekutuan Belanda-Indonesia itu antara lain-lain akan mengandung djuga ketentuan-ketentuan tentang :

- a) pertanggungan hak-hak kedua belah pihak jang satu terhadap jang lain dan djaminan-djaminan kepastian kedua-belah pihak menetapi kewadajiban-kewadajiban jang satu kepada jang lain ;
- b) hal kewarga-negaraan untuk warga negara Belanda dan warga negara Indonesia, masing-masing daerah lainnja ;
- c) aturan tjara bagaimana menjelesaikannja apabila dalam alat-alat kelengkapan Persekutuan itu tidak dapat ditjapai semupakat.
- d) aturan tjara bagaimana dan dengan sjara-sjarat apa alat kelengkapan Keradjaan Belanda memberi bantuan kepada Negara Indonesia Serikat itu tidak atau kurang tjukup mempunjai alat-alat kelengkapan sendiri ;

c) pertanggunggaan dalam kedua bagian Persekutuan itu, akan ketentuan hak-hak dasar, kemanusiaan dan kebebasan-kebebasan yang dimaksudkan djuga oleh Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa ;

Pasal 11.

(1) Anggaran-anggaran itu akan direntjanakan kelak oleh suatu permusjawaratan antara wakil-wakil Keradjaan Belanda dan Negara Indonesia Serikat yang hendak dibentuk itu.

(2) Anggaran-anggaran itu terus berlaku, setelah dibenarkan oleh madjelis-madjelis perwakilan rakjat kedua belah pihak masing-masingnja.

Pasal 12.

Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia akan mengusahakan supaya berwujudnja Negara Indonesia Serikat dan Persekutuan Belanda Indonesia itu telah selesai sebelum tanggal 1 Djanuari 1949.

Pasal 13.

Pemerintah Belanda dengan segera akan melakukan tindakan, agar supaya setelah terbentuknja Persekutuan Belanda Indonesia itu dapatlah Negara Indonesia Serikat diterima mendjadi anggota didalam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 14.

Pemerintah Republik Indonesia mengaku hak orang-orang bukan bangsa Indonesia akan menuntut dipulihkan hak-hak mereka yang dilakukan dan dikembalikan barang-barang milik mereka yang lagi berada didalam daerah kekuasaannja de facto. Sebuah panitia bersama akan dibentuk untuk menjelenggarakan pemulihan atau pengembalian itu.

Pasal 15.

Untuk mengubah sifat Pemerintah Hindia, sehingga susunannja dan tjara bekerdjanja seboleh-bolehnja sesuai dengan pengakuan Republik Indonesia dan dengan bentuk-susunan menurut hukum negara, yang direkakan itu, maka Pemerintah Belanda akan mengusahakan, supaya dengan segera dilakukan aturan-aturan undang-undang, akan supaya, sementara menantikan berwujudnja Negara Indonesia Serikat dan Persekutuan Belanda — Indonesia itu, kedudukan Keradjaan Belanda dalam hukum negara dan hukum bangsa-bangsa disesuaikan dengan keadaan itu.

Pasal 16.

Dengan segera setelah persetudjuan ini mendjadi, maka kedua belah pihak melakukan pengurangan kekuatan angkatan balatentaranja masing-masing. Kedua belah pihak akan bermusjawarat tentang sampai seberapa dan lambat tjepatnja melakukan pengurangan itu ; demikian djuga tentang kerdja-bersama dalam hal ketenteraan.

Pasal 17.

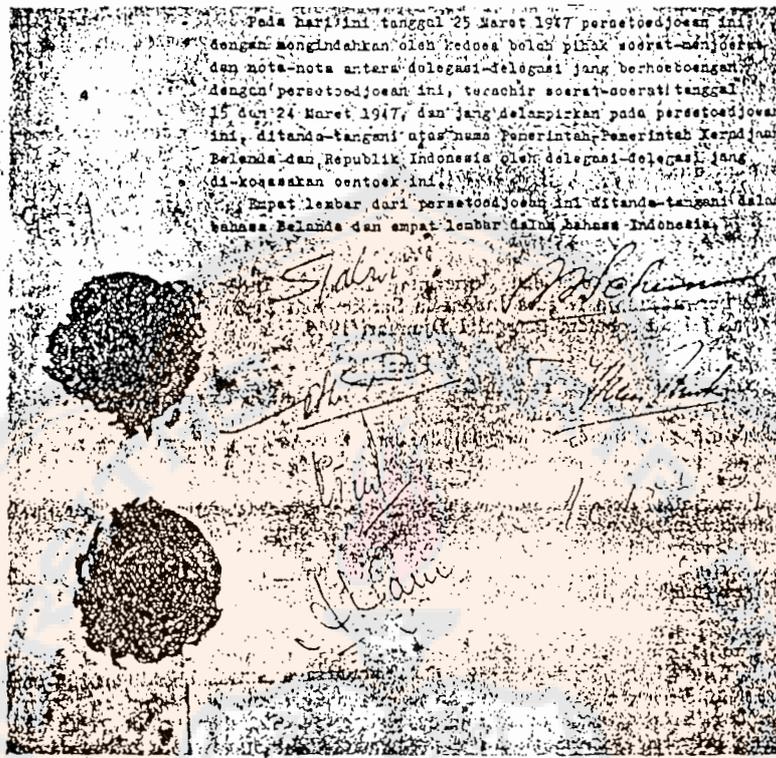
(1) Untuk kerdja-bersama yang dimaksudkan dalam persetudjuan ini antara Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia, hendak diwujudkan sebuah badan, yang terdiri daripada delegasi-delegasi yang ditundjukkan oleh tiap-tiap pemerintah itu masing-masingnja, dengan sebuah sekretariat bersama.

(2) Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia, bilamana ada tumbuh perselisihan berhubung dengan persetudjuan ini, yang tidak dapat diselesaikan dengan perundingan antara dua delegasi yang tersebut itu, akan menjerahkan keputusan kepada arbitrage. Dalam hal itu akan ditambah dengan seorang ketua bangsa lain, dengan suara memutuskan, yang diangkat dengan semufakat antara dua pihak delegasi itu, djika tidak berhasil semufakat itu, diangkat oleh ketua Dewan Pengadilan Internasional.

Pasal Penutup.

Persetudjuan ini dikarangkan dalam bahasa Belanda dan bahasa Indonesia. Kedua-dua naskah itu sama kekuatannja.

Djakarta, 15 November 1946.



Sungguh penting dan bersedjarah setjarik kertas ini, berupakan satu naskah perdjandjian antara Indonesia — Belanda. Mashur dengan sebutan Naskah Lingardjati. Sjahrir dan Schermerhorn sedang menanda tangani naskah tersebut pada 25 Maret 1947 di Djakarta.



Memperlihatkan situasi penandatanganan naskah Lingar Jati yang dibahas dalam bab II.

PERSETUDJUAN RENVILLE ✓

Komisi Tiga Negara telah diberitahukan oleh kedua delegasi, bahwa sudah ditanda-tangani, perdjandjian penghentian permusuhan ; maka pemerintah mereka masing-masing menerima pokok-pokok yang merupakan dasar untuk perundingan politik buat selanjutnya, ialah sebagai berikut :



Ketua delegasi Republik Indonesia — Mr. Amir Sjarifuddin — mengutarakan pidato pembukaan pada perundingan Renville.

Memperlihatkan situasi perundingan Renville yang dibahas dalam bab III.

1. Bantuan dari Komisi Tiga Negara akan diteruskan untuk melaksanakan dan mengadakan perdjandjian untuk menyelesaikan pertikaian politik dipulau-pulau Djawa, Sumatera dan Madura, berdasarkan kepada prinsip naskah perdjandjian „Linggardjati”.
2. Telah sewadjarnja, bahwa kedua pihak tidak berhak menghalang-halangi pergerakan rakjat untuk mengemukakan suaranya dengan leluasa dan merdeka, jang sesuai dengan perdjandjian Linggardjati. Djuga telah disetujui, bahwa kedua pihak akan memberi djaminan tentang adanya kemerdekaan bersidang dan berkumpul, kemerdekaan mengeluarkan suara dan pendapatannya dan kemerdekaan dalam penjiaran (publikasi), asal djaminan ini tidak dianggap meliputi djuga propaganda untuk mendjalankan kekerasan dan pembalasan (repressailles).
3. Telah sewadjarnja, bahwa keputusan untuk mengadakan perubahan dalam pemerintahan pamong-pradja didaerah-daerah hanya dapat dilakukan dengan persetujuan sepenuhnya dan sukarela dari penduduk didaerah-daerah itu pada suatu saat, setelah dapat didjamin keamanan dan ketenteraman dan tidak adanya lagi paksaan kepada rakjat.
4. Bahwa dalam mengadakan suatu perdjandjian politik dilakukan pula persiapan untuk lambat-laun mengurangkan djumlah kekuatan tenteranja masing.
5. Bahwa, setelah dilakukan penanda-tanganan perdjandjian penghentian permusuhan dan sebaik dapat dilaksanakan perdjandjian itu, maka kegiatan dalam lapangan ekonomi, perdagangan, perhubungan dan pengangkutan akan diperbaiki dengan segera, dengan bekerdja bersama-sama dimana harus diperhatikan kepentingan semua bagian-bagian lain di Indonesia.
6. Bahwa akan diadakan plebiscit sesudah waktu jang tidak kurang dari enam bulan dan tidak lebih dari satu tahun, setelah ditandatangani perdjandjian, dalam waktu mana dapat terdjadi tukar-menukar pikiran, dan pertimbangan tentang soal-soal jang penting setjara merdeka dan dengan tidak ada paksaan. Dalam waktu itu, dapat diadakan pemilihan umum setjara merdeka, agar diadakan pemilihan umum setjara merdeka, agar rakjat Indonesia dapat menentukan kedudukannya sendiri dilapangan politik dalam hubungan dengan Negara Indonesia Serikat.
7. Bahwa suatu dewan jang akan menetapkan undang dasar (constitutie) akan dipilih setjara demokrasi untuk menetapkan suatu undang dasar buat Negara Indonesia Serikat.
8. Telah didapat persetujuan, bahwa, setelah ditandatangani perdjandjian, sebagai jang dimaksud dalam pasal 1, djika salah satu dari kedua pihak meminta kepada Perserikatan Bangsa untuk mengadakan satu badan buat melakukan pengawasan sampai saat diserahkanja kedaulatan pemerintah Belanda kepada pemerintah Negara Indonesia Serikat, maka pihak jang kedua akan menimbangnja dengan sungguh. Dasar-dasar seperti dibawah ini diambil dari naskah perdjandjian „Linggardjati”.
9. Kemerdekaan bebas buat bangsa Indonesia seluruhnja.
10. Bekerdja bersama antara bangsa Belanda dan bangsa Indonesia.
11. Satu negara berdasarkan federasi jang berdaulat, dan dengan suatu undang undang dasar jang timbulnja melalui djalan-djalan demokrasi.
12. Suatu Uni (persatuan) dari Negara Indonesia Serikat dengan Keradjaan Belanda dan bagian-bagiannya jang lain, dibawah Turunan Radja Belanda.

RENVILLE, 17 Djanuari 1948.